

Guru di Era Great Shift

**BERSEKOLAH DI MASA LAMPAU, MENGAJAR DI ERA KINI,
MENYIAPKAN SISWA DI ERA TAK TERPREDIKSI**

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak cipta adalah hal eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Guru di Era Great Shift

**BERSEKOLAH DI MASA LAMPAU, MENGAJAR DI ERA KINI,
MENYIAPKAN SISWA DI ERA TAK TERPREDIKSI**



**UPGRIS PRESS
bekerja sama dengan
LAMDIAK**

Guru di Era Great Shift

BERSEKOLAH DIMASA LAMPAU ,MENGAJAR DI ERA KINI, MENYIAPKAN SISWA DI ERA TAK TERPREDIKSI

Muchlas Samani, Muhti
Reza Rahmadian, R. Mustofa

Cetakan Pertama, Maret 2024

ISBN :

Vi + 180 hal, 14,8 cm X 21 cm

Desain Sampul dan Tata Letak Isi : Muhlas, Agus Purbo

Penerbit:



Jl. Sidadadi Timur No 24, Dr. Cipto Semarang 50125 Jawa Tengah.

Telepon: 085 640 369 110

Email: unv.pgrisemarangpress@yahoo.com

<http://www.upgrismg.ac.id/upt-penerbitan/>

Bekerjasama dengan:

LAMDIK

Jl. Rawamangun Muka Barat 19, Jakarta Timur



Dicetak oleh Lontarmedia, Semarang

Isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya penulisan buku ini dapat selesai, walaupun memerlukan waktu lebih dari dua tahun. Penulisan buku ini dipicu oleh kerisauan penulis ketika terjadi pandemi covid-19 dan semua orang, khususnya guru kelabakan ketika harus mengajar secara daring. Bagaimana tidak, banyak guru yang belum akrab dengan internet, bahkan tidak sedikit yang belum mengenal sama sekali. Di daerah pedesaan juga masih banyak guru yang belum dapat menggunakan laptop atau komputer. Tahu-tahu mereka harus menggunakan internet sebagai wahana pembelajaran. Orangtua juga bingung bagaimana mendampingi anaknya belajar dari laptop atau gadget.

Guru itu belajar di masa lalu, mengajar di masa kini dan harus menyiapkan siswa untuk masa datang. Guru yang sekarang berusia sekitar 40 tahun itu menempuh SD sekitar tahun 1990an. Rasanya saat itu internet masih merupakan barang langka, laptop/komputer juga masih jarang-jarang dan itupun terbatas di daerah perkotaan, sementara di pedesaan masih merupakan barang asing. Bahkan HP juga masih merupakan barang langka, sehingga saat itu untuk menilpun harus ke wartel.

Memang pada tahun 2020 menjelang pandemi covid sudah cukup banyak orang, khususnya kalangan usia muda yang membeli makanan dengan GoFood, membeli tiket melalui Traveloka, melakukan videocall dan sebagainya. Tetapi tidak terbayang daring akan menjadi wahana pembelajaran. Itulah sebabnya para guru kelabakan saat harus mengajar secara daring, karena tidak punya pengalaman, baik ketika sekolah/kuliah maupun selama bekerja.

Pendidikan itu pada dasarnya menyiapkan anak didik untuk masa depannya. Seperti dipesankan Ali bin Abi Thalib RA, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Katakanlah siswa yang pada tahun 2020 sedang di SMP itu baru akan tamat S1 dan saatnya terjun ke masyarakat dan bekerja sekitar tahun 2030an. Di era *great shift* yang ditopang perkembangan teknologi yang demikian cepat, kita sulit membayangkan seperti apa pola kerja dan pola kehidupan di tahun tersebut. Pada hal guru harus menyiapkan siswanya di era itu. Jadi guru yang memiliki pengalaman sekolah/kuliah di sebelum era informasi, harus mengajar dengan menerapkan teknologi informasi untuk menyiapkan anak-anak di era pasca informasi yang sulit diprediksi. Dapat dibayangkan betapa berat sebenarnya tugas yang diemban para guru.

Karena kesulitan memprediksi situasi yang bakal dihadapi siswa, maka jalan yang dapat dilakukan guru adalah membekali siswa dengan kemampuan yang diyakini tetap diperlukan ketika eranya berubah dengan disertai kemampuan dan kemauan untuk belajar. Jadi yang ditumbuhkan bukan sekedar kompetensi tetapi kapasitas, sehingga dengan menggunakan bekal yang dimiliki siswa dapat mempelajari hal-hal baru yang dihadapi.

Buku ini dapat diselesaikan atas bantuan berbagai pihak, terutama teman-teman di LAMDIK (Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan), tempat kami bekerja, khususnya Mas Mukhlas yang biasa dipanggil Mas Lus yang me-layout naskah. Juga Ibu Dr. Dwijani Ratnademi yang me-*prove reading* naskahnya.

Surabaya, Januari 2024
Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pendahuluan	1
Guru: Siapakah Dia?	21
Seberapa Penting Peran Guru dalam Pendidikan?	36
Apa Kompetensi yang Harus Dimiliki Guru?	62
Bagaimana Menyiapkan Calon Guru yang Profesional?	95
Bagaimana Agar Kompetensi Guru Terus Meningkatkan?	133
Apa Tantangan Guru di Era <i>Great Shift</i> ?	169

PENDAHULUAN

Guru merupakan istilah yang sangat populer di masyarakat. Rasanya tidak ada orang yang tidak mengenal istilah guru. Bahkan ada beberapa naskah berbahasa Inggris yang menggunakan kata “*the guru*”. Setelah kita telusuri ternyata istilah guru berasal dari bahasa Sansekerta yang menyebutkan guru adalah seseorang yang memiliki banyak pengetahuan, kebijaksanaan, dan otoritas yang besar di bidang tertentu, dan yang menggunakannya untuk membimbing orang lain. Dalam definisi tersebut terkandung empat sifat yang dimiliki seseorang untuk dapat dikatakan sebagai guru, yaitu (1) memiliki banyak pengetahuan, (2) memiliki kebijaksanaan, (3) memiliki otoritas dalam bidang tertentu, dan (4) otoritas tersebut digunakan untuk membimbing orang lain.

Jika definisi tersebut diterapkan secara ketat, maka orang yang saat ini secara formal menyandang status sebagai guru belum tentu benar-benar “guru” jika tidak memiliki empat sifat tersebut. Sebaliknya mungkin ada orang yang dalam kehidupan sehari-hari tidak berprofesi sebagai guru sebenarnya menjalankan fungsi sebagai guru. Mungkin pemikiran itulah yang mendasari Mark Plus (sebuah lembaga konsultan marketing) menjuluki Hermawan Kertajaya sebagai “*the guru*”. Mungkin konsep itu pula yang kemudian memunculkan istilah guru bangsa yang disematkan kepada beberapa tokoh. Bahkan jika kata membimbing dimaknai tidak harus tatap muka, maka dapat juga para pemikir, penulis, bahkan nabi/rosul dapat disebut sebagai guru, karena lewat tulisan/perilaku/ gagasannya, memandu dan menginspirasi banyak orang.

Kalau kita renungkan, empat sifat dalam definisi guru menurut bahasa Sansekerta itu sangat cocok dengan ungkapan dalam bahasa Jawa bahwa guru itu “*digugu lan ditiru*” (dipercaya dan diteladani). Untuk dapat dipercaya (*digugu*) apalagi diteladani (*ditiru*) pastilah seseorang harus memiliki empat sifat tersebut. Walaupun memiliki kemampuan yang tinggi tetapi jika dalam kehidupan sehari-hari tidak bijaksana tentu orang lain tidak akan percaya apa yang dikatakan, apalagi menirunya. Jika orang yang pandai tidak membimbing, tentu orang lain tidak dapat memahami apa yang diinginkan dan tentu tidak dapat menirunya.

Menginternalisasi pengertian guru menurut bahasa Sansekerta dan ungkapan bahasa Jawa tentang guru, memandu kita bahwa guru itu bukan sekedar “pengajar” yang tugas pokoknya membimbing siswa mempelajari suatu pengetahuan, tetapi guru adalah “pendidik” yang tugasnya memandu siswa mengembangkan diri agar mampu memecahkan problem kehidupan secara arif. Tujuan akhir dari pengajar adalah penguasaan ilmu pengetahuan (materi ajar). Sementara bagi pendidik, penguasaan pengetahuan itu hanyalah “alat”, karena tujuan akhirnya kemandirian dan dapat memecahkan masalah kehidupan secara kreatif dan arif. Seperti nasehat Ki Hajar Dewantara, kemampuan intelektual, karakter dan keterampilan tidak boleh dipisahkan agar anak-anak kita tumbuh menjadi manusia yang sempurna.

Pemahaman bahwa guru itu pendidik dan bukan sekedar pengajar sangat penting di era digital, dimana sumber pengetahuan dapat diperoleh dengan mudah di dunia maya dan siswa dapat memilih sesuai yang diperlukan. Dengan situasi seperti itu, pendidikan akan mengarah ke *individual based* dengan model kurikulum berdiferensiasi. Tugas guru adalah memandu siswa memilih sumber pengetahuan yang cocok dan kemudian menggunakannya secara arif dalam kehidupan. Dalam konteks

inilah karakter sebagai sumber kearifan yang menyatu dan menjadi ruh dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Empat sifat guru dalam bahasa Sansekerta tersebut secara implisit juga mengandung makna bahwa profesi guru lebih dekat ke pengabdian dan bukan bisnis dalam arti mencari keuntungan. Oleh karena itu di kalangan masyarakat berkembang ungkapan “kalau ingin kaya jangan memilih profesi guru”. Tentu saja bukan berarti menjadi guru harus miskin. Yang jelas penghasilan menjadi guru tentu tidak sebesar pengusaha atau profesi lain yang banyak berkaitan dengan dunia bisnis. Jika sudah memilih profesi guru harus faham bahwa penghasilannya tidak dapat menjadikannya sebagai orang kaya.

Apakah profesi guru demikian penting, sehingga semua masyarakat mengenalnya? Pertanyaan dapat dijawab melalui dua pendekatan. Pertama dari pengalaman atau pengamatan sehari-hari, kedua dari hasil penelitian. Dari pengalaman, saya yakin hampir semua orang mengatakan peran guru sangat penting. Guru merupakan pilar utama dalam pendidikan dan orang-orang hebat di dunia ini memulai belajar melalui pendidikan. Dalam pendidikan, guru lebih penting dari kurikulum, buku dan sarana-prasarana sekolah. Karena pada akhirnya gurulah yang menerapkan kurikulum, menggunakan buku dan sarana di sekolah. Lebih baik sekolah memiliki guru yang bagus walupun sarana-prasarananya sederhana, dibanding memiliki sarana-prasarana bagus tetapi gurunya tidak baik, sehingga sarana yang bagus tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Demikian pula dengan kurikulum, karena kurikulum yang bagus kalau gurunya tidak baik tidak akan terimplementasi dengan tepat di kelas. Orang mengatakan guru adalah *“man behind the gun”* dalam pendidikan.

Apakah ada penelitian yang mendukung pendapat tersebut? Ternyata ada. Penelitian Barber dan Mourshed menyimpulkan prestasi siswa yang diajar oleh guru yang baik memperoleh hasil belajar 53% lebih tinggi dibanding temannya yang diajar oleh guru yang kurang baik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hattie menemukan bahwa proses pembelajaran berkontribusi 51% terhadap hasil belajar siswa dan dari 51% tersebut 30% diantaranya merupakan kinerja guru, 7% kontribusi sekolah, 7% kontribusi orang tua dan 7% kontribusi teman. Jika kita hanya memperhitungkan proses pembelajaran dan menegaskan faktor bawaan siswa, maka guru berkontribusi 58,8% terhadap hasil belajar siswa. Jauh lebih besar dibanding sekolah, orangtua dan teman main siswa.

Apakah di Indonesia ada penelitian tentang itu? Ternyata ada juga. Penelitian Pujiastuti, Widodo dan Raharjo dan menemukan peran guru 54,5% dari prestasi muridnya. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) pernah menganalisis data-data per komponen dalam instrumen akreditasi sekolah yang diterapkan dalam akreditasi sekolah/madrasah tahun 2021 dan menemukan bahwa mutu guru berpengaruh langsung sebesar 0,28 terhadap hasil belajar siswa dan berpengaruh tidak langsung 0,66 melalui komponen proses pembelajaran. Jadi hasil penelitian tersebut menguatkan pengalaman sehari-hari kita.

Apakah pengaruh mutu guru terhadap hasil belajar siswa dan hubungan antar komponen akreditasi yang ditemukan oleh BAN S/M tersebut didukung oleh teori pendidikan? Ternyata benar. Aboe Dohuo yang menulis buku berjudul *School Based Management* menjelaskan bahwa hasil belajar siswa sangat tergantung dari inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sedangkan guru dapat melakukan inovasi jika memiliki

kemampuan baik dan iklim kerja di sekolah memberikan peluang untuk berinovasi.

Mungkin data atau hasil pengamatan itulah yang membuat Kaisar Jepang menanyakan berapa jumlah guru yang masih ada dan bukan berapa tentara yang masih ada, setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Mungkin saja Sang Kaisar memikirkan untuk membangun kembali negara pasca kalah perang adalah dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan untuk itu yang diperlukan adalah guru untuk melakukan proses pendidikan yang bermutu. Seperti pernah dinyatakan oleh McKinsey mutu pendidikan tidak akan pernah melampaui mutu gurunya (*the quality of education can never exceed the quality of its teachers*). Bahkan Lee Kuan Yew, perdana Menteri pertama Singapore, di awal pendirian negara tersebut sangat mengidolakan peran guru dengan mengatakan “pada akhirnya kemajuan suatu negara itu tergantung kepada warga negaranya, dan pada akhirnya mutu warga negara itu tergantung kepada gurunya” (*for finally, just as a country is as good as its citizens, so its citizens are finally only as good as their teacher*).

Apakah ketika era digital, dimana segala informasi dapat diperoleh dengan mudah di dunia maya, peran guru masih tetap penting? Saya pernah menulis buku dengan judul “Semua Dihandle Google, Tugas Sekolah Apa?”, yang kemudian membuat saya disalahkan oleh beberapa teman karena mengira saya berpendapat di era informasi profesi guru tidak diperlukan lagi. Pada hal melalui tulisan tersebut saya bermaksud memberi “warning” kepada guru bahwa perannya berubah drastis di era informasi. Peran guru tetap penting, tetapi bukan lagi sebagai sumber informasi, karena informasi dapat diperoleh dimanamana. Perannya menjadi pemandu siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, mengolah atau menganalisis

informasi tersebut menjadi pengetahuan dan kemudian menjadi dasar mengambil keputusan dan atau memecahkan masalah.

Jika peran guru sangat penting, maka guru seharusnya memiliki kompetensi bagus dan bekerja dengan baik. Pertanyaannya apa kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru. Secara sederhana guru harus menguasai dua kompetensi dasar yaitu menguasai materi yang diajarkan (*what to teach*) dan bagaimana mengajarkannya (*how to teach*). Terkait dengan materi ajar, guru tidak hanya menguasai materi yang diajarkan tetapi juga “di atasnya” sebagai materi payung yang diperlukan untuk menjelaskan materi ajar dan memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah siswa harus tidak hanya memahami materi ajar, tetapi juga harus tahu bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa bumi dan bulan tetap beredar pada lintasannya hanya dapat dijelaskan dengan memadukan konsep gravitasi dan gaya sentrifugal-sentripetal. Beberapa ahli menyebutkan materi payung dengan istilah *advance materials*.

Apakah seseorang yang menguasai materi ajar otomatis dapat menjadi guru yang baik? Tidak. Ada orang yang pandai tetapi tidak dapat menjelaskan dengan mudah difahami oleh orang lain. Guru juga harus punya kompetensi bagaimana mengajarkan materi tersebut, sesuai dengan karakterik siswa, sarana pembelajaran yang tersedia. Siswa hanya akan belajar maksimal jika situasi pembelajaran menyenangkan dan merangsang untuk belajar. Dalam bahasa sederhana guru harus menguasai konsep pembelajaran secara utuh, yang mencakup: (1) tujuan pembelajaran, khususnya apa yang harus dikuasai siswa, (2) bagaimana karakteristik siswa, termasuk gaya belajar dan modal awal yang dimiliki mereka, dan (3) berbagai metoda pembelajaran untuk meramu materi/kompetensi yang dikuasai dan karakteristik siswanya. Karena materi ajar terus berubah

akibat perkembangan ilmu dan teknologi, karakteristik siswa juga berkembang, maka guru harus menjadi pembelajar sepanjang masa, harus sebagai *longlife learner*. Prof. Malik Fajar, mantan Mendikbud, pernah mengatakan guru yang berhenti belajar seharusnya juga berhenti mengajar.

Apakah ada standar kompetensi yang ditetapkan oleh suatu negara atau oleh asosiasi profesi? Ternyata ada. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial dan (4) kompetensi profesional. Dari berbagai diskusi ternyata yang dimaksud kompetensi profesional adalah penguasaan materi ajar, sedangkan kompetensi sosial adalah yang terkait bekal untuk berinteraksi dengan orang lain, baik itu siswa, kolega dan *stake holder* pendidikan lainnya.

Negara lain yang memiliki standar kompetensi guru yang konon banyak dijadikan bahan banding adalah Australia, yang mengelompokkan kompetensi guru menjadi tiga yaitu:

- 1) *professional knowledge*, yang mencakup (a) *know students and how they learn refer to the standard at each career stage*, dan (b) *know the content and how to teach it*;
- 2) *professional practice* yang mencakup: (a) *plan for and implement effective teaching and learning*, (b) *create and maintain supportive and safe learning enviroment*, dan (c) *assess, provide feedback and report on student learning*, serta
- 3) *professional engagement* yang mencakup (a) *engage in professional learning*, dan (b) *engange professionally with colleagues parents/carers and the community*.

Jika dicermati dengan baik, sebenarnya kompetensi yang digunakan oleh Australia dan Indonesia sangat mirip. Bedanya terletak cara menyusunnya. Australia menyusun kompetensi guru

berdasarkan fungsinya, sedangkan Indonesia menyusun berdasarkan potensi untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Singapore memiliki standar kompetensi guru yang menarik untuk dicermati. Di samping harus menguasai materi ajar yang di Singapore disebut *subject matter and goals*, karakteristik siswa yang disebut *student and learning*, bagaimana cara mengajar yang disebut *teaching*, guru di Singapore harus menguasai filosofi dari kurikulum. Tampaknya Singapore memposisikan guru sebagai profesi pembentuk anak bangsa sehingga harus memahami filosofi kemana pendidikan harus diarahkan, dalam rangka membangun negara Singapore. Mungkin itu terkait dengan ungkapan Lee Kuan Yew yang telah disebutkan terdahulu. Jadi profesi guru diyakini sebagai pembentuk watak dan mutu bangsa. Seperti disebutkan terdahulu, Lee Kuan Yew memahami guru bukan sekedar pengajar, tetapi sebagai pendidik anak bangsa Singapore.

Sebagai sebuah organisasi regional, ternyata Asean juga mengeluarkan standar kompetensi guru yang mencakup 4 aspek, yaitu: (1) *know and understand what to teach*, (2) *help students learn*, (3) *engage the community*, dan (4) *become a better teacher everyday*. Aspek ke-empat tampaknya dimaksudkan untuk memastikan guru terus belajar memperbaiki diri dan meningkatkan kinerjanya atau yang biasa disebut dengan *continuous professional development* (CPD). Rasanya pesan tersebut cocok dengan prinsip bahwa “orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dibanding kemarin, jika hari ini hanya sama dengan kemarin termasuk orang yang merugi”. Orang Jepang menyebut konsep tersebut dengan Kaizen.

Jika dikaitkan bahwa tugas guru bukan sekedar mengajar tetapi mendidik, bukan sekedar memandu siswa memahami materi ajar, tetapi mengembangkan potensi siswa agar

mendapatkan kehidupan yang terbaik dan bahkan dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka kompetensi guru yang disebutkan di atas belum lengkap. Seharusnya guru juga harus memahami filsafat dasar pendidikan atau yang di Singapore disebut memahami filosofi kurikulum. Dalam konteks Indonesia, hal itu dapat dikaitkan dengan tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi guru di Indonesia harus faham bahwa mereka bekerja dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

Lantas bagaimana mendidik calon guru agar memiliki kompetensi yang diharapkan? Indonesia ternyata memiliki sejarah pendidikan guru yang sangat panjang. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan guru bernama *Kweekschool* yang menurut beberapa sumber, pertama kali berdiri di Ambon pada tahun 1819. Pada awal kemerdekaan Pemerintah Indonesia mendirikan KPKPKG ((Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kuajiban Belajar) yang kemudian ditingkatkan menjadi SGB (Sekolah Guru B) setingkat SMP untuk menghasilkan guru SD. Pada perkembangannya SGB ditingkatkan menjadi SGA (Sekolah Guru A) setingkat SMA. Untuk guru SMP dilaksanakan melalui Program B-I dan untuk guru SMA dilaksanakan melalui Program B-II. Program itu yang kemungkinan menjelma menjadi PGSLTP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama) setingkat Diploma-1 dan PGSLTA (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas) setingkat Diploma-3.

Ada masa dimana SGB dan SGA menjadi sekolah bergengsi dengan seleksi masuk sangat ketat. Konon Dr. (HC) Ir. Abdulkadir Baraja yang akhirnya menjadi dosen Teknik Elektro ITS tidak diterima ketika mendaftar ke SGA dan akhirnya masuk SMA favorit di Surabaya kemudian kuliah di ITS dan akhirnya menjadi dosen ITS. Jadi pada masa itu saringan masuk ke SGA leih ketat

dibanding masuk SMA favorit. Menurut Prof. IGN Wardani, dimasa itu pendidikan di SGA diasrama dengan pembinaan sangat baik. Oleh karena itu dapat difahami kalau lulusan SGA saat itu, kemudian menjadi tokoh pendidikan tingkat nasional, seperti Prof. Fuad Hasan (mantan Menteri Pendidikan), Prof. HAR Tilaar, Prof. Rakajoni dan beberapa lainnya.

Dalam perkembangannya pendidikan guru di Indonesia ditingkatkan dan guru untuk semua jenjang pendidikan harus lulusan sarjana (S1). Bahkan dengan berlakunya UU No. 14 Tahun 2005 yang lebih dikenal dengan UU Guru, setelah mendapatkan ijazah S1 calon guru harus menempuh Pendidikan Profesi yang disebut PPG (Pendidikan Profesi Guru). PPG merupakan pola baru, sehingga pada awalnya Indonesia melakukan eksperimen mencari bentuk yang tepat. Menurut catatan, ada enam jenis PPG yang dicoba dikembangkan, yaitu: (1) PPG PGSD Berbeasiswa dan Berasrama, (2) PPG Basic Science, (3) PPG Terintegrasi dengan Kewenangan Ganda, (4) PPG Kolaboratif, (5) PPG-SM3T, dan (6) PPG Bersubsidi.

Sampai sekarang belum tahu pola mana yang akan diterapkan secara masif. Tampaknya masih dicari pola yang diyakini dapat merekrut calon yang pandai dan berbakat menjadi guru, pelaksanaan pendidikannya baik, dan dapat mendorong lulusan mau bertugas di daerah kekurangan guru yang biasanya tergolong daerah pedesaan atau bahkan terpencil. Sebagaimana diketahui sampai saat ini, Program Pendidikan Guru Jenjang S1 (S1 Kependidikan) belum mampu menarik minta lulusan SLTA yang terbaik dan bahkan lulusan S1 Kependidikan yang baik, seringkali juga tidak mau bertugas di daerah terpencil. Pada hal salah satu problem guru di Indonesia adalah distribusi yang tidak merata, di daerah perkotaan kelebihan guru sementara di daerah terpencil sangat kekurangan.

Pada tahun 2010an ketika tunjangan profesi guru mulai berjalan dan masyarakat mengetahui guru berpenghasilan bagus karena di samping gaji juga mendapat tunjangan profesi yang sangat besar, minat lulusan SLTA masuk ke S1 Kependidikan meningkat dengan tajam, sehingga beberapa pihak berharap seleksinya menjadi ketat, dan akhirnya S1 Kependidikan mendapatkan calon guru dengan kualitas tinggi. Sayangnya fenomena itu direspons oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan menambah jumlah mahasiswa baru, bahkan bermunculan LPTK baru. Akibatnya mutu mahasiswa S1 Kependidikan tidak berubah signifikan.

PPG-SM3T yang diawali dengan Program SM3T (Sarjana Mengajar di Daerah Tertinggal, Terluar dan Terpencil (3T)), dengan harapan lulusannya tertarik mengajar disana, ternyata juga kurang sukses. Sukses memberi bekal mahasiswa untuk kreatif mengatasi masalah kekurangan sarana, tetapi tidak sukses untuk menarik mereka mengajar di daerah terpencil. Ketika kepada lulusannya ditawarkan Program GGD (Guru Garis Depan, guru yang bertugas di daerah 3T) ternyata tidak banyak tertarik dengan alasan sudah mendapatkan pekerjaan. PPG PGSD Berbeasiswa dan Berasrama yang dilengkapi dengan Surat Penjanjian antara mahasiswa dengan Pemerintah Daerah pengirim juga kurang sukses. Ketika ada seleksi PNS Guru, ternyata lulusannya harus mendaftar sebagaimana calon yang lain. Harapan agar PPG dapat menggunakan pola seperti IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) dimana sejak kuliah, mahasiswa sudah menjadi calon ASN sehingga begitu lulus otomatis diangkat menjadi ASN juga belum dapat terlaksana.

Bagaimana pendidikan calon guru di negara lain? Di Singapore pendidikan calon guru dianggap sangat bergengsi, karena guru difahami bukanlah pekerjaan biasa tetapi sebuah profesi. Oleh karena itu yang dapat mendaftar ke NIE (National

Institute of Education) hanya lulusan *junior college* (setingkat SMA) yang tergolong sepertiga terbaik. Itupun belum tentu diterima, karena setelah mendaftar mereka harus melalui berbagai tahapan seleksi. Namun begitu diterima sebagai mahasiswa, mereka menerima beasiswa sebesar 60% dari gaji guru pertama. Pada hal gaji guru di Singapore sangat baik, setingkat dengan profesi lain misalnya insinyur dan akuntan. Oleh karena itu wajar jika Singapore dapat merekrut calon guru yang pandai dan berbakat.

Pola pendidikan di NIE menerapkan apa mereka sebut dengan V3SK, yaitu integrasi nilai-nilai (*value*), keterampilan (*skills*) dan pengetahuan (*knowledge*). Pelaksanaan V3SK menekankan kemampuan bernalar dan berefleksi. Sejak awal mahasiswa sudah diajak mengenali sekolah dengan berbagai masalah yang dihadapi, termasuk melakukan telaah berbagai hasil penelitian. Itu dilakukan karena NIE berharap mampu menghasilkan lulusan sebagai *critical thinker and adaptive teachers*. Apalagi setelah menjadi guru, mereka mendapatkan program pembinaan berkelanjutan.

Di Finlandia profesi guru sangat bergengsi sejajar dengan insinyur, dokter, akuntan dan profesi lainnya. Oleh karena itu minat anak muda untuk menjadi guru sangat tinggi. Rasio pendaftar dan yang diterima di pendidikan guru rata-rata 10 : 1, artinya hanya 1 diantara sepuluh pendaftar yang diterima. Pendidikan guru di Finlandia setara S2 dan menekankan pada kemampuan riset, khususnya yang terkait dengan pembelajaran. Oleh karena itu dapat difahami jika para guru di Finlandia dapat melakukan CPD (*continuous professional development*) dengan baik, setelah mereka bekerja. Kurikulum yang dirancang dengan model spiral, mengintegrasikan teori dan praktik membuat mahasiswa sejak awal terlatih melakukan refleksi terhadap apa yang dipelajari.

Mahasiswa calon guru di Finlandia menghabiskan sekitar sepertiga waktu kuliahnya di sekolah. Mereka menempuh tiga tahap praktik (semacam PLP dan PPL), yaitu *basic practice*, *advance practice* dan *final practice*. Pada *basic practice* mahasiswa melakukan observasi, menganalisis data hasil observasi dan membuat laporan akademik. Pada *advance practice* mahasiswa merancang pembelajaran dan melaksanakannya dibawah bimbingan mentornya. Pada *final practice* mahasiswa mengajar secara mandiri untuk beberapa matapelajaran.

Bagaimana pendidikan guru di Amerika Serikat? Pada dasarnya sangat desentralistik, sehingga setiap universitas mengembangkan kurikulum masing-masing. Namun CAEP (*Council of Accreditation for Educator Preparation*) menerbitkan Standar Pendidikan Guru, yang terdiri dari lima butir, yaitu: (1) *content and pedagogical knowledge*, (2) *clinical partnership and practice*; (3) *candidate quality, recruitment, and selectivity*; (4) *program impact*, dan (5) *provider quality assurance and continuous improvement*. Pada setiap butir diatur bagaimana agar setiap universitas dapat memenuhi standarnya. Jadi universitas dapat mengatur model pendidikannya, tetapi harus memenuhi standar tersebut. Apalagi nantinya program pendidikan guru akan diakreditasi oleh CAEP.

Mengingat pentingnya guru dan sentralnya pendidikan guru, penyiapan calon guru harus dilakukan secara terencana dan komprehensif. Program S1 Kependidikan tidak hanya mendidik calon guru karena dapat memasuki profesi lain, namun PPG jelas-jelas menyiapkan calon guru. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa PPG merupakan “benteng terakhir” dalam penyiapan calon guru. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam merancang PPG. *Pertama*, PPG harus dapat menyuplai kekurangan guru dengan jumlah dan jenis yang cocok. Artinya, jumlah mahasiswa PPG disesuaikan dengan kekurangan guru, baik

jumlah, jenis maupun lokasi sekolah tempat mereka nantinya bertugas. Dengan memiliki data tentang jumlah guru per daerah disertai dengan usianya, perhitungan kebutuhan guru baru dapat dilakukan dengan mudah. Agar penempatan ke sekolah kekurangan guru dapat dilakukan dengan baik, maka pola ikatan dinas perlu menjadi kebijakan nasional. Jika IPDN, Akademi TNI dan Kepolisian dapat menerapkan pola itu, semestinya PPG juga dapat menggunakan. Apalagi PPG hanya 1 tahun. Bahkan di era SGB dan SGA Indonesia juga pernah melaksanakan dan berhasil dengan baik. Lokasi LPTK penyelenggara PPG perlu terdistribusi dengan merata, sehingga calon mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia dapat dengan mudah menempuhnya.

Kedua, pendidikan guru harus dapat menghasilkan guru baru yang berkualitas. Sesuai dengan prinsip *garbage in garbage out*, maka mendapatkan input (mahasiswa baru) yang baik untuk PPG merupakan syarat penting. Dari pengalaman, pola ikatan dinas dapat menarik anak muda yang pandai dan segera memerlukan pekerjaan. Disamping kecakapan akademik, guru memerlukan kemampuan khusus. Oleh karena itu diperlukan tes khusus untuk calon mahasiswa PPG.

Proses pendidikan di PPG harus mendapat perhatian sungguh-sungguh. Setelah ada PPG, berarti kurikulum di S1 harus fokus kepada aspek akademik, yaitu penguasaan teori/konsep pendidikan yang nanti implementasinya dilaksanakan di PPG. Untuk itu diperlukan desain “kurikulum” baru yang sinkron antara S1 Kependidikan dan PPG. Di S1, aspek praktik digunakan untuk mendukung penguasaan teori, sedang di PPG sebaliknya aspek teori digunakan untuk mendukung praktik. Jadi pengalaman di sekolah selama S1 harus menjadi bagian dari matakuliah kependidikan dan bukan sekedar mengubah PPL menjadi PLP. Sedangkan di PPG, sebagian besar waktu atau bahkan seluruh waktu belajar efektif mahasiswa berada di sekolah untuk

mempraktikkan konsep mendidik, berdasar teori yang telah dipelajari di S1.

Kemampuan dan kebiasaan melakukan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari seharusnya titik incar. Dalam konteks ini refleksi mengandung dua makna. Refleksi dapat dikaitkan dengan *mind map*, artinya dalam memahami suatu konsep harus dapat dihubungkan dengan konsep lain atau fenomena di lapangan, sehingga membentuk *mind map*, serta harus dapat dikaitkan antara teori dengan praktiknya. Refleksi juga terkait dengan kemampuan dan kebiasaan melihat plus-minus apa yang telah kita lakukan. Kedua makna refleksi tersebut harus ditumbuhkan selama PPG, bahkan juga di S1 Kependidikan. Untuk itu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) harus dimaknai sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan bukan untuk bahan menyusun karya ilmiah. Oleh karena itu seharusnya PTK dilaksanakan secara terus menerus, karena problem dalam pembelajaran akan selalu terjadi.

Ketiga, pengajar di LPTK khususnya pengampu matakuliah kependidikan, seharusnya memiliki pengalaman mengajar di sekolah, sehingga dapat memberi contoh nyata bagaimana mengajar yang baik. Jangan sampai dapat menjelaskan bagaimana cara mengajar yang baik, tetapi tidak dapat mempraktikkan apa yang dijelaskan. Seorang kawan senior sering berkelajar, “orang yang dapat menjelaskan cara menyambal, belum tentu dapat menyambal dan menghasilkan sambal yang enak”. Jadi dosen LPTK tidak boleh hanya pandai berteori, tetapi juga harus pada melaksanakan teori tersebut.

Di NIE, para dosen bidang kependidikan biasanya mantan guru sehingga memiliki pengalaman yang cukup di sekolah. Demikian pula di negara yang memiliki lembaga pendidikan guru dengan kualitas bagus. Di Finlandia para dosen bidang kependidikan melakukan penelitian tentang pembelajaran di

sekolah dan biasanya bekerjasama dengan guru. Karena dosen kependidikan pada LTPK di Indonesia pada umumnya tidak memiliki pengalaman mengajar yang cukup di sekolah, maka perlu ada program agar mereka datang dan belajar tentang permasalahan nyata di sekolah. PTK bersama para guru akan menjadi wahana yang sangat baik untuk menambah pengalaman di sekolah.

Ke-empat, sistem penjaminan mutu PPG harus dibangun, baik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Harus diakui bahwa SPMI pada perguruan tinggi pada umumnya belum berjalan dengan baik. Karena PPG merupakan gerbang terakhir untuk memasuki profesi guru, maka SPMI harus dapat memastikan bahwa proses pendidikan di PPG berjalan baik, sehingga lulusannya sesuai dengan standar kompetensi yang telah disepakati secara nasional.

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang menangani SPME, yaitu Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) untuk memastikan bahwa kualitas lulusan PPG sesuai dengan standar nasional dan LAM Kependidikan (LAMDIK) untuk memastikan bahwa proses pendidikan di PPG berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Dua lembaga tersebut perlu dijaga kemandiriannya dan dipastikan menerapkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang baik. UKMPPG dan LAMDIK seharusnya mengajak *stake holders* dan bahkan melakukan *benchmarking* ke lembaga sejenis di negara lain dalam menentukan standar, tetapi harus mandiri dalam menerapkan standar tersebut. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa proses pendidikan di PPG dan lulusannya memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Seperti halnya profesi lain, guru juga harus mengembangkan kemampuannya ketika bekerja. Itulah hakekat *continuous*

professional development (CPD). Pemerintah, lembaga pengelola pendidikan, dan organisasi profesi seharusnya memfasilitasi, agar guru dapat melaksanakan CPD. Di Singapore pemerintah memfasilitasi guru agar dapat melakukan CPD selama 100 jam atau setara dengan 12 hari dalam satu tahun. Pada umumnya mereka mengikuti CPD di *National Institute of Education (NIE)* atau *Academy of Singapore Teacher (AST)*. Di Finlandia pemerintah menyediakan anggaran agar setiap guru dapat melakukan CPD selama 7 hari kerja setiap tahun. Di samping itu Finlandia mendorong guru untuk menempuh studi lanjut di S2 dan S3. Jepang melakukan hal yang sama dan bahkan pada awal bekerja, guru wajib mengikuti CPD selama 25 hari kerja.

Bagaimana di Indonesia? Dengan jumlah guru sebanyak 3,3 juta dan tersebar di berbagai pelosok tanah air, tampaknya Indonesia belum dapat melaksanakan CPD seperti Singapore, Finlandia dan Jepang. Bahkan menurut beberapa sumber, ada guru yang sudah bertugas lebih dari sepuluh tahun tetapi belum pernah ikut pelatihan atau bentuk lain untuk CPD. Keadaan tersebut dapat difahami, karena jumlah guru sangat besar dan tersebar di berbagai pelosok tanah air, sementara anggaran untuk pembinaan guru sangat terbatas. Pemerintah daerah yang secara hukum sebagai “pemilik guru” tampaknya juga tidak memiliki anggaran dan tenaga yang cukup untuk memfasilitasi guru melaksanakan CPD. Oleh karena itu perlu dicari alternatif lainnya.

Di Taiwan setiap dosen di LPTK (biasa disebut Normal University), diwajibkan membina beberapa guru. Di Singapore hubungan antara NIE dengan sekolah sangat erat, karena NIE merupakan penghasil guru sekaligus pelaksana CPD bagi guru. Di Indonesia terdapat banyak LPTK. Jika dosen di LPTK diwajibkan membina guru sebagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), misalnya mendampingi guru melaksanakan PTK, maka CPD guru dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Dosen juga

dapat melaksanakan penelitian (PTK) ketika menerima tugas PkM, sehingga pendampingan tersebut dapat menjadi wahana penelitian juga. Di samping LPTK, organisasi profesi guru juga perlu didorong untuk mendampingi anggotanya dalam mengembangkan diri.

Apakah guru tidak dapat melakukan CPD secara mandiri? Pada dasarnya bisa. Ketika menempuh S1 dan PPG, calon guru telah belajar melaksanakan PTK, sehingga para guru dapat melaksanakan secara mandiri. Menurut beberapa referensi, PTK berasal dari CCR (*Classroom Centered Research*/Penelitian Berpusat di Kelas) yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kalau PTK dikembalikan ke tujuan asalnya tersebut dan itu dilakukan secara berkelanjutan (terus-menerus) akan menjadi wahana CPD yang baik. Apalagi jika kemudian catatan melaksanakan CPD tersebut kemudian dibahas bersama guru lain dalam KKG/MGMP. Dengan demikian para guru dapat bertukar pengalaman, saling asah-asih-asuh. Seperti metafora, beras digiling menjadi putih, akiabt butiran beras saling bergesekan. Di KKG/MGMP guru dapat saling “bergesekan” (saling belajar), sehingga semakin pandai.

Guru seharusnya juga memiliki peta karier yang jelas, sehingga sejak awal mereka dapat menyiapkan diri. Sampai saat ini peta karier guru seakan-akan hanya menjadi kepala sekolah dan jabatan pimpinan lainnya. Di Singapore terdapat tiga jalur karier guru, yaitu *teaching track*, *leadership track* dan *specialist*. Guru yang menempuh *teaching track* akan mengembangkan kemampuannya dalam pembelajaran untuk mencapai jenjang tertinggi sebagai *principal master teacher*. Mereka yang menempuh *leadership track* akan mengembangkan kemampuan manajerial untuk mencapai jenjang *cluster superintendent*. Mereka yang menempuh *specialist track* akan mengembangkan kemampuannya dalam bidang tertentu, seperti kurikulum,

asesmen dan sebagainya untuk mencapai jenjang *chief specialist*. Indonesia perlu memiliki jalur-jalur karier bagi guru, sehingga mereka dapat merintisnya sejak awal dan tidak semua bersaing menjadi kepala sekolah.

Era informasi yang ditopang oleh teknologi digital menjadi tantangan bagi pendidikan. Saya pernah menulis buku berjudul "Semua Dihandle Google, Tugas Sekolah Apa?". Buku tersebut membuat saya dimarahi teman-teman guru, karena dikira saya mengatakan guru tidak diperlukan di era informasi. Pada hal, maksud saya guru harus siap berubah peran. Jika semula guru sebagai sumber utama informasi, ke depan informasi dapat dengan mudah diperoleh di dunia maya. Tugas guru akan berubah menjadi pemandu bagaimana mencari informasi dan menganalisisnya untuk memahami suatu fenomena dan atau memecahkan masalah.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan seringkali *discontinue*, sehingga apa yang dipelajari siswa saat sekolah sudah menjadi usang dan diganti teknologi baru saat yang bersangkutan lulus dan bekerja. Maka pendidikan harus menyiapkan siswa sebagai pebelajar yang mandiri dalam menghadapi teknologi baru. Mereka harus dapat menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki sebagai dasar mempelajari hal-hal baru. Pendidikan berbasis kompetensi (*competence based*) sudah harus digeser menjadi berbasis kapasitas (*capacity based*), sehingga kemampuan berpikir kritis-analisis harus ditumbuhkan sejak awal. Bersamaan dengan itu *intellectual curiosity* (kepenasaran intelektual) harus ditumbuhkan. Dengan demikian pola pembelajaran lebih menekankan kepada *student driven and life long learning* dan *problem based and collaborative learning*. Pembelajaran berbasis kehidupan (*life based learning*) akan menjadi pola pembelajaran yang cocok ke depan.

Karena *life based learning* menekankan pada kapasitas untuk berkembang, sementara guru harus juga membimbing siswa menguasai materi ajar, maka tantangan guru adalah bagaimana mengintergrasikan kedua hal tersebut. Guru Fisika harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis analitis ketika siswa mempelajari topik Gerak Melingkar dan bahkan memecahkan problem dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan topik tersebut.

Ketika ilmu dan teknologi berkembang dengan cepat akan memunculkan konsep-konsep baru yang harus juga dipelajari oleh siswa, sementara waktu belajar siswa tetap. Oleh karena itu guru dituntut dapat memilih materi ajar yang esensial dengan keyakinan dengan menguasai materi tersebut, siswa akan dapat mempelajari materi lainnya. Lebih dari itu, guru dituntut untuk menumbuhkembangkan kemampuan *life long learning* yang disertai rasa ingin tahu yang tinggi dan daya juang dalam melaksanakannya.

GURU: SIAPAKAH DIA?

Guru merupakan profesi yang hampir semua orang mengenalnya. Mungkin juga merupakan profesi yang banyak dibicarakan. Ketika pandemi covid-19 merajalela dan semua siswa harus belajar dari rumah, guru sangat sering disebut dan bahkan kemudian dibahas di berbagai forum. Pada awalnya dipertanyakan apakah guru siap mengajar “secara daring” karena belum memiliki pengalaman dan bahkan mungkin belum mengenal apa itu belajar secara daring. Mereka yang pernah kuliah di UT (Universitas Terbuka) juga belum belajar secara daring, karena pada awalnya UT menggunakan modul tercetak.



Ketika harus membimbing anaknya belajar dari rumah, banyak orang menyadari ternyata mengajar anak-anak itu tidak mudah dan memerlukan kesabaran tinggi. Kembali guru banyak dibicarakan. Sebagian memuji guru yang selama ini sabar

membimbing anaknya, tetapi juga banyak yang menggerutu karena menganggap dengan belajar dari rumah orangtua harus menggantikan pekerjaan guru dan guru dianggap “menganggur”, karena siswanya tidak datang ke sekolah. Bahkan muncul usulan agar SPP dihapus atau dipotong 50% karena anak tidak datang ke sekolah dan orangtua yang lebih banyak membimbing anaknya saat belajar.

Ketika itu muncul kembali ungkapan bijak yang lama tidak terdengar, bahwa sebenarnya “orangtua adalah guru pertama dan utama bagi anaknya”. Mengapa demikian? Karena orangtua-lah yang paling awal mendidik anaknya, yaitu ketika masih kecil. Juga orangtua-lah yang memiliki waktu paling banyak berinteraksi dengan anaknya. Bukankah anak hanya berada di sekolah sekitar 7 - 8 jam sehari dan selebihnya di rumah. Bahkan sebenarnya orangtua-lah yang paling “bertanggungjawab” terhadap pendidikan anaknya.

Ketika guru sedang banyak dibicarakan saya ingin mengisi blok pribadi (*muchlassamani.blogspot.com*) dengan topik yang terkait dengan masalah guru dan kaget ketika kata “guru” tidak ada garis merah di bawahnya. Pada hal, biasanya program MS Word selalu memberi garis merah di bawah kata yang tidak dikenal dalam bahasa Inggris atau ejaannya salah. Bukankah “guru” itu istilah dalam bahasa Indonesia? Mengapa tidak ada garis merah di bawahnya? Apakah sekarang kosa kata “guru” sudah menjadi istilah baru dalam bahasa Inggris?

Pertanyaan itu menggantung beberapa lama di pikiran dan mendorong saya untuk mencari penjelasannya. Istri saya yang kebetulan seorang guru bahasa Inggris tidak juga dapat memberikan penjelasan yang tuntas. Seperti saya, dia juga yakin bahwa dalam bahasa Inggris tidak dikenal istilah guru. Tidak puas dengan jawaban itu, saya membuka kamus Inggris-Indonesia

susunan John M. Echols dan Hassan Shadily yang kebetulan menggeletak di atas meja kerja di rumah. Kata "guru" ternyata juga tidak tercantum dalam daftar istilah pada kelompok huruf "G". Belum puas dengan itu, saya mencari ke kamus lain yang saya anggap lebih lengkap, yaitu The Advanced Learner's Dictionary of Current English, susunan Horby, Gatenby dan Wakefield terbitan Oxford University Press. Ternyata kata "guru" juga tidak tercantum dalam kamus tersebut. Jadi pertanyaan itu tetap menggantung karena belum dapat penjelasan.



Kejutan tentang istilah guru tambah keras setelah saya membaca baliho yang memberi predikat pakar marketing Hermawan Kertajaya dengan sebutan "the guru". Saya yakin perusahaan sekelas Mark Plus yang memasang baliho itu tidak ngawur. Artinya penggunaan predikat "the guru" kepada

Hermawan Kertajaya pasti sudah berdasarkan aturan bahasa yang betul. Apakah kata "guru" sudah menjadi istilah dalam bahasa Inggris, sehingga diberi kata sandang "the".

Pertanyaan itu mulai terjawab ketika seorang kawan, Prof Bambang Yulianto, seorang guru besar di Unesa, mengatakan suatu kata/istilah akan diadopsi oleh bahasa tertentu, jika di bahasa itu belum ada istilah yang sama atau begitu penting atau populernya istilah itu di negara asalnya, sehingga bahasa lain terdorong ikut menggunakan. Jika di dalam bahasa Inggris sudah ada kata "teacher" dan kemudian kata "guru" diadopsi berarti guru dianggap sangat penting. Jika demikian, apakah demikian pentingnya istilah "guru" sehingga diadopsi menjadi istilah dalam bahasa Inggris. Bukankah sudah ada istilah dalam bahasa Inggris untuk guru, yaitu "teacher".

Pertanyaan tentang istilah "guru" itu baru terjawab, saat saya bertemu dengan Dr. Jaka Priyana, seorang dosen bahasa Inggris dari Universitas Negeri Yogyakarta, lulusan dari Australia. Beliau menjelaskan bahwa kata "guru" berasal dari bahasa Sansekerta yang diadopsi oleh bahasa Indonesia. Pak Jaka menjelaskan di negara yang memiliki akar bahasa Sansekerta, misalnya India dan Indonesia tentu mengenal istilah guru. Jadi internasionalisasi istilah guru sangat mungkin dari bahasa Sansekerta.

Muncul pertanyaan berikutnya, apakah profesi guru demikian penting sehingga bahasa Inggris mengadopsi istilah guru dari bahasa Sansekerta. Saya jadi teringat ungkapan almarhum Prof. Daoed Yoesoef (mantan Mendikbud) bahwa pada dasarnya profesi di dunia itu hanya dua, yaitu "guru" dan "bukan guru". Artinya profesi sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan almarhum Lee Kuan Yew, pendiri dan mantan Perdana Menteri Singapore mengatakan *"for finally, just as a country is as*

good as its citizens, so its citizens are finally, only as good as their teachers” (Liu, 2022: 4).

Ketika mencoba membuka wikipedia, saya menemukan definisi sebagai berikut ini. *”A guru (Sanskrit: गुरु) is one who is regarded as having great knowledge, wisdom, and authority in a certain area, and who uses it to guide others (teacher)”*. Pengertian tersebut sangat penting untuk memahami siapa guru sebenarnya. Bertolak dari definisi tersebut, menurut saya ada empat kata kunci dalam definisi guru, yaitu: (1) memiliki pengetahuan, (2) memiliki kearifan, (3) memiliki kewenangan, dan (4) menggunakannya untuk membimbing orang lain. Dengan demikian, seorang guru tidak cukup hanya menguasai materi ajar dan memahami bagaimana cara mengajar, tetapi juga harus memiliki kearifan dan membimbing orang lain dengan sepenuh hati.

Aspek pembimbingan dan kearifan ini yang belum banyak dibahas orang pada saat mendiskusikan bekal bagi seorang guru. Membimbing itu berbeda dengan mengajar. Dalam mengajar penyampaian materi lebih kental, sedangkan membimbing lebih menekankan mendampingi dan membantu siswa agar menguasai materi atau kompetensi yang sedang dipelajari. Dalam membimbing aktivitas siswa yang menjadi fokus perhatian, sedangkan peran guru adalah mendampingi dan membantunya.

Walaupun siswa harus aktif, bukan berarti gurunya pasif atau bahkan nganggur. Justru dalam pembimbingan guru harus lebih aktif karena memperhatikan aktivitas setiap siswa, sehingga tahu apa yang harus dibantu agar hasilnya maksimal. Bukan sekedar tahu apa yang harus dibantu, tetapi benar-benar membantunya.

Membantu bukanlah mengambil oper kegiatan, sehingga siswa menjadi penonton. Membantu secara edukatif adalah

mengupayakan agar siswa dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan mencapai kemampuan yang ingin dipelajari. Mengacu model anak belajar naik sepeda, biarlah si anak yang naik sepeda dan memegang stirnya, sementara tugas guru adalah memegang sepeda agar tidak ambruk. Secara bertahap pegangan dilepas sehingga pada saatnya si anak dapat naik sepeda sendiri tanpa dipegangi. Pola pembelajaran seperti itu disebut oleh Trilling dan Fadel (2009) sebagai *learning bicycle model*.

Pada proses pembimbingan faktor kearifan menjadi sangat penting. Kembali pada contoh anak belajar sepeda, kapan waktunya kita memegang erat-erat sepeda, kapan mulai sedikit-sedikit melepas dan kapan benar-benar melepas, memerlukan kearifan. Kearifan akan membuat guru sabar dan telaten dalam membimbing siswa. Dengan kearifan, guru dapat memahami jika ada siswa yang dengan cepat menguasai materi ajar atau mencapai kompetensi yang dipelajari, sebaliknya juga memahami jika ada siswa yang lama sekali untuk menguasai materi ajar atau kompetensi yang dipelajari.

Dalam budaya Jawa dikenal pemaknaan “*guru iku digugu lan ditiru*”, artinya guru itu orang yang dipercaya dan diteladani.



Untuk dapat dipercaya, seseorang harus berilmu atau berpengetahuan luas, jujur dan tidak pernah bohong, sehingga apa yang dikatakan dipercaya orang. Selain itu juga harus pandai, sehingga apa yang dikatakan tidak salah. Juga tidak boleh sembarangan ngomong, sehingga omongannya dipercaya. Ungkapan Jawa “*ojo waton ngomong nanging ngomong sing*

maton” yang artinya jangan asal berbicara, tetapi berbicara yang bermakna”, tepat diterapkan oleh guru. Jika dihubungkan dengan dunia pewayangan, mungkin guru besar itu mirip ”begawan” atau ”resi” yang memiliki kesaktian dan kearifan yang luar biasa, sehingga menjadi tempat kesatria berguru dan tempat para raja berkonsultasi.

Untuk dapat diteladani, maka perilaku guru harus baik dan sesuai dengan norma-norma kehidupan. Kita tentu tidak mau meneladani orang yang perilakunya kurang baik. Biasanya orangtua mengatakan kepada anaknya “mbok kamu mencontoh orang itu yang.....”. Pasti keterangan di belakang kata “yang” menunjukkan perilaku orang baik. Misalnya: “mbok kalau kerja yang sungguh-sungguh seperti Pak Kadir”; “mbok kalau menyeterika baju yang rapi seperti Mbak Yani”. Dalam konteks itu, pastilah Pak Kadir adalah pekerja keras dan hasil seterikaan Mbak Yani pasti sangat rapi.

Dalam bahasa Inggris ada ungkapan “*an ordinary teacher tells, a good teacher shows, a great teacher inspires*”. Jadi kalau ada guru hanya menyuruh-nyuruh siswanya itu hanyalah guru biasa. Guru yang baik haruslah memberi contoh dan menjadi teladan bagaimana berperilaku, termasuk belajar terus menerus. Dan jika ingin menjadi guru yang hebat, seseorang harus mampu menginspirasi murid-muridnya. Menginspirasi artinya membuat siswanya terdorong untuk melakukan sesuatu yang mungkin tanpa disuruh siapapun. Menginspirasi artinya membuat siswanya bermimpi untuk mengerjakan dan mencapai sesuatu prestasi tertentu. Tentu untuk mampu menjadi inspirator, sang guru harus punya prestasi yang menonjol dan berperilaku yang mulia, sehingga dihormati oleh masyarakat. Konon Pak Habibie banyak menginspirasi anak muda yang menyenangi iptek, karena beliau ahli teknologi dirgantara kelas dunia. Konon temuannya (patennya) digunakan oleh pabrik pesawat di negara-negara maju.

Prof. Dr. Mohamad Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga seorang guru besar Teknik Elektro ITS dan memiliki perhatian sangat besar pada profesi guru menyebutkan bahwa guru itu dihargai karena tiga faktor, yaitu ilmu yang dimiliki, perilaku dan cita-citanya. Maksudnya guru harus memiliki ilmu yang cukup sebagai bekal mengajar dan memberi pencerahan bagi muridnya. Sulit dibayangkan bagaimana seorang guru dapat mengajar dengan baik jika yang bersangkutan tidak memiliki bekal ilmu tentang apa yang diajarkan dan ilmu tentang bagaimana mengajarkannya.

Ketika saya tanya apa yang dimaksud dengan “cita-cita”, Pak Nuh mengatakan bahwa guru harus bercita-cita “*ndadekno*” (menjadikan) siswanya. Maksudnya bercita-cita agar siswanya menjadi orang sukses di masa depan. Dengan demikian, ketika bekerja guru bukan sekedar melaksanakan kewajiban yang diberikan sekolah atau sekedar melaksanakan kurikulum, tetapi berusaha agar siswa memiliki kompetensi atau kemampuan yang diyakini menjadi modal penting untuk kesuksesan hidupnya di masa depan. Dalam ungkapan Pak Nuh, guru yang betulan kalau selesai sholat akan mendo’akan muridnya agar kelak menjadi “orang yang sukses”.

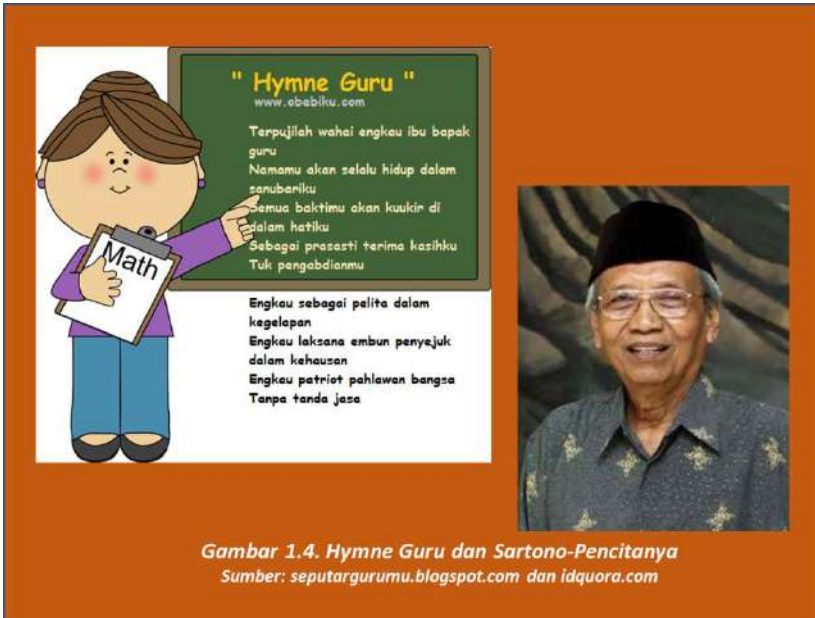
Guru: Profesi Mulia Tetapi Merana?

Uraian di atas memberikan kesan bahwa guru adalah profesi mulia. Betapa tidak, guru adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas, memiliki kerarifan tinggi dan mendedikasikan hidupnya untuk mendidik orang lain. Guru harus berperilaku baik sehingga dapat menjadi teladan bagi murid dan bahkan orang di sekitarnya. Mungkin itu yang mengilhami Pak Sartono, pembuat hymne guru yang menyebut guru bagai pelita dalam kegelapan, laksana penyejuk dalam kehausan dan menganggap guru sebagai patriot pahlawan bangsa. Oleh karena itu guru disebut sebagai manusia terpuji yang akan selalu diingat jasanya oleh banyak

orang. Bahkan dalam filosofi kehidupan yang terkait dengan urutan orang-orang yang harus dihormati, guru berada tepat di bawah orangtua.

Namun dalam kenyataan, penghargaan masyarakat terhadap guru tidak seindah dalam hymne guru tersebut. Tahun 1992 atau 1993 (lupa pastinya) saya pernah melakukan survai kecil terhadap siswa SMA di Surabaya untuk menanyakan kemana mereka akan melanjutkan, termasuk program studi (saat itu lebih lazim disebut jurusan) yang diinginkan. Dari 100 kuesioner yang dibagi, kembali 53 buah dan tidak ada satupun yang ingin masuk IKIP. Sebagai lembaga pendidikan calon guru tampaknya IKIP “dilihat sebelah mata” oleh siswa SMA karena profesi guru dianggap tidak bergengsi. Mungkin itu yang dijadikan argumen mengapa saat itu dalam seleksi masuk perguruan tinggi, IKIP dipisahkan dalam kelompok tersendiri disebut Proyek Perintis IV dan dipisah dari universitas lainnya seperti Unair, ITS, Universitas Gajah Mada dan sebagainya. Mungkin jika dicampur takut tidak ada yang memilih.

Minimalnya minat masuk IKIP menyebabkan persaingan masuk menjadi longgar sehingga mutu mahasiswa calon guru juga kurang baik. Apakah itu juga berpengaruh terhadap gengsi guru? Karena masyarakat tahu seperti apa kepandaian guru saat masih di SMA/SMK/MA? Berbeda dengan misalnya Fakultas Kedokteran yang persaingan masuknya sangat ketat, sehingga mahasiswa bangga ketika dapat diterima dan itu menyebabkan gengsi profesi dokter tinggi. Atau malah dibalik. Karena gengsi profesi dokter di masyarakat tinggi, maka banyak lulusan SMA ingin menjadi dokter. Sebaliknya karena gengsi profesi guru rendah, maka lulusan SMA enggan menjadi guru.



Karena rendahnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, konon banyak lulusan IKIP yang pandai tidak mau menjadi guru dan memilih bekerja di kantor atau perusahaan. Walaupun gajinya sama, mereka memilih bekerja di perusahaan karena lebih bergengsi. Oleh karena itu di masyarakat Surabaya (saat itu) ada joke “jika punya anak gadis dan nakal, diancam akan dinikahkan dengan guru”. Seakan-akan gengsi guru begitu rendah, sehingga anak gadis takut kalau dinikahkan dengan guru.

Apa yang menyebabkan gengsi guru begitu rendah di masyarakat? Apakah penghasilannya yang rendah? Bukankah jika sama-sama PNS gajinya sama? Atau karena guru tidak punya “penghasilan sampingan” sehingga walaupun gajinya sama, penghasilannya lebih kecil? Atau penampilan guru yang pada umumnya sederhana? Atau karena sebab lain, sampai sekarang belum ada penelitian yang menjelaskannya. Harus diakui bahwa penghasilan guru relatif rendah dibandingkan profesi lain yang bukan PNS. Guru PNS juga tidak memiliki tambahan penghasilan

di luar gaji, sebagaimana PNS di kantor pemerintahan lainnya. Memang penampilan guru pada umumnya sederhana dan tidak “sementereng” karyawan di kantor atau di perusahaan. Gedung sekolah pada umumnya juga lebih sederhana dibanding perkantoran atau perusahaan. Mungkin dengan penampilannya sederhana dan bekerja di gedung yang sederhana menyebabkan masyarakat menganggap guru kurang bergengsi.



Penampilan guru yang sederhana itulah yang mungkin menyebabkan istilah “guru oemar bakrie” yang sering digambarkan naik sepeda butut. Iwan Fals juga mendengarkan lagu oemar bakrie yang digambarkan naik sepeda kumbang di jalan yang berlubang. Walaupun sudah menghasilkan para menteri dan pejabat tinggi lainnya, nasibnya tidak berubah. Tetap saja berpenampilan sederhana dan berpenghasilan kecil.

Apakah sampai sekarang nasib guru seperti itu? Sepertinya sudah mengalami perubahan. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen, dan guru yang

bersertifikat mendapatkan tunjangan profesi, minat menjadi guru meningkat dengan indikator pendaftar masuk LPTK (nama baru IKIP) meningkat signifikan. Sayangnya dengan peningkatan pendaftar, banyak LPTK yang meningkatkan jumlah mahasiswanya dan muncul LPTK baru, sehingga jumlahnya meningkat tajam. Akibatnya persaingan masuk LPTK tetap tidak tinggi, sehingga harapan kualitas yang menjadi guru meningkat tidak tercapai.

Apakah predikat guru hanya untuk mereka yang mengajar di sekolah?

Penasaran dengan kata "guru", saya mencoba mengetik kata "guru" di Google, ternyata muncul banyak sekali istilah yang terkait dengan kata guru. Beberapa diantaranya guru sekolah (SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan sebagainya), guru besar, guru bangsa, tuan guru dan sebagainya. Sampai saat menulis naskah ini saya belum mendapat informasi mengapa karier puncak dosen disebut guru besar. Saat awal dosen diberi sebutan asisten ahli, kemudian lektor, kemudian lektor kepala dan terakhir guru besar. Mungkinkah sebutan guru besar itu terkait dengan karakteristik yang diharapkan dari yang menyandanginya? Artinya, guru besar harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam (sebagai terjemahan besar), memiliki kearifan yang tinggi, memiliki kemampuan membimbing yang sangat baik dan mencurahkan perhatiannya untuk membimbing mahasiswanya.

Jika guru SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan juga guru besar adalah sebuah profesi yang menghendaki mereka yang "berdiri di depan kelas", tampaknya guru bangsa dan tuan guru tidak demikian. Kedua istilah yang belakang itu disematkan kepada seseorang karena orang posisinya. Istilah "guru bangsa" sering digunakan oleh media cetak dan media elektronik kepada beberapa tokoh yang dianggap menjadi panutan masyarakat.

Orang yang oleh media sering disebut sebagai guru besar antara lain untuk almarhum Nurcholis Madjid dan almarhum Gus Dur.

Tentu masih banyak yang lain. Guru bangsa bukanlah guru yang kegiatannya mengajar di depan kelas dengan siswa bangsa-bangsa di dunia atau seluruh warga negara. Dapat diduga makna guru bangsa mengacu pada kemampuannya memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia, sehingga dapat membimbing bagaimana sebaiknya sebagai bangsa berperilaku.

Jika pemaknaan itu dikaitkan dengan pengertian guru yang dijelaskan oleh Andrea Hirata dalam novel *Laskar Pelangi*, berarti para guru bangsa adalah mereka yang memberikan pencerahan tentang nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kebangsaan serta sekaligus menjadi teladan bagi bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut pada kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Jadi proses pendidikan oleh guru bangsa dilakukan juga dapat dilakukan melalui tulisan.



*Gambar 1.6. Nurcholish Majid (alm) dan Gus Dur (alm)
oleh Media Sering Disebut sebagai Guru Bangsa*

Tuan guru adalah sebutan bagi tokoh agama di Lombok. Konon pada awalnya tuan guru disematkan kepada pengajar agama yang sudah haji, namun lambat laun tugas guru dimaknai dengan tokoh agama yang memiliki pengikut (santri) banyak. Jadi semacam kyai di pulau Jawa. Lazimnya tuan guru memiliki pesantren dengan santri banyak dan sekaligus menjadi tokoh masyarakat. Seorang kawan yang hobinya otak-atik istilah menafsirkan istilah "tuan guru" terdiri dari dua kata, yaitu "tuan" dan "guru". Jadi "tuan guru" dapat ditafsirkan sebagai "tuan yang guru" atau "guru yang tuan". Jadi tuan guru dapat dimaknai sebagai "guru agama yang ditokohkan".

Kita juga punya ungkapan yang menyatakan bahwa setiap pemimpin adalah guru bagi kelompok atau masyarakat yang dipimpinya. Maksudnya tentu bukan setiap pemimpin harus berdiri di depan kelas dan mereka yang dipimpin duduk dibangku layaknya anak sekolah, tetapi setiap pemimpin harus mampu memberi pencerahan sekaligus mengajari dan menjadi panutan bagi mereka yang dipimpinya. Dapat juga digunakan sebagai pijakan bahwa seseorang baru dapat disebut pemimpin (yang sesungguhnya) jika yang bersangkutan dapat memberi pencerahan, mengajari dan sekaligus dapat menjadi teladan bagi mereka yang dipimpinya. Dengan demikian peran guru harus menjadi salah satu tugas para pemimpin.

Dari contoh-contoh di atas dan mungkin banyak lainnya, kita dapat menyimpulkan bahwa istilah guru tidak hanya berlaku bagi "guru di sekolah" dan "guru yang berdiri di depan kelas", tetapi juga mereka yang menjalankan fungsi pendidikan baik kepada siswa di sekolah, madrasah, pondok pesantren maupun di masyarakat. Guru juga dapat mencakup siapa saja yang memiliki pengetahuan luas, kearifan dan kewenangan dan kemudian menggunakannya untuk membimbing orang lain.

Orang lain, dalam konteks tersebut dapat anaknya sendiri bagi orangtua, siswa/santri di sekolah/madrasah/pesantren bagi guru, ustad/ustazah, dan kyai, mahasiswa bagi dosen/guru besar, warga bangsa dan masyarakat luas bagi guru bangsa. Bahkan ada guru yang membimbing siswanya secara tidak pernah tatap muka, misalnya melalui buku-buku yang ditulis. Misalnya kita mengenal Stephen Covey yang menulis buku "7 Habits" yang mampu memandu jutaan orang di dunia, yang tidak pernah bertemu dengannya. Bung Karno, melalui tulisan dan ungkapan-ungkapannya diikuti oleh banyak orang yang tidak pernah tatap muka dengannya. WS Rendra, melalui syair dan puisinya menginspirasi seniman muda yang juga tidak pernah ketemu dengannya. Bukankah para Rosul dan Nabi mengajar umatnya melalui kitab suci dan haditsnya. Umatnya tidak pernah berjumpa dengan Rosul dan Nabi tersebut tetapi mengikutinya dengan sepenuh hati.

SEBERAPA PENTING PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN?

Seberapa pentingkah peran guru dalam proses pendidikan? Banyak orang yang mengatakan sangat penting, bahkan terpenting diantara komponen pendidikan lainnya. Argumen yang sering diajukan adalah guru itu *“the man behind the gun”* dalam proses pendidikan. Apapun kebijakan yang diambil, apapun kurikulum yang dirancang, apapun sarana yang dimiliki akhirnya guru yang melaksanakan dalam proses pembelajaran. Ketika ada pergantian kurikulum muncul komentar “kurikulum boleh berganti, tetapi kalau gurunya tidak faham tentang perubahan itu, proses belajar di kelas tidak akan berubah”. Oleh karena itu upaya memahami guru terhadap kurikulum baru harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Apakah argumen itu betul? Jawabannya sulit. Oleh karena itu, berikut ini saya ingin menggambarkan saja apa yang saya alami saat di SD, dahulu disebut SR (Sekolah Rakyat).

Saya bersekolah SD di kampung halaman. Namanya SDN Carat II berlokasi di desa Carat, sebuah desa kecil di tepi bulak (persawahan luas) sekitar 8 km arah barat kota Ponorogo. SD kami tidak punya gedung dan numpang di rumah Pak Kepala Desa. Rumahnya besar dan terdiri dari 3 buah rumah model joglo. Rumah belakang ditinggali beliau bersama keluarga, rumah tengah yang biasa disebut *omah kampung* dan rumah paling depan yang biasa disebut *omah pringgitan* digunakan untuk SDN Carat II. Dua bagian rumah itu disekat-sekat dengan gedeg (anyaman bambu), sehingga menjadi ruang-ruang kelas. Hanya 5 ruang kelas, sehingga siswa Kelas 1 dan Kelas 2 bergantian ruangan. Jam 7.00-10.00 digunakan untuk Kelas 1 dan jam 10.00-13.00 digunakan untuk Kelas 2.



Gambar 2.2. Sabak dan Grip, Alat Tulis Siswa SD Carat II Saat Itu
Sumber: guraru.org



Gambar 2.1. Main Kasti, Permainan Anak di SD Carat II
Sumber: twitter.com

Seingat saya, siswa tidak membayar SPP. Saya tidak tahu dari mana biaya untuk operasional sekolah maupun kegiatan lain. Mungkin juga operasional sekolah saat itu tidak memerlukan biaya besar, karena kegiatan sekolah sangat sederhana. Pelaksanaan pembeajaran di kelas dengan papa tulis warna hitam dengan kapur tulis. Kadang-kadang siswa diajak ke sawah atau tegalan untuk mengamati tanaman atau Binatang. Olahraga siswa hanya lari keliling jalan desa, senam, baris berbaris dan *kasti*. Untuk pemeliharaan “gedung sekolah” mungkin dibiayai desa, karena menggunakan rumah Pak Kepala Desa yang kaya.

Bagaimana proses belajar di SD waktu itu? Seingat saya, waktu Kelas 1 sampai Kelas 3 siswa ke sekolah hanya membawa *sabak*. *Sabak* itu mirip papan selebar buku tulis dengan ketebalan sekitar 2 mm, namun terbuat dari bahan mirip batu endapan. Sabak berwarna hitam dan dibingkai dengan kayu. Untuk menulis, digunakan *gerip*. Bentuknya seperti pensil dengan bahan yang mungkin sama dengan sabak tetapi lebih lunak. Kalau *gerip* dituliskan atau digoreskan ke *sabak*, bekasnya berwarna putih, mirip papan tulis yang ditulisi dengan kapur. Jadi fungsi *sabak* dan *gerip*, mirip papan tulis dengan kapur tulis.

Murid SD kelas 1 sampai Kelas 3, termasuk saya tidak punya buku. Jadi untuk menulis apapun ya menggunakan *sabak* itu. Pada

waktu pelajaran menggambar, juga digunakan *sabak* itu. Kalau ada PR (pekerjaan rumah) juga ditulis di *sabak*. Bagaimana kalau *sabak* penuh dengan tulisan, sementara kita ingin menuliskan sesuatu? Mau tidak mau, ya tulisan yang ada dihapus. Untuk menghapus biasanya dengan daun *suru* yang lazim digunakan untuk pagar di pedesaan. Dipilih daun *suru* yang sudah menguning, karena sudah tidak mengandung getah tetapi masih mengandung sedikit air. Jadi prinsipnya menghapus tulisan di *sabak* itu dengan air. Bahkan dalam keadaan terpaksa anak-anak menghapus dengan ludah.

Penghapusan dengan daun *suru* sebenarnya tidak dapat menghapus dengan tuntas. Masih ada bekas tulisan tipis, sehingga semakin lama *sabak* tampak tidak bersih. Kalau sudah begitu, *sabak* harus dicuci dan biasanya digosok dengan arang kayu. Saya kurang faham, apakah arang yang juga berwarna hitam itu dapat melapisi *sabak* sehingga bekas-bekas goresan gerip dapat hilang. Yang saya ingat, sehabis dicuci dengan digosok dengan arang kayu, *sabak* menjadi hitam dan tampak seperti baru.

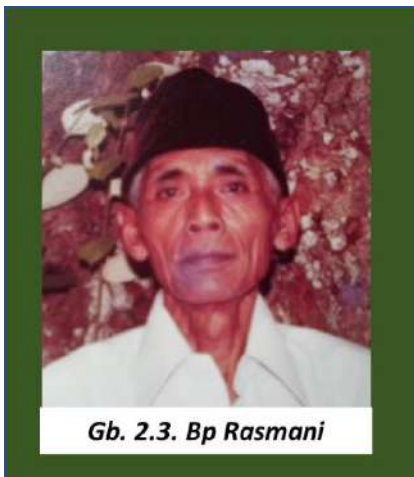
Di kelas 4 kami belajar menulis di buku tulis yang saat itu disebut buku *skrip*. Kami menulis dengan pensil yang kalau salah dihapus dengan karet penghapus yang saat itu disebut *setip*. Kalau tidak punya *setip*, kami menggunakan *karet gelang* yang diubet-ubetkan ke pensil. Baru di kelas 5 siswa belajar menulis dengan tinta. Waktu itu kami tidak mengenal fulpen apalagi ballpoint. Siswa belajar menulis dengan *kestal pen*, yaitu pena yang diberi tangkai. Tinta ditempatkan di wadah yang diletakkan di bangku. Ketika akan menulis, pena dicelupkan ke tinta dan baru setelah itu dituliskan di buku tulis. Namun sampai kelas 6 menulis dengan tinta hanya sebagai latihan, sedangkan untuk kegiatan sehari-hari menulis dengan pensil.

Sampai lulus SD kami tidak punya buku paket atau buku pelajaran seperti anak sekarang. Saat itu di kampung saya radio merupakan barang langka, tidak ada TV dan koran. Jadi bagi siswa SD saat itu, satu-satunya sumber informasi tentang ilmu pengetahuan (tentang pelajaran) ya dari guru. Sekali-sekali kami mencatat materi ajar. Yang sampai sekarang masih saya ingat adalah mencatat tentang Perang Diponegoro yang saat itu disebut pelajaran Pengetahuan Umum. Mungkin karena Pak Kirno, guru kelas 5 sangat pandai memperagakan Perang Diponegoro, sehingga saya terus ingat sampai sekarang.

Seingat saya, saat itu para siswa sangat semangat ketika sekolah. Kalau ada libur panjang, seringkali kami rindu sekolah, sehingga main ke sekolah. Biasanya kami main *kasti* atau memanjat pohon jambu air yang kebetulan ada di halaman sekolah. Siswa juga sangat hormat kepada guru dan bahkan saling berebut ingin mendapat perhatian guru. Kalau pagi, begitu guru tampak datang dengan naik sepeda para siswa menunggu di tempat “parkir” untuk membantu guru memarkir sepedanya. Kalau kebetulan mendapat giliran membersihkan ruang kelas, siswa dengan semangat datang lebih awal dan menyapu serta membersihkan bangku. Ketika papan tulis sudah penuh, siswa dengan senang hati bahkan berebut lebih dahulu untuk menggosok papan tulis. Kalau ditunjuk untuk mengerjakan soal di papan tulis, kami sangat bangga. Apalagi guru mengatakan “kamu betul atau kamu pandai”.

Bagaimana dengan kondisi sekolah yang sangat sederhana itu proses pendidikan berjalan baik? Mengapa siswa sangat bersemangat belajar di sekolah? Mengapa siswa sangat hormat kepada guru? **Apakah guru-guru SDN Carat II sangat hebat?** Apakah memang guru SD jaman itu sangat bagus? Jujur saya tidak tahu. Saya juga khawatir subyektif untuk memberikan penilaian, karena kebetulan saya pernah menjadi guru dan sekarang menjadi

pengajar di LPTK yang menghasilkan calon guru. Oleh karena itu, agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang jernih saya ingin menggambarkan para guru saya ketika di SD. Tentu gambaran yang saya ingat, karena ini bulanlah laporan penelitian kualitatif.



Gb. 2.3. Bp Rasmani

Saya ingin mendeskripsikan seperti apa sosok para guru di mata murid (khususnya saya) dan bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh para guru tersebut.

Waktu Kelas 1 SD guru saya bernama Pak Rasmani. Saya tidak tahu apa latar belakang pendidikan beliau, karena saat itupun beliau sudah *sepuh* (tua). Seingat saya rambutnya sudah memutih, disisir ke belakang dan biasanya memakai baju putih lengan panjang yang dimasukkan. Yang paling saya paling ingat kebiasaan beliau mengajak murid untuk "*sarapan sego wadang*" (sarapan nasi kemarin). Istilah itu yang beliau gunakan untuk mempelajari ulang apa yang kemarin dipelajari. Apa yang ditulis di papan tulis di akhir pelajaran diberi tanda silang 3 buah di bagian bawah sebagai tanda agar tidak dihapus. Besuk paginya beliau akan mengatakan "*bocah-bocah ayo sarapan sego wadang*" (anak-anak, mari sarapan nasi kemarin). Maksudnya mengulang apa yang dipelajari kemarin. Biasanya beliau juga menanyai beberapa murid untuk mengetahui apakah masih ingat yang diterangkan kemarin.

Guru Kelas 2 kami bernama Bu Soepinem yang merangkap Kepala Sekolah. Beliau orang hebat, karena sampai tahun 1981 sewaktu saya pulang kampung dan sowan ke rumah beliau,

ternyata beliau masih sebagai Kepala Sekolah, walaupun dipindah ke SD lain. Perawakannya kecil tetapi sangat tegas. Setiap minggu kuku siswa diperiksa dan jika lupa memotong dipukul dengan *tuding*, yaitu bilah bambu sebesar jari yang sehari-hari digunakan untuk menunjuk tulisan di papan tulis. Tentu memukulnya pelan dan kami tidak merasa kesakitan. Namun kami malu karena dipukul oleh Bu Soep.

Suara beliau cukup keras. Saya ingat sewaktu sudah kelas 3, saya sering mendengar suara Bu Soep mengajar di kelas sebelah yaitu Kelas 2 yang hanya dibatasi dengan gedeg. Tulisan beliau sangat bagus dan sering sekali mengajak murid belajar di luar kelas. Yang saya ingat betul, ketika kami murid-murid diajak membuat petak-petak dengan tali dari serabut kelapa. Tali yang biasanya untuk membuat keset, lembaran untuk membersihkan kaki waktu mau masuk rumah. Melalui petak-petakan itu kami belajar perkalian. Misalnya 3×4 , beliau mengajak murid menghitung 3 petak ke satu arah dan 4 petak ke arah yang lain, terus ditandai petak-petak yang termasuk dalam segi panjang tadi.



Gambar 2.4. Pembelajaran di SD Carat II Saat itu
Sumber: gurutamu.blogspot.com

Setelah itu dihitung berapa jumlah petaknya. Dihasilkan 12 petak. Bagi saya pengertian itu sangat membekas sebagai figurasi 3 X 4.

Guru saya kelas 3 seorang ibu yang biasa dipanggil Bu Prih. Saya tidak tahu nama lengkap beliau. Perawakannya tinggi semampai dan berkulit kuning. Bu Prih sangat sabar dan pandai sekali memotivasi anak-anak. Seingat saya jika ada murid yang tidak masuk, mesti besoknya ditanya kenapa tidak masuk. Apa sakit? Murid yang tidak masuk selalu diminta belajar ke teman lainnya. Beliau selalu bercerita tentang orang-orang yang berhasil dan diakhiri dengan kalimat "*kowe mbesuk dadiyo koyo Pak.....*". (kamu besok jadilah seperti Pak...). Salah satu contoh yang sering disebut adalah teman Bu Prih yang konon menjadi insinyur. Bu Prih menceritakan bagaimana gigihnya orang itu waktu sekolah dan konon harus hidup *ngirit* (berhemat) ketika kuliah di Bandung karena orangtuanya bukankah orang kaya.

Di kelas 3 kami baru mulai belajar bahasa Indonesia, karena selama di kelas 1 dan kelas 2 kami belajar dengan bahasa pengantar bahasa Jawa (bahasa daerah). Bu Prih sangat sabar mengajar kami berbahasa Indonesia. Saya ingat betul bagaimana beliau memberikan kiat belajar bahasa Indonesia. Setiap siang mau pulang, Bu Prih menambahkan kosa kata bahasa Indonesia yang harus dihafal dan besok paginya secara acak murid ditunjuk untuk menunjukkan hafalannya. Kosa kata baru yang dikenalkan selalu digandengkan menjadi satu kalimat dengan kota kata yang sudah kami pelajari. Yang paling saya ingat, ketika beliau mengenalkan kota kata rumput, dengan menyodorkan kalimat "kambing makan rumput". Mungkin beliau faham kalau kami, anak-anak desa umumnya punya kambing sehingga mudah mengingat bahasa Jawa "*wedus mangan suket*" diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi "kambing makan rumput".

Guru kelas 4 masih muda, namanya Pak Sardjono. Orangnya pendiam dan bukan orang asli kampung sekitar desa saya. Beliau *mondok* (kost) di salah satu rumah tetangga sekolah. Di kelas 4



kami mulai belajar menulis di buku tulis dengan pensil. Kami juga mulai membuat catatan. Pak Sardjono selalu memeriksa buku catatan murid dan membetulkan jika ada yang keliru. Yang paling saya ingat, catatan saya pernah dikoreksi ketika menulis kata “bengkarong” yang semestinya “bengkarung”.

Pak Sardjono sangat teliti dan mungkin istilah sekarang termasuk seorang *perfeksionist*.

Misalnya kami, murid-murid tidak boleh menggunakan kota kata “bisa” tetapi harus menggunakan kosa kata “dapat”. Waktu itu kota kata “bisa” belum diterima sebagai kota kata bahasa Indonesia dan dianggap itu kota kata bahasa Jawa. Kota kata “sapi” dianggap keliru dan kami harus menggunakan kosa kata “lembu”. Kosa kata “kadal” juga dianggap salah, sehingga kami murid-murid harus menggunakan kota kata “bengkarung”. Kalau menuliskan angka terkait uang, tidak boleh lupa memberi titik untuk ribuan, misalnya dua belas ribu rupiah harus ditulis dengan tepat “Rp 12.000,-”.

Saya tidak ingat bagaimana bentuk ulangan saat di Kelas IV. Yang saya ingat, Pak Sardjono mengecek pemahaman kami tentang apa yang kami pelajari kemarin atau minggu lalu. Saya ingat tidak dapat menjawab ketika ditanya padi berakar tunggang atau serabut. Karena saya tidak dapat menjawab, Pak Sardjono

minta saya mencabut batang padi di sawah sebelah sekolah kemudian melihat dan menyimpulkan apakah padi berakar tunggang atau serabut. Mungkin di istilah sekarang Pak Sardjono menerapkan pembelajaran konstruktivis. Tidak mau menunjukkan kesalahan saya dan menunjukkan apa yang benar, tetapi meminta saya melihat benda sesungguhnya dan membiarkan saya membuat simpulan sendiri.

Guru kelas 5 dan 6 saya pak Soekirno yaitu guru yang saya undang waktu saya dikukuhkan menjadi guru besar. Beliau guru baru dan masih sangat muda. Konon saat itu beliau baru lulus SGB atau SGA saya lupa. Beliau juga pendatang dan mondok di desa sebelah desa kami. Pak Kir sangat pandai dan kalau menerangkan sangat jelas. Kami juga dibiasakan mengerjakan bermacam-macam tugas. Mungkin kalau sekarang disebut tugas proyek (*project based learning*). Beberapa tahun kemudian, Pak Kirno menikah dengan sahabat sekelas saya di SMP, sehingga saya menjadi sahabat keluarga beliau.

Waktu itu siswa kelas VI SD harus mengikuti ujian negara semacam ujian nasional (UN). Yang diujikan hanya 3 matapelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Berhitung dan Pengetahuan Umum. Karena SD saya termasuk SD “desa” sepertinya belum dipercaya menyelenggarakan dan kami harus mengikuti ujian negara di SD Sumoroto I, sekolah yang terletak di kota Kawedanan. Waktu itu di pemerintahan di bawah Kabupaten di atas Kecamatan ada Kawedanan. Kami, siswa-siswa, berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki diantar oleh Pak Kirno. Sepanjang jalan beliau terus meyakinkan kami (para siswa) pasti dapat mengerjakan soal ujian negara. Beliau saja memuji “*kowe kabeh pinter-pinter*” (kaliyan semua pandai-pandai).

Bagaimana Pak Kirno menyiapkan siswa Kelas VI menghadapi UN? Saya tidak ingat. Yang saya ingat saat itu tidak

dikenal soal pilihan ganda, sehingga semua soal berbentuk uraian. Yang juga saya ingat Pak Kir punya pensil khusus untuk memeriksa ulangan siswa, yang saat itu disebut dengan "*potelot tinta*". Satu ujung pensil itu berwarna merah dan ujung satunya berwarna biru. Nah, jika pekerjaan kita betul akan diberi tanda "*Ieres*" berwarna biru, dan jika salah diberi tanda silang berwarna merah.

Rupanya Pak Kirno ingin siswanya harus dapat membetulkan kesalahan yang dilakukan saat ulangan. Oleh karena itu, setelah hasil ulangan dibagi siswa diminta membetulkan bagian yang salah. Tentu sebelum itu Pak Kirno menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh para siswa, tetapi sepertinya beliau ingin memastikan semua siswa benar-benar faham bagaimana jawaban yang benar, sehingga meminta siswa membetulkan kesalahannya. Saya pernah mengalami pembetulan yang saya lakukan ternyata masih salah lagi, sehingga ketika diperiksa Pak Kirno saya harus membetulkan untuk kedua kalinya. Beliau juga menjelaskan dimana letak kesalahan saya, tetapi tidak menunjukkan bagaimana yang betul. Sepertinya beliau ingin saya menemukan sendiri bagaimana jawaban yang betul. Mungkin itu penerapan prinsip bahwa pemberian umpan balik terhadap tugas yang dikerjakan murid memberikan dampak signifikan terhadap mutu pendidikan.

Jika pada tahun 2002 Singapore mencanangkan slogan "*teaching less learning more*" (Gopinathan, 2015) dan sekarang Pemerintah Indonesia mencanangkan fokus pembelajaran adalah siswa, tampaknya guru saya di SD, khususnya Pak Sardjono dan Pak Sukirno sudah melaksanakannya. Yang penting bukan bagaimana guru mengajar, tetapi apakah siswanya belajar. Jika pembelajaran seperti itu terlaksana dengan baik, sinyalemen Prichett dan Banerji (2013) "*schooling but not learning*" tidak akan terjadi.

Jika Indonesia pernah punya program CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), CTL (*Contextual Teaching and Learning*), PMRI (Pendidikan Matematika Realistik Indonesia), Pembelajaran Menyenangkan dan sebagainya yang arahnya mendorong agar siswa senang dan mudah memahami materi ajar, sepertinya tanpa diberi nama tertentu guru saya sudah menerapkannya. Apakah beliau-beliau faham teorinya atau terdorong niat untuk membantu siswa belajar dengan baik, jujur saya tidak tahu. Yang jelas itu sudah diterapkan dan seingat saya saat itu sekolah menyenangkan. Bahkan kalau libur panjang banyak siswa datang ke sekolah karena rindu.

Apakah ingatan saya terhadap para guru sewaktu SD itu tepat? Apakah bukan ingatan anak kecil yang kagum dengan gurunya? Pada hal sekarang banyak orang mengeluhkan tentang kekurangprofesionalan guru. Apakah memang guru zaman dahulu lebih baik dibanding guru zaman sekarang? Apakah guru SD saya sudah mengenal teori konstruktivis, *project based learning* dan teori pembelajaran modern lainnya? Jujur saya tidak tahu. Untuk mendapat gambaran yang jernih, saya ingin berbagi obrolan saya dengan Pak Kirno sekian tahun lalu.

Menjelang dikukuhkan menjadi guru besar, saya berkunjung ke rumah Pak Soekirno, guru kelas V dan VI SD dahulu. Saat itu Pak Kir sudah menjadi Pengawas. Saya ingin mengundang beliau untuk hadir pada pengukuhan saya sebagai guru besar. Saya memilih beliau karena akrab dengan keluarga beliau. Apalagi Pak Kirno menikah dengan sahabat saya di SMP, yang saat masih sekolah biasa saya panggil Titik. Tentu setelah menikah saya memanggilnya Bu Kirno atau kadang-kadang Bu Titik.

Saya ditemani kerabat yang dahulu juga murid Pak Kirno saat di SD dan kemudian juga menjadi guru SD. Saat ngobrol saya bertanya apa beda pembelajaran jaman dahulu ketika sarana

serba terbatas dan jaman sekarang ketika siswa memegang buku paket lengkap dengan LKS (Lembar Kegiatan Siswa). Jawaban Pak Kirno sungguh mangagetkan. Dahulu materi ajar sangat sederhana dan murid sungguh-sungguh (serius dalam belajar), sekarang materi ajar sangat banyak sementara siswa tidak serius dalam belajar. Kerabat yang ikut hadir menyetujui pendapat Pak Kirno dan bahkan menambahkan enak mengajar jaman dahulu. Walaupun sarana sangat terbatas, tetapi mudah mengelola kelas. Siswa dapat fokus belajar karena materi ajar tidak terlalu banyak dan gangguan luar juga tidak terlalu banyak.

Saya bertanya, apakah guru jaman dahulu lebih baik? Bukankah Pak Kirno dan kerabat saya itu mengalami mengajar di era lama maupun sekarang? Sayangnya Pak Kirno maupun kerabat saya tidak dapat menjelaskan. Pak Kirno hanya mengatakan, guru-guru sekarang sepertinya tidak menghayati profesinya sebagai guru. Guru sekarang seperti sekedar memenuhi kewajiban mengajar tetapi tidak memperhatikan apakah siswa sudah faham yang dipelajari atau belum.

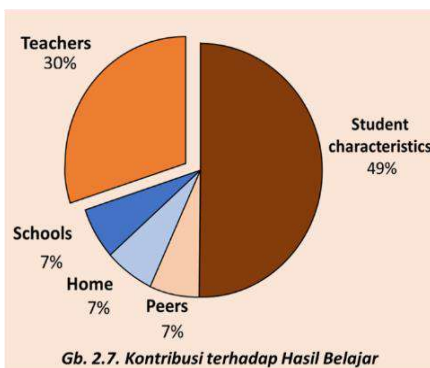
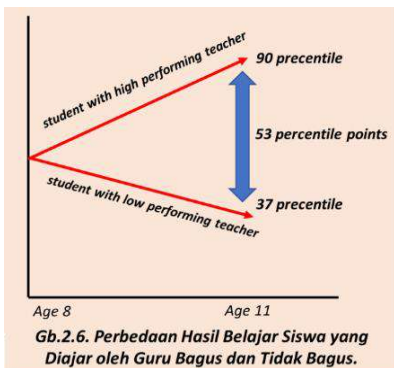
Ungkapan Pak Kirno mengindikasikan bahwa sekarang fungsi membimbing agar siswa mencapai kompetensi yang diharapkan tidak menjadi penekanan. Jadi tidak cocok dengan prinsip *teaching less learning more* dari Singapore dan fokus pembelajaran adalah pada siswa. Apalagi mendo'akan muridnya., seperti guru ideal yang sering digambarkan oleh Pak Nuh (mantan Mendikbud). Mungkin begitu yang sebenarnya ingin diungkap oleh Pak Kirno, namun dengan kalimat tersamar khas orang Jawa. Sebenarnya saya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih banyak, mengapa guru sekarang kurang menghayati keprofesionalannya. Apakah mutu guru saat ini kurang baik dibanding guru-guru se angkatan beliau atau ada faktor lain yang di luar itu yang mempengaruhinya. Namun sepertinya Pak Kirno enggan menjelaskan. Tampaknya budaya Jawa membuat beliau

enggannya menjawab karena terkait dengan dirinya, takut dianggap menonjolkan diri.

Uraian tentang kondisi SD saya tersebut menunjukkan bahwa sarana-prasana yang dimiliki sangat terbatas. Namun menurut ingatan saya, proses pembelajaran berjalan sangat baik dan siswa sangat bersemangat mengikuti pelajaran. Saya juga merasa dalam banyak hal, khususnya cara belajar dan pengetahuan alam sekitar yang justru sudah saya dapat ketika di SD. Oleh karena itu, saya menduga itu terjadi karena guru-guru saya waktu di SD sangat baik.

Adakah Hasil Studi tentang Pentingnya Peran Guru dalam Pendidikan?

Apakah ada penelitian tentang pengaruh kualitas guru terhadap hasil belajar muridnya? Di Amerika Serikat ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Barber & Mourshed (2007) melihat perbedaan prestasi anak yang diajar oleh guru yang bagus dan guru yang jelek. Gambar 2.6. menunjukkan dua kelompok siswa SD usia sekitar 8 tahun, satu kelompok diajar oleh guru yang baik dan satu kelompok diajar oleh guru yang tidak baik. Setelah 3 tahun kedua kelompok siswa dites dengan tes terstandar. Hasilnya sungguh mencengangkan seperti tampak pada gambar. Siswa yang diajar oleh guru yang baik, skor kemampuan naik dari 50 menjadi 90, sedangkan yang diajar oleh guru yang tidak bagus skor kemampuannya turun dari 50 menjadi 37. Berdasarkan data itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kontribusi guru terhadap prestasi mahasiswa sebesar 53%.



Penelitian lain dilakukan oleh John Hattie (2009) dengan melakukan meta analisis terhadap 800 penelitian dan menemukan hasil belajar dipengaruhi beberapa faktor, yaitu karakteristik bawaan siswa sebesar 49%, orang tua 7%, teman 7%, sekolah 7% dan guru 30%. Karakteristik siswa difahami sebagai faktor “bawaan” yang tidak dapat diberi perlakuan. Berarti yang hasil belajar siswa yang merupakan kontribusi proses pembelajaran dimanapun terjadi hanya 51% dan yang 30% diantaranya merupakan kontribusi guru. Jika digunakan analogi penelitian Barber dan Mourshed, maka kontribusi guru terhadap hasil belajar siswa sama dengan $30/51 = 58,8\%$.

Apakah apa penelitian sejenis di Indonesia? Ternyata ada, dilakukan oleh Pujiastuti, Raharjo dan Widodo (2012) di Kalimantan Selatan dan menemukan pengaruh faktor guru terhadap hasil belajar siswa sebesar 54,5%. Tiga penelitian yang dilakukan oleh tiga orang atau tim di negara yang berbeda tersebut, ternyata menghasilkan temuan yang hampir sama, yaitu pengaruh kinerja guru dalam mengajar berkontribusi antara 53% - 58,8% terhadap hasil belajar siswa. Berarti lebih separuh dari prestasi murid merupakan kontribusi guru, sedangkan fasilitas di sekolah, teman dan orangtua hanya memberi kontribusi masing-masing 7 %.

Jika menggunakan data di atas, maka wajar jika negara yang mutu pendidikannya bagus juga memiliki guru yang bagus, pola pendidikan guru yang baik, pola pembinaan guru yang komprehensif dan penghargaan masyarakat terhadap profesi guru juga bagus. Oleh karena itu Auguste, Hancock dan Martha (2008) menyebutkan bahwa mutu pendidikan di suatu negara tidak akan pernah melampaui mutu gurunya.

Bagaimana kinerja guru dapat berpengaruh begitu besar terhadap hasil belajar siswa? Gb 2.8 merupakan hasil analisis terhadap sekolah/madrasah Tahun 2021, dengan menggunakan IASP 2020 (Abdul Malik dkk, 2021). Hasil analisis tersebut menunjukkan semua butir memiliki kontribusi signifikan terhadap variabel induknya, maka analisis SEM (*structural equation method*) tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel.

Dari gambar tersebut tampak bahwa 64% hasil belajar siswa (mutu lulusan) dapat dijelaskan oleh kualitas proses pembelajaran yang diikuti siswa. Sementara 66% mutu proses pembelajaran yang terjadi di kelas dapat dijelaskan oleh kinerja guru. Sedangkan 92% kinerja guru dapat dijelaskan oleh manajemen sekolah (bagian ini akan dibahas tersendiri). Dengan kata lain, kinerja guru mempengaruhi mutu proses pembelajaran dan selanjutnya mutu proses pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa.

Apakah hubungan variabel-variabel tersebut didukung teori yang sudah ada? Abu Dohuo (1999) menjelaskan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh praktik inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Guru dapat melakukan inovasi pembelajaran jika memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, diberi kewenangan untuk melakukan dan ada penghargaan bagi mereka jika melakukan inovasi tersebut. Termasuk di dalamnya

kefahaman guru tentang arah pengembangan sekolah dan sebagainya. Intinya jika situasi organisasi sekolah mendukung guru untuk melakukan inovasi. Nah, faktor-faktor tersebut ternyata dipengaruhi oleh manajemen sekolah yang dipraktikkan oleh pimpinan sekolah (lihat gambar 2.9).

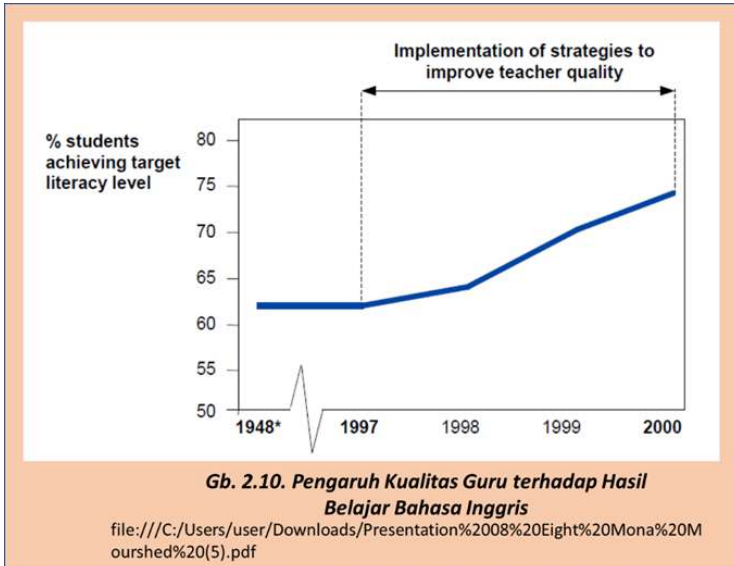
Jadi, memang guru menjadi faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi kinerja guru sangat dipengaruhi oleh manajemen sekolah yang diterapkan oleh Kepala Sekolah.



Jika dicermati hubungan antar variabel yang ditunjukkan pada teori Dohuo (1999) sangat mirip dengan hasil analisis SEM terhadap data uji coba akreditasi sekolah yang dilakukan oleh BAN S/M pada tahun 2020. Jika guru memiliki kemampuan yang baik dan situasi sekolah menumbuhkan motivasi kerja yang baik, mereka akan melakukan pembelajaran yang inovatif sehingga akan berdampak kepada hasil belajar siswa.

Bahwa perbaikan mutu guru akan meningkatkan hasil belajar juga ditunjukkan oleh data dari Department for Education and Skill UK tentang hasil belajar Bahasa Inggris antara 1948 sampai 2000, seperti tampak pada Gambar 2.10 (McKinsey, 2008).

Gambar tersebut menunjukkan tidak pada perubahan hasil belajar Bahasa Inggris selama 50 tahun, yaitu dari 1948 sampai dengan 1997. Namun setelah dilakukan perbaikan strategi peningkatan mutu guru selama 3 tahun (1998-2000), hasilnya meningkat secara signifikan. Itulah sebabnya banya ahli mengatakan bahwa mutu hasil belajar tidak akan dapat melampaui mutu guru.



Dari beberapa referensi yang dikutip di atas, menunjukkan bahwa guru merupakan faktor sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Mungkin itu yang menyebabkan di saat kalah dalam Peran Dunia Kedua, yang ditanyakan Kaisar Jepang bukanlah berapa tentara yang masih dimiliki Jepang, tetapi justru berapa guru yang masih dimiliki Jepang. Mungkin Kaisar Jepang memikirkan untuk membangun kembali negara yang baru saja kalah perang, yang diperlukan adalah pendidikan yang baik untuk menghasilkan sumberdaya yang bermutu dan untuk itu diperlukan guru yang baik. Mirip ungkapan Lee Kuan Yew (Liu 2022), pada akhirnya seperti apa suatu negara akan tergantung warga negaranya dan seperti apa warga negara itu tergantung seperti apa gurunya. Tampaknya pemimpin dua negara tersebut,

Jepang dan Singapore yakin bahwa guru adalah faktor kunci untuk meningkatkan kemajuan bangsanya. Jika memiliki guru yang cukup dan bermutu baik maka pendidikan akan menghasilkan lulusan yang bermutu dan pada gilirannya akan menjadi penopang kemajuan negaranya. Dan nyatanya kedua negara tersebut menjadi negara maju di Asia.

Masih Pentingkah Peran Guru Saat Sumber Informasi Melimpah?

Bulan Maret 2013 saya membuat tulisan pendek, kemudian saya muat di blog pribadi (*muchlassamani.blogspot.com*) dengan judul “Segala Info Ada di Google”. Oleh Mas Adriono, mantan wartawan, naskah tersebut kemudian digabung dengan tulisan lain dan dijadikan buku dengan judul “**Semua Dihandel Google, Tugas Sekolah Apa?**” Buku yang sempat cetak ulang tersebut membuat saya “dihujat” oleh banyak orang, dianggap melecehkan profesi guru karena dapat digantikan oleh Google. Saya diundang dan “diadili” di beberapa forum dan harus menjelaskan apa yang dimaksud dalam tulisan tersebut.

Tulisan tersebut sebenarnya tidak bermaksud melecehkan profesi guru, tetapi mengingatkan guru, juga orangtua dan masyarakat bahwa di dunia maya (internet) termuat berbagai informasi. Dan sebagai mesin pencari (*searching engine*), google memfasilitasi penggunaanya untuk dapat membaca, melihat dan atau mendengarkan informasi tersebut secara gratis. Karena google dapat memandu orang untuk mencari berbagai informasi, orang Surabaya dan khususnya anak muda sering mengatakan “mbah google weruh sembarang”, artinya kurang lebih “google tahu segala macam informasi”. Menantu saya yang kebetulan “bule”, jika ditanya juga sering menjawab “*let me googling*”, maksudnya saya cari di google. Memang, dengan memasukkan kata kunci tertentu, google akan menampilkan berbagai sumber informasi yang terkait, baik yang berupa gambar, uraian tertulis

maupun video , seperti pada Gambar 2.11. Misalnya kita mengetik kata “mobil listrik” akan muncul berbagai informasi yang terkait dengan mobil listrik. Kita tinggal memilih apakah gambar, apakah berita, apakah video atau semuanya. Kita tinggal memilih sumber informasi yang kita yakini menyediakan informasi yang kita cari. Dengan meng-klik link yang tersedia di google, link tersebut akan memunculkan informasi yang dimiliki.



Gambar 2.11. Google Dapat Menunjukkan Berbagai Sumber Informasi

Lantas apa hubungan dengan profesi guru? Di masa lalu, sumber utama informasi bagi siswa adalah guru dan buku. Biasanya buku apa yang diperlukan juga ditunjukkan oleh guru. Apalagi informasi/konsep/teori yang ada di buku juga dijelaskan oleh guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu seakan-akan, guru adalah sumber informasi utama bagi siswa. Nah, dengan munculnya internet, maka siswa dapat memperoleh berbagai informasi dari dunia maya (internet). Bahkan saking banyaknya informasi yang mudah didapat siswa dan masyarakat luas, para ahli menyebut sekarang ini era “*information overloaded*”.

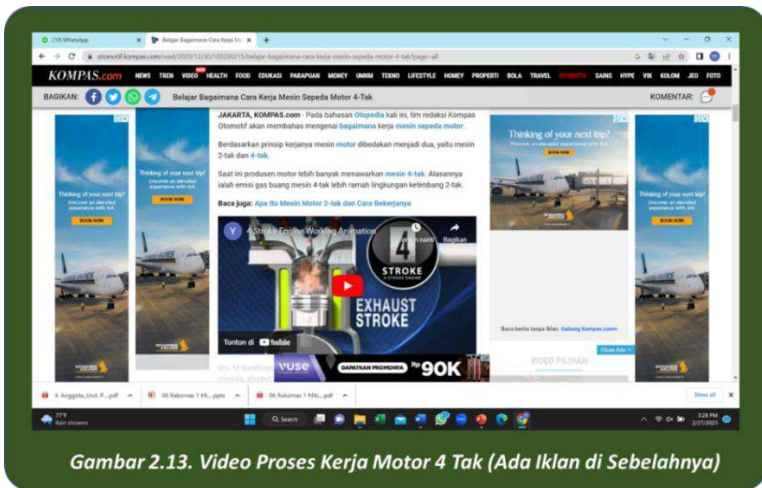
Apakah informasi di internet hanya berupa konsep dan atau teori yang bersifat akademik dan “sulit difahami”. Ternyata tidak. Banyak informasi yang sangat sederhana dan mirip apa yang biasanya ada di buku paket siswa SD dan dijelaskan oleh guru. Sebagai contoh, dengan kata kunci “perbedaan akar tunggang dan akar serabut”, google akan menunjukkan informasi seperti pada Gambar 2.12. yang mestinya dapat difahami oleh siswa SD. Bahan bacaan seperti itu sangat banyak di internet. Asal punya komputer atau laptop atau bahkan HP android dan punya paket data, siswa dapat memperoleh informasi tersebut gratis. Akhir-akhir ini banyak sekolah, kantor, rumah, dan bahkan kafe yang menyediakan WIFI, sehingga pengunjung dapat memanfaatkan tanpa harus punya paket data. Yang penting memiliki passwordnya.



Gambar 2.12. Contoh Informasi yang Sederhana di Internet

Jika kita tidak puas dengan informasi yang dimuat oleh suatu link, kita dapat meng-klik informasi yang lain, sampai mendapatkan informasi yang kita kehendaki. Jika tidak puas dengan informasi tertulis, kita dapat meng-klik yang informasi di link gambar (image) dan jika masih belum puas kita dapat meng-klik link video.

Bagaimana dengan informasi yang berupa proses kerja, misalnya berenang, membuat roti dan bahkan cara kerja mesin mobil. Ternyata banyak video yang memuat. Misalnya, dengan mengetik kata kunci “proses mesin 4 tak” dan kemudian mengklik tombol video akan muncul sederet link yang berisi video tentang proses kerja mesin 4 tak, seperti tampak pada Gambar 2.13. Sebagai mantan guru STM di tahun 1980an, saya merasakan betapa anaknya guru SMK sekarang. Dengan memutar video tersebut dapat dipastikan siswa SMK sangat mudah memahami proses kerja mesin 4 tak, yg digunakan di motor yang mereka pakai. Apalagi sebagian besar video tersebut disertai suara yang menjelaskan apa yang terjadi di dalam silinder.



Gambar 2.13. Video Proses Kerja Motor 4 Tak (Ada Iklan di Sebelahnya)

Seingat saya sebelum era google, guru harus menerangkan proses pembakaran dalam silinder motor dengan serangkaian gambar. Jika sekolahnya kaya, sekolah dapat membeli blok mesin yang sudah dibelah, sehingga tampak dalamnya. Atau dapat juga membeli alat peraga yang dapat diputar porong engkolnya, sehingga tampak gerakan piston dan katupnya. Blok mesin yang terbelah dan alat peraga yang dapat digerakkan tersebut harganya

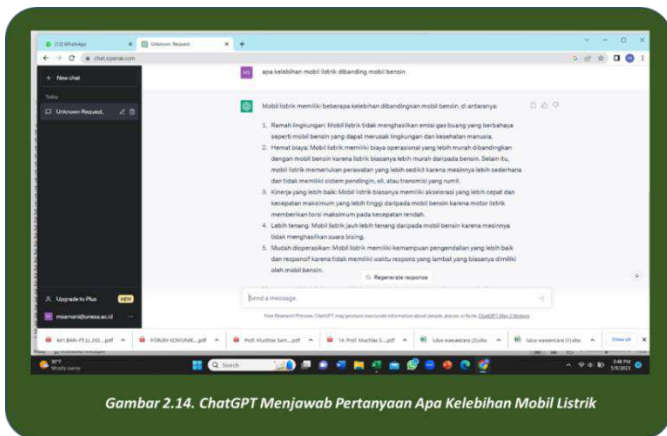
cukup mahal, sehingga hanya SMK “besar” atau SMK yang “kaya” yang memiliki. Dengan kedua alat peraga itupun siswa tetap tidak dapat melihat bagaimana terjadinya ledakan akibat bahan bensin yang terbakar oleh percikan busi. Guru biasanya menganalogikan dengan petasan bumbung, yang diisi dengan bensin dan kemudian disulut dengan api sehingga terjadi ledakan yang menimbulkan suara keras. Nah, ledakan itu yang menimbulkan tekanan sehingga mendorong piston.

Akhir-akhir ini muncul mesin pencari informasi baru yaitu **chatGPT** yang konon menggunakan AI (*artificial intelligence*). Berbeda dengan google yang menyediakan link informasi dan meminta pengguna membuat link tersebut untuk memperoleh informasi, chat GPT langsung memberi informasinya, seperti Gambar 2.14. Hanya saja informasi tersebut tidak disebutkan sumbernya dan chatGPT hanya menyediakan satu satu penjelasan (informasi) sehingga kita tidak punya bahan banding. Jadi kalau kita tidak puas dengan penjelasan dalam chatGPT terpaksa kita mencari sumber yang lain, misalnya kembali ke google atau lainnya.

Mengetahui banyaknya informasi yang mirip bahan ajar untuk level sekolah, baik di google, chatGPT dan sebagainya, muncul pertanyaan apakah peran guru masih sangat penting. Jika masih sangat penting seperti apa perannya. **Menurut saya peran guru tetap sangat penting, namun mengalami pergeseran besar. Jika di masa lalu, guru menjadi sumber informasi dan menjelaskan materi ajar, maka ketika informasi sudah banyak peran guru menjadi pemandu siswa bagaimana mencari informasi, bagaimana membanding-bandingkan dan menganalisis mana informasi yang valid. Dengan demikian sekaligus guru dapat mendorong kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi (high order thinking skills/HOTS).** Oleh karena itu dalam mengajar guru sudah harus menggunakan

konsep cybergogy (Wang and Kang, 2006). Seperti dikatakan oleh Charles Handy (1997) *“I want to equip every kid with a Macintosh Powerbook and CD-ROM drive so that potentially, he or she can know everything through their fingertips. The job of the teacher, then, is to help them to know what to do with all this knowledge and how to do it”*. Dengan kata lain peran guru di era di infomasi adalah membimbing siswa bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut untuk memecahkan problem kehidupan yang dihadapi (Samani, 2022).

Bagaimana mempraktikannya? Seorang guru Fsika SMA mencontohkan dengan sangat bagus. Topik yang akan dibahas sudah diberikan seminggu sebelumnya dan setiap kelompok siswa yang terdiri dari tiga orang diminta mencari bacaan atau video dari berbagai sumber, termasuk dari internet. Minimal dua sumber dan kemudian diminta membandingkan, menganalisis mana yang lebih valid. Topik atau pokok bahasan yang dicontohkan adalah Gerak Melingkar. Ternyata siswa dapat memperoleh informasi tersebut dan sebagian besar dari internet. Mungkin itu dampak positif era pandemi dan pembelajaran dilaksanakan secara daring, sehingga siswa terbiasa dengan internet.



Gambar 2.14. ChatGPT Menjawab Pertanyaan Apa Kelebihan Mobil Listrik

Pada jam pelajaran setiap kelompok memaparkan hasil analisisnya dan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Ternyata berjalan cukup baik, terjadi diskusi yang hidup dan siswa saling beradu argumentasi, seperti pada Gambar 2.15. Tampak sekali siswa telah mempelajari materi tersebut sebelumnya. Mungkin karena setiap kelompok harus presentasi. Tentu masih memerlukan panduan guru dan dalam beberapa hal guru masih harus meluruskan dan bahkan memberi contoh-contoh yang lebih sederhana di kehidupan sehari-hari. Memang guru harus pandai mengelola kelas agar diskusi tetap hidup tetapi tidak terjadi debat kusir.

Mengamati kejadian tersebut, saya sangat kagum bagaimana Bu Guru Fisika tersebut telah menggeser perannya dari sumber informasi menjadi pendamping siswa dalam belajar. Peran seperti itu sangat cocok untuk mendampingi siswa mencari informasi yang diperlukan kemudian menganalisisnya. Kemampuan seperti itulah yang diperlukan guru di masa depan. Walaupun informasi saat ini melimpah, khususnya di dunia maya, namun bagaimana memilih dan memilih informasi serta menganalisisnya masih tidak mudah bagi siswa, sehingga memerlukan pendampingan oleh guru.

Lebih dari hal di atas, pendidikan bukan hanya masalah kognitif dan pengetahuan semata. Pendidikan semestinya mencakup seluruh aspek yang diperlukan anak didik untuk menapaki kehidupan. Menurut hasil penelitian Angela L. Duckworth (2016), kunci kesuksesan adalah "*grit*" yang jika diartikan dengan bahasa Indonesia kira-kira "daya juang". Sedangkan *grit* ternyata terkait dengan apa yang disebut oleh Carol Dweck (2006) sebagai "*growth mindset*", yang dalam bahasa Indonesia kira-kira "berpikiran terbuka dan siap berubah".



Gambar 2.15. Ilustrasi Siswa Presentasi Hasil Bacaan dari Internet.
Sumber: <https://fisikabunda.files.wordpress.com/2012/02/foto02521.jpg>

Grit dan *growth mindset* tentu berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga terkait dengan sistem nilai dan sikap hidup yang diyakini seseorang. Disinilah pentingnya peran guru dalam menumbuhkembangkan sikap hidup siswa agar berkarakter baik, berpikiran terbuka, memiliki kepercayaan diri dan berdayajuang tinggi. Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara telah menjelaskan bahwa “pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak. bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita”. Jadi pendidikan mencakup tiga aspek sekaligus, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.

Bahwa pikiran itu penting ya, tetapi karakter dan raga yang juga penting, dan ketiganya harus dikembangkan secara sinergis. Bagaimana karakter itu menjadi ruh dalam menerapkan pemikiran dan aktivitas keseharian. Wawancara dengan banyak pihak menyimpulkan bahwa karakter lebih penting dibanding kemampuan kognitif. Ketika ditanya pilih mana punya teman atau anak buah yang pandai tetapi karakternya kurang baik atau teman

atau anak buah yang karakternya baik tetapi kurang pandai, ternyata responden memilih teman atau anak buah yang karakter baik walaupun kemampuannya kurang baik. Apa alasannya? Menurut mereka, memperbaiki kemampuan jauh lebih mudah dibanding memperbaiki karakter. Mungkin itu pula penjelasan mengapa ketika menyeleksi calon karyawan HRD perusahaan memberikan bobot karakter lebih tinggi dibanding keterampilan.

Penumbuhan karakter yang baik menjadi sangat penting dalam pendidikan kita, karena banyak pihak mensinyalir karakter anak-anak kurang baik. Banyak orang pandai (tentu tidak dapat digeneralisasi) yang tentunya telah mengenyam pendidikan tetapi seringkali menunjukkan karakter kurang baik. Bahkan Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam merisaukan dengan memberikan contoh bagaimana orang yang baru keluar penjara kemudian berpidato untuk memberantas korupsi. Juga adanya pejabat yang baru saja mencanangkan pemberantasan korupsi ternyata ditangkap karena korupsi.

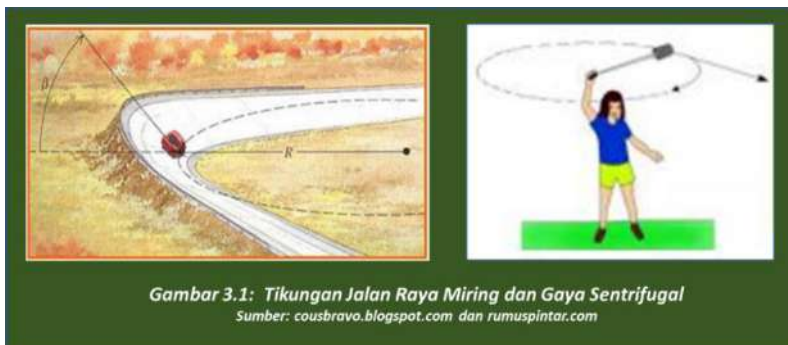
Penelitian yang panjang menunjukkan penumbuhan karakter yang paling efektif bagi siswa adalah melalui budaya sekolah (Samani, Warsono, Rahayu, Supardjo, 2015). Dan kunci utama dalam budaya sekolah ada teladan dari guru. **Dengan demikian peran guru tetap sangat penting, bagaimana menjadi teladan dalam berperilaku, menjadikan karakter sebagai ruh perilaku keseharian, dimanapun kita sedang berada, apapun profesi kita dan apapun yang sedang kita lakukan.** Mungkin itu mengapa kalau kita membuka kata “guru” di Google akan muncul gambar “guru-guru spiritual”.

APA KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI GURU?

Pertanyaan itu tidak mudah dijawab? Kompetensi yang diperlukan tentu terkait dengan pekerjaan yang diemban. Pekerjaan guru itu apa? Itulah yang perlu dibahas lebih dahulu. Walaupun demikian sejak awal harus difahami sebenarnya kompetensi dan kinerja tidaklah identik. Kompetensi adalah kemampuan yang diperlukan untuk mewujudkan kinerja. Tanpa memiliki kompetensi mustahil seseorang berkinerja baik. Namun orang yang memiliki kompetensi baik belum tentu berkinerja yang baik, karena ada faktor lain yang berpengaruh, misalnya yang bersangkutan sedang punya masalah keluarga sehingga tidak konsentrasi dalam bekerja. Atau situasi di tempat kerja tidak kondusif, sehingga orang tidak bergairah untuk bekerja secara maksimal. Bab ini hanya akan mendiskusikan kompetensi guru, sedangkan iklim kerja di sekolah akan dibahas tersendiri.

Secara sederhana tugas guru adalah mengajar, membimbing dan mendidik siswa untuk kelas tertentu bagi guru SD dan untuk matapelajaran tertentu bagi guru SMP/MTs/SMA/SMK/MA. Untuk itu *kompetensi pertama* yang harus dimiliki guru adalah menguasai materi yang diajarkan. Sulit dibayangkan bagaimana guru dapat mengajar, kalau yang bersangkutan tidak menguasai materi yang diajarkan. Bahkan menurut almarhum Prof Soedjadi (alm, guru besar Pendidikan Matematika Unesa), guru juga harus menguasai materi yang menjadi “payung” dari materi yang diajarkan, agar dapat menjelaskan mengapa begini mengapa begitu. Meminjam istilah yang sering digunakan oleh Prof. Conny Semiawan (1992), materi payung diperlukan untuk menjelaskan kemengapaannya (why) dan itu sangat penting terkait dengan berpikir tinggi (*high order thinking*) yang ingin ditumbuhkan pada

siswa. Materi “payung” yang dimaksud Prof Soedjadi mungkin sama atau mirip dengan *advance materials* yang disebutkan dalam Buku Panduan PPG yang diterbitkan oleh Kemendikbud (Ditjen GTK Kemendikbud, 2021).



Dengan menguasai materi payung, guru dapat mudah menjelaskan khususnya jika ada anak yang cerdas dan menanyakan “mengapa begitu”. Contoh paling sederhana, anak SD cukup tahu kalau air selalu mengalir ke bawah (ke posisi lebih rendah). Namun guru SD harus faham konsep gravitasi yang menyebabkan air mengalir ke bawah, sehingga dapat memberikan contoh sederhana. Misalnya dengan menjatuhkan benda. Siswa SMP cukup, kalau faham tikungan jalan raya dibuat miring agar mobil yang melaju kencang tidak terguling. Namun guru SMP harus faham konsep gaya sentrifugal yang menyebabkan mobil terguling atau terlempar ke samping, sehingga dapat memberikan contoh sederhana dengan mengikat batu kecil dengan tali dengan kemudian memutarnya sehingga terjadi gaya sentrifugal. Dalam bahasa lain, dengan menguasai materi payung, guru dapat menjelaskan “ke-mengapaannya”. Dengan contoh sederhana yang siswa dapat mencoba sendiri, maka materi ajar akan lebih mudah difahami dan lebih dari ikut lebih “melekat” karena bukan sekedar ingatan apa yang dijelaskan oleh guru.

Bukankah dalam teori pembelajaran modern, tugas pokok guru tidak menjelaskan materi tetapi menciptakan situasi belajar agar siswa terdorong untuk mempelajari materi tersebut. Bukankah dalam pembelajaran konstruktivis siswa membangun pemahaman sendiri (Fosnot, 2005). Kedua pernyataan tersebut benar sekali. Namun bagaimana mungkin guru menciptakan situasi pembelajaran untuk topik tertentu, kalau yang bersangkutan tidak menguasainya dengan baik. Katakanlah untuk menumbuhkan motivasi, guru mengajukan pertanyaan penggali. Guru juga mengajukan ilustrasi kehidupan sehari-hari di sekitar siswa yang terkait dengan materi tersebut. Dapat dibayangkan betapa sulitnya guru mengajukan pertanyaan penggali ataupun mengajukan ilustrasi kehidupan sehari-hari yang terkait, jika dia tidak menguasai materi ajar dengan baik. Apalagi, dari pengalaman respek siswa terhadap guru seringkali juga terkait penguasaan yang bersangkutan terhadap materi ajar. Pada hal respek seperti itu sangat penting dalam proses pendidikan. Seringkali respek atau kekaguman siswa terhadap guru membuatnya senang terhadap matapelajaran yang diampu guru tersebut.

Apakah seseorang yang menguasai materi pasti menjadi guru yang baik? Menurut saya tidak. Saya pernah punya dosen yang menurut teman-teman sangat pandai. Tetapi kalau memberi kuliah, mahasiswa pusing. Saat itu masih era OHP dan transparansi. Kalau memberi kuliah, beliau sibuk memaparkan apa yang tertulis di transparansi, tanpa memperhatikan mahasiswanya. Juga tidak pernah bertanya kepada mahasiswa. Kesan saya, beliau tidak memperhatikan apakah mahasiswa faham atau tidak. Atau mungkin beliau memang tidak faham kompetensi yang seharusnya dikuasai oleh mahasiswa yang mengikuti kuliah tersebut. Kalau dianalogikan dengan WA jaman sekarang, mungkin yang dilakukan beliau baru cawang satu warna hitam (V) yang artinya dikirim, belum cawang dua warna hitam (VV) yang

artinya sudah sampai tujuan, apalagi cawang dua warna biru yang artinya sudah dibaca atau dimengerti oleh mahasiswa. Dosen menguasai materi ajar tetapi cara mengajarnya tidak membuat mahasiswa memahami materi ajar.

Apakah ada guru seperti itu? Jujur saya belum pernah mengalami, namun menurut teman-teman yang pernah melakukan penelitian tentang proses pembelajaran di sekolah ternyata cukup banyak. Ada guru yang kalau mengajar mirip dosen yang menganggap siswa sudah dewasa sehingga dapat belajar sendiri ketika belum memahami saat dijelaskan guru. Ada juga guru yang cenderung menggunakan metoda ceramah (*direct instruction*), pada hal materinya lebih tepat jika menggunakan metoda kooperatif (*cooperative learning*) atau bahkan pemecahan masalah (*problem based learning*). Ada juga guru yang enggan menggunakan alat peraga yang tersedia di sekolah, dengan alasan ribet dan memakan waktu. Bahkan muncul istilah ada guru (tentu tidak semua) yang ketika mengajar fokusnya memenuhi kewajiban menjelaskan semua materi yang ada di kurikulum, apakah siswanya menguasai materi tersebut itu nomer dua.

Sebagaimana disebutkan terdahulu, tugas guru bukan sekedar menjelaskan materi ajar, tetapi mendampingi siswa belajar sampai memahami materi ajar tersebut, bahkan dapat menggunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Jika guru hanya menjelaskan materi ajar tetapi siswa tidak memahami, maka tugas guru sebenarnya belum selesai, karena siswa belum menguasai kompetensi yang harus dicapai.



Dengan demikian guru harus faham kompetensi apa yang seharusnya dikuasai siswa dan dapat membimbing yang bersangkutan untuk mencapainya. Ibarat bepergian, kompetensi yang harus dikuasai siswa adalah tujuan. Guru yang memandu siswa bepergian harus tahu kemana tujuannya. Tanpa tahu tujuan, sangat mungkin kesasar ke tempat lain. Tujuan tersebut harus spesifik agar tidak keliru. Misalnya bepergian dari Malang ke Surabaya, harus jelas tujuan di Surabaya pastinya dimana. Misalnya di SMA 5 Surabaya yang terletak di jalan Kusumabangsa. Dalam pendidikan, kompetensi apa yang harus dikuasai harus jelas pada ranah apa dan level mana. Kompetensi yang harus dicapai tersebut seringkali disebut Capaian Pembelajaran (CP). Jadi CP harus spesifik. Jika menggunakan taksonomi Bloom harus jelas pada ranah kognitif atau afektif atau psikomotor, serta pada level yang mana. Misalnya CP-nya: siswa dapat menerapkan konsep “X” dalam perkalian. Berarti jika menggunakan taksonomi Bloom CP tersebut termasuk C-3.

Untuk merancang bepergian dan naik apa, disamping harus tahu lokasi yang dituju juga harus tahu dimana posisi keberangkatannya. Posisi keberangkatan dalam pembelajaran

disebut kemampuan awal, yaitu kemampuan yang dikuasai siswa sebelum belajar. Ibarat bepergian tadi, dari Malang yaitu Gedung Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Nah, sekarang sudah pasti guru memandu siswa dari Gedung FMIPA Universitas Negeri Malang ke SMA 5 Surabaya yang terletak di Jl Kusumabangsa Surabaya. Kemampuan awal tersebut juga harus jelas dan menjadi syarat untuk mempelajari kompetensi yang ingin dikuasai. Contoh paling sederhana, siswa SD yang akan belajar perkalian memerlukan syarat yaitu sudah menguasai kompetensi penjumlahan.

Jika guru sudah tahu kompetensi yang harus dicapai dan juga tahu kemampuan awal yang dimiliki siswa, pertanyaan berikutnya “bagaimana proses pembelajaran yang harus dijalankan agar siswa dapat mencapai kompetensi tersebut dengan baik dan cepat”. Ibarat guru yang membimbing siswa pergi dari Universitas Negeri Malang ke SMK 5 Surabaya, siswa harus dipandu naik apa? Lewat rute mana?



Untuk menentukan kendaraan yang akan digunakan dan rute jalan yang akan dilewati tentu harus mempertimbangkan

karateristik siswa, kendaraan yang tersedia dan rute jalan yang paling pendek dan lancar. Dalam pembelajaran, karateristik siswa itu terutama terkait dengan gaya belajarnya apakah visual, auditorial atau kinestetik (Jalel & Thomas, 2019). Rute jalan barangkali dapat dianalogkan dengan model pembelajaran, apakah pembelajaran langsung (*direct instruction*), pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*), pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*) dan sebagainya (Arends, 1997). Kendaraan dapat dianalogkan dengan fasilitas yang tersedia. Alur bagaimana guru menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan tampak pada Gambar 3.3.

Ketika merancang proses pembelajaran, guru juga harus menggandengkan dengan materi (*content*) yang akan dipelajari siswa. Dalam bidang pembelajaran, dikatakan pedagogi harus dirancang untuk materi tertentu, sehingga pengetahuan tentang itu disebut *pedagogical content knowledge* (PCK) atau pedagogik khusus. Ketika proses pembelajaran semakin banyak menggunakan teknologi, guru juga harus pandai memilih dan menggunakan teknologi yang tepat. Kemampuan seperti itu yang sekarang disebut *technological pedagogical content knowledge* (TPACK).

Apa yang dibahas di atas lebih menekankan fungsi guru sebagai “pengajar” yaitu membimbing siswa agar menguasai materi ajar. Pada hal tugas guru bukan sekedar seperti itu. Guru adalah “pendidik” yang tugasnya mendampingi dan membimbing siswa agar mampu berkembang sesuai dengan potensinya dan mampu mengatasi problem kehidupan yang dihadapi. Penguasaan materi ajar memang penting, tetapi itu bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir pendidikan adalah siswa dapat mengembangkan potensinya sehingga mampu memecahkan problem yang dihadapi. Penguasaan materi ajar, katakanlah ilmu

pengetahuan sebenarnya merupakan “alat” atau “tools” untuk memahami dan mengatasi problem yang dihadapi.

Ki Hajar Dewantara (2004) menganalogikan guru sebagai petani yang sedang bercocok tanam. Petani yang menanam jagung tidak boleh bermimpi jagungnya tumbuh menjadi padi. Tugasnya adalah mengairi, memupuk, menyiangi dan mengupayakan agar jagungnya tumbuh subur, mampu menghadapi perubahan alam, sehingga akhirnya berbuah bagus. Berarti seharusnya guru mengenali potensi setiap siswa, sehingga mampu membimbing dan mengembangkan potensi tersebut, melalui matapelajaran yang diajarkannya guna memecahkan problem kehidupan yang dihadapi. Itulah sebabnya dalam pembelajaran modern, salah satu kemampuan utama yang harus dikembangkan adalah memecahkan masalah (*problem solving*) (Schoenfeld, 2013).

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi sosial yang melibatkan orang dewasa (guru) dan anak-anak (siswa). Dalam konteks ini, perilaku orang dewasa akan banyak ditiru oleh anak-anak. Bahkan seringkali anak TK lebih percaya dan meniru gurunya dibanding ayah-ibunya. Mungkin itu sebabnya muncul istilah “guru itu digugu dan ditiru”. Jadi guru harus menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari. Bukan hanya di kelas ketika mengajar, tetapi di seluruh aktivitas sehari-hari. Apalagi jika guru bertempat tinggal di daerah dimana banyak siswa yang tinggal disitu. Kita perlu ingat, kata bijak bahwa “kita lebih percaya apa yang dilakukan dibanding apa yang diomongkan” dan itu termasuk siswa terhadap guru. Kata-kata bijak menyatakan “*ordinary teacher tells, good teacher shows, great teacher inspires*”. Jadi, idealnya guru itu menginspirasi siswanya.

Sebagai makhluk sosial maupun sebagai pendidik, di samping berinteraksi dengan siswa, guru juga berinteraksi dengan rekan seprofesi dalam rangka mengembangkan kompetensinya

dan juga dengan masyarakat pada umumnya. Oleh karena kepribadian dan perilaku bersosialisasi juga sangat penting. Di Indonesia dikenal dengan istilah kegiatan di Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi guru SD/MI dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bagi guru SMP/MTs/SMA/SMK/MA. Organisasi yang mirip dengan *Professional Learning Community (PLC)* di negara maju itu, merupakan wahana bagi guru untuk berbagi pengalaman dan berbagi gagasan untuk mengembangkan keprofesionalannya. Istilah kerennya harus melakukan *continuous professional development (CPD)*

Dalam era perkembangan iptek yang sangat cepat, baik yang terkait dengan materi ajar, psikologi belajar, model pembelajaran, teknologi yang mendukung proses pembelajaran, bahkan teori *neuro psychology* yang akhir-akhir banyak menjadi perbincangan bagaimana dampaknya pada proses pembelajaran, maka kemampuan belajar secara berkelanjutan (CPD) menjadi sangat penting bagi guru. Guru harus menjadi manusia pembelajar yang terus menerus meningkatkan kompetensinya sehingga proses pembelajaran yang diampu semakin baik dari hari ke hari.

Dari uraian di atas, menurut saya minimal guru harus:

- 1) Menguasai materi ajar, termasuk “materi payung” atau *advance materials*-nya.
- 2) Mampu membimbing siswa mengembangkan diri dan mencapai kompetensi yang harus dikuasai untuk memecahkan problem kehidupan . Untuk ini guru haruslah:
(a) faham kurikulum atau bahasa sederhananya faham apa kompetensi yang harus dikuasai siswa, (b) faham bagaimana potensi dan kasteristik siswa, khususnya bakat dan minat mereka, bekal awal yang telah dikuasai dan seperti apa modalitas belajar yang bersangkutan, (c) menguasai berbagai metoda pembelajaran sehingga dapat mengelola pembelajaran yang sesuai dengan situasinya.

- 3) Mampu berinteraksi dengan baik dengan siswa, dengan teman sejawat, orangtua siswa dan masyarakat pada umumnya.
- 4) Menjadi manusia pembelajar yang terus menerus meningkatkan kemampuannya.

Dalam bahasa yang sederhana ketiga kompetensi tersebut dapat diringkas menjadi: (1) faham apa yang diajarkan (*know what to teach*), (2) faham bagaimana membelajarkan (*know how to teach*), dan (3) faham bagaimana mengembangkan diri (*know how to develop his/her competences*).

Standar Kompetensi Guru di Beberapa Negara

Apakah ada negara atau lembaga yang menerbitkan konsep tentang kompetensi guru? Ternyata banyak. Untuk Indonesia, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) menyebutkan bahwa guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi pedagogik (2) kompetensi kepribadian (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional.

Dengan catatan, ternyata yang dimaksud dengan kompetensi profesional dalam UUGD adalah penguasaan materi ajar. Kompetensi pedagogik tentunya terkait dengan bagaimana mengajar dan membimbing siswa. Kompetensi kepribadian terkait dengan perilaku, sehingga mampu menjadi teladan bagi siswanya. Kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi dan berinteraksi dengan rekan sejawat untuk pengembangan profesi, dengan orangtua siswa dan masyarakat untuk mendukung proses pembelajaran yang diampunya. Kalau apa yang dalam UUGD tersebut dijejerkan dengan kemampuan guru yang diuraikan berdasarkan fungsi mereka saat bekerja, ternyata sangat mirip.

Untuk Australia, Australian Institute for Teaching and School Leadership (AISTL, 2011) menyusun standar kompetensi yang harus dikuasai guru, yaitu:

- 1) *professional knowledge*, yang mencakup (a) *know students and how they learn refer to the standard at each career stage*, dan (b) *know the content and how to teach it*;
- 2) *professional practice* yang mencakup: (a) *plan for and implement effective teaching and learning*, (b) *create and maintain supportive and safe learning enviroment*, dan (c) *assess, provide feedback and report on student learning*, serta
- 3) *professional engagement* yang mencakup (a) *engage in professional learning*, dan (b) *engange professionally with colleagues parents/carers and the community* (AISTL, 2011).

Jika dicermati standar kompetensi guru di Australia tersebut tidak beda jauh dengan yang di Indonesia. Perbedaannya terletak pada cara menyusunnya. Oleh AISTL (2011) standar kompetensi guru dipilah atas pengetahuan yang harus dikuasai oleh guru professional (*professional knowledge*), kemampuan praktik sebagai guru professional (*professional practice*), dan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Jadi cara mengelompokkan kompetensi berdasarkan fungsinya, sementara di Indonesia berdasarkan potensi untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Domains of teaching	Standards	Focus areas and descriptors
Professional Knowledge	1. Know students and how they learn	Refer to the Standard at each career stage
	2. Know the content and how to teach it	
Professional Practice	3. Plan for and implement effective teaching and learning	
	4. Create and maintain supportive and safe learning environments	
	5. Assess, provide feedback and report on student learning	
Professional Engagement	6. Engage in professional learning	
	7. Engage professionally with colleagues, parents/carers and the community	

Gambar 3.4. Standar Kompetensi Guru Profesional di Australia
Sumber: aisti.edu.au, Feb 2011

Di samping itu oleh AISTL setiap fungsi tersebut dijabarkan, misalnya untuk pengetahuan guru harus faham karakteristik siswa termasuk cara mereka belajar dan materi yang harus dipelajari. Untuk kemampuan praktik, guru harus mampu merancang pembelajaran yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi siswa, serta mampu melakukan evaluasi baik formatif maupun sumatif, termasuk memberikan umpan baik kepada siswa. Untuk kemampuan berinteraksi sosial, dijabarkan menjadi kemampuan berinteraksi dengan rekan sejawat, orangtua dan masyarakat secara luas.

Lebih jauh AISTL (2011) menjabarkan standar kompetensi tersebut dikaitkan dengan tingkat keprofesional guru, yang dibagi menjadi empat level, yaitu: *graduate*, *proficient*, *highly accomplished* dan *lead*. Untuk aspek kompetensi *know students and how they learn*, *graduate teacher* harus sudah menguasai berbagai teori dan mampu menerapkan dalam skala terbatas ketika menempuh pendidikan. *Proficient teacher* sudah mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. *Highly accomplished*, disamping punya kemampuan seperti guru muda, harus mampu memberikan saran dan dukungan kepada rekan sejawat. *Lead teacher* harus mampu menyusun rancangan pembelajaran secara utuh untuk satu periode tertentu dan mampu memimpin rekan sejawat untuk melaksanakannya. Aspek lain, juga dijabarkan seperti aspek pertama tersebut, sehingga tampak gradasi dari level *graduate teacher* sampai dengan *lead teacher*.

Penjabaran tersebut di atas yang tidak ada dalam standar kompetensi guru di Indonesia. Menurut informasi, Ditjen GTK Kemendikbud sudah menyusun tetapi sampai nasakah ini ditulis belum diterbitkan. Namun demikian, rapat antara Ditjen Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, dan beberapa rektor LPTK merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan Pendidikan Profesi

Guru (CPL PPG) yang sedikit banyak menggambarkan kompetensi guru muda, ketika mereka mulai bertugas. Dirumuskan profil lulusan PPG sebagai guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan (Ditjen Pembelajaran Kemenristekdikti, 2019).

Profil tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuh CPL yaitu:

- 1) Mampu melaksanakan tugas keprofesian, sebagai pendidik yang memesona yang dilandasi oleh sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian.
- 2) Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel).
- 3) Menguasai materi ajar, termasuk advance materials secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek apa (konten), mengapa (filosofi), dan bagaimana (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, teknologi informasi dan komunikasi atau *technological pedagogical content knowledge* dan pendekatan lain yang relevan.
- 5) Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah

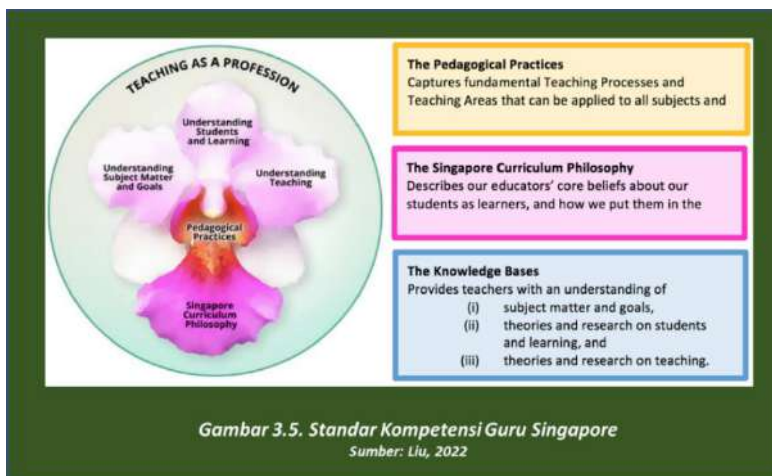
secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif dan komunikatif dengan menggunakan model pembelajaran yang didukung hasil penelitian.

- 6) Mampu melakukan evaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen autentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 7) Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru professional, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi.

Singapore memiliki cara lebih sederhana dalam merumuskan standari kompetensi guru, yang hanya mencakup dua kompetensi, yaitu (1) pemahaman terhadap filosofi Kurikulum Singapore (*Singapore Curriculum Philosophy*) dan (2) memiliki kompetensi dalam mempraktikkan pedagogi yang baik (*pedagogical practices*) (Liu, 2022). Nah, untuk mampu mempraktikkan pedagogi yang baik, menurut Liu (2022) diperlukan (a) pemahaman yang baik terhadap materi ajar termasuk tujuannya (*understanding subject matter and goals*), (b) pemahaman yang baik terhadap siswa dan pembelajaran yang diampu (*understanding students and learning*), dan (c) memahami cara mengajar yang baik (*understanding teaching*). Walaupun dirumuskan dengan singkat, menurut saya kandungan tersebut tidak jauh beda dengan rumusan yang dibuat oleh AISTL maupun yang di Indonesia.

Yang menarik, Singapore menganggap pemahaman terhadap filosofi di balik kurikulum tersebut sangat penting, sehingga guru tidak hanya harus faham isi kurikulum tetapi juga harus faham filosofi yang melandasinya. Sangat mungkin itu terkait keyakinan pimpinan Singapore bahwa pembangunan Singapore tergantung kepada guru, karena melalui guru

pembangunan bangsa Singapore digantungkan. Seperti yang dikatakan oleh “pendiri Singapore”, Lee Kuan Yew “*for finally, just as a country is as good as its citizens, so its citizens are finally, only as good as their teacher*” (Liu, 2022).



Malaysia menggunakan tiga standar kompetensi untuk guru, yaitu: (1) amalan nilai profesionalisme keguruan, (2) pengetahuan dan kefahaman, serta (3) kemahiran (Siraj dan Ibrahim, 2012). Tercakup dalam amalan nilai profesionalisme adalah kepercayaan kepada Tuhan, amanah, ikhlas, berilmu, kasih sayang, sabar, budi bahasa, adil, bertimbang rasa, daya tahan-daya saing dan tahan lasak, cergas-aktif-sihat, kemahiran interpersonal dan intrapersonal, semangat sukarela dan efisien. Tercakup dalam amalan pengetahuan dan kefahaman adalah pemahaman anak didik, ilmu pendidikan, kurikulum, materi yang akan diajarkan, teknik komunikasi, strategi pembelajaran dan evaluasi. Sedangkan yang dimaksud kemahiran adalah apa yang di Indonesia disebut PPL (Praktek Pengalaman Lapangan). Jadi Malaysia membagi kompetensi yang harus dikuasi guru menjadi

tiga, yaitu sikap, pengetahuan dan praktik. Mungkin itu terilhami taksonomi Bloom, yaitu afektif, kognitif dan psikomotor.

Apakah Amerika Serikat yang pola pendidikannya sangat desentralistik memiliki standar kompetensi guru? Ternyata punya. Seperti yang dikutip oleh Tatto (2021), *National Board for Professional Teaching Standards* (NBPTS) menetapkan lima kompetensi inti yang harus dimiliki guru, yaitu:

1. *Teachers are committed to students and their learning.*
2. *Teachers know the subjects they teach and how to teach those subjects to students*
3. *Teachers are responsible for managing and monitoring student learning*
4. *Teachers think systematically about their practices and learn from experience*
5. *Teachers are members of learning communities.*

Karena pendidikannya terdesentralisasi, walaupun NBPTS telah menerbitkan standar kompetensi guru secara nasional, negara bagian di Amerika Serikat dapat menetapkan sendiri untuk wilayahnya. Sebagai contoh, Negara bagian Ohio di Amerika Serikat memiliki pola standar guru yang agak berbeda. Ohio menyusun standar guru yang lebih rinci dan didasarkan pada kegiatannya sebagai berikut (<http://ramcewing.people.ysu.edu/OhioStandards.pdf>):

Standar 1 tentang siswa: Guru memahami pola belajar dan perkembangan siswa serta menghargai perbedaan setiap siswa.

Standar 2 tentang materi ajar: Guru memahami materi ajar yang menjadi tanggungjawabnya dalam mengajar dan membimbing siswa.

Standar 3 tentang asesmen: Guru memahami dan mampu menggunakan berbagai jenis asesmen dalam pembelajaran untuk menilai dan memastikan siswa telah belajar dengan baik.

Standar 4 tentang pembelajaran: Guru mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan merangsang kemajuan belajar setiap siswa.

Standar 5 tentang lingkungan belajar. Guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang meningkatkan level pembelajaran dan hasil belajar setiap siswa.

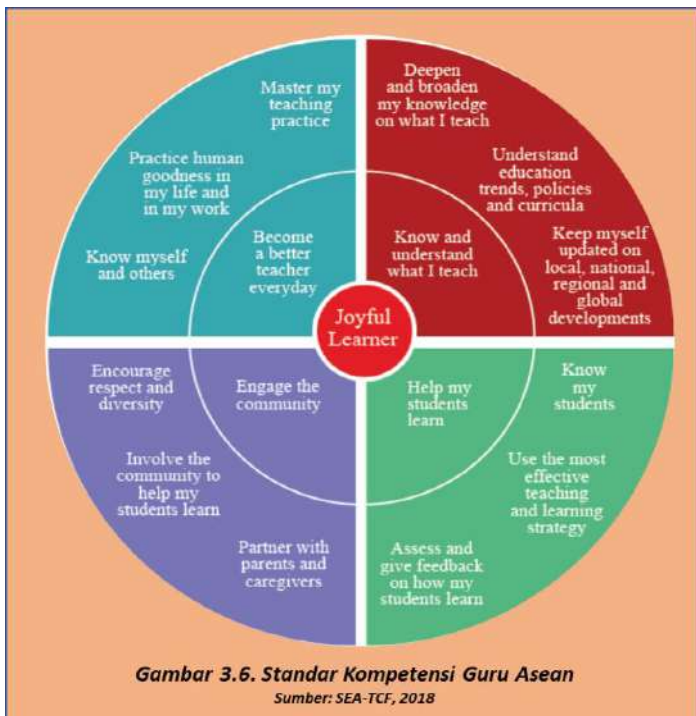
Standar 6 kolaborasi dan komunikasi. Guru mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan rekan guru, pengelola sekolah, siswa dan orangtuanya, serta masyarakat untuk mendukung siswa belajar.

Standar 7 tentang tanggungjawab dan pengembangan profesional: Guru memahami tanggungjawabnya untuk mengembangkan kinerja profesional sebagai individu maupun bagian dari komunitas belajar.

Di negara bagian Ohio, ketujuh standar tersebut masih dirinci untuk menunjukkan apa saja sub standar yang harus dikuasai dan dilakukan oleh guru. Misalnya untuk standar 1 tentang siswa, guru harus menguasai lima sub standar, yaitu (a) memahami bagaimana siswa berkembang, memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta bagaimana menumbuhkan perilaku belajarnya, (b) memahami apa yang diketahui dan apa yang dapat dikerjakan siswa kemudian menggunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, (c) berusaha agar setiap siswa mencapai perkembangan potensinya secara maksimal, (d) menghargai perbedaan budaya, kemampuan bahasa dan pengalaman yang dimiliki siswa, dan (e) memahami ciri-ciri anak berbakat istimewa dan anak berkebutuhan khusus, sehingga mampu merancang pembelajaran yang sesuai bagi mereka.

Standar 2 tentang materi ajar juga dielaborasi menjadi lima sub standar yaitu: (a) menguasai materi ajar sehingga dapat digunakan untuk merancang pembelajaran dengan baik, (b) menguasai pemanfaatan materi dikaitkan dengan strategi

pembelajaran khususnya, (c) memahami kurikulum dan standar isi di Ohio, (d) memahami kaitan materi ajar dengan bidang-bidang lain, dan (e) dapat mengaitkan materi ajar dengan lingkungan sekitar dan masa depan karir bagi siswa. Standar 3,4,5,6 dan 7 juga dijabarkan seperti halnya standar 1 dan 2.



Negara-negara yang tergabung dalam Asean ternyata juga mengembangkan standar kompetensi guru. Asean membagi standar kompetensi guru menjadi empat kompetensi esensial, yaitu: (1) mengetahui dan memahami materi ajar (*knowing and understanding what to teach*), (2) mampu membantu siswa belajar (*helping students learn*), (3) terlibat aktif dalam komunitas (*engaging the community*) dan (4) menjadi guru yang lebih baik dari hari ke hari (*becoming a better teacher every day*).

Terkait dengan materi ajar (*what to teach*), guru dituntut untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang terkait dengan materi ajar, memahami trend pendidikan, kebijakan yang terkait, kurikulum dan selalu memperbarui pengetahuan tentang perkembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional dan global. Terkait dengan kemampuan membantu siswa belajar (*helping students learn*), guru dituntut memahami siswa dengan berbagai karakteristiknya, mampu menggunakan modep pembelajaran yang paling efektif, mampu melakukan asesmen dan memberikan umpan balik kepada siswa.

Terkait dengan keterlibatan dengan komunitas (*engaging the community*), guru dituntut mampu bekerjasama dengan orangtua atau wali murid dan melibatkan masyarakat untuk membantu siswa belajar, serta menghargai perbedaan di antara mereka. Terkait dengan menjadi guru yang semakin baik (*becoming a better teacher everyday*), guru dituntut untuk melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri serta kebaikan dan kekurangan yang dilakukan orang lain sebagai modal meningkatkan kinerja.

Tiga kompetensi pertama dalam Standar Kompetensi Guru Asean (*what to teach, helping students learn, dan engaging the community*) rasanya tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan pada standar negara tertentu yang sudah diuraikan di atas. Yang menarik adalah yang ke-empat, yaitu *becoming a better teacher every day*. Dalam istilah yang lebih sederhana adalah bagaimana agar setiap hari guru meningkatkan kualitas diri dan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Lebih sederhana lagi “hari ini harus lebih baik dibanding kemarin”. Secara rinci standar tersebut termuat pada Gambar 3.6.

Ternyata Asean juga membuat standar untuk guru vokasi (kejuruan). Menurut standar tersebut, di satu sisi guru vokasi

harus menguasai kompetensi vokasional yang terkait bidang kejuruan/keahlian yang diajarkan dan di lain pihak juga harus menguasai kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi okupational sebaik penguasaan dalam pedagogik dan dedaktik (Becker & Spottl, 2017). Terkait dengan kompetensi vokasional, guru vokasi harus dapat menguasai teori maupun praktik di bidang kejuruan yang diajarkan. Guru harus dapat menjelaskan mengapa suatu pekerjaan harus dilakukan seperti itu. Contoh sederhana mengapa saat mengikir benda kerja posisi siku kita harus sejajar dengan benda kerja. Mengapa saat mengikir benda kerja hanya “digoreskan/dimakamkan” saat maju. Mengapa saat membubut, jenis pahat yang digunakan harus sesuai dengan sesuai dengan benda kerjanya. Guru vokasi tidak boleh hanya dapat menjelaskan “prosedur kerja” tetapi mengapa prosedur kerja harus seperti itu.

Kompetensi personal dan sosial adalah kompetensi dalam beradaptasi dengan situasi sekolah/lembaga pelatihan vokasi, terutama yang terkait dengan sistem organisasi dan karakteristik personal di dalamnya, sehingga yang bersangkutan dalam mengembangkan diri di dalamnya. Kompetensi riset vokasional adalah kemampuan untuk menentukan kemampuan apa yang diperlukan untuk menangani okupasi (pekerjaan tertentu). Misalnya guru vokasi bidang otomotif harus dapat mengidentifikasi kemampuan apa yang diperlukan melakukan servis ringan sepeda motor. Untuk kompetensi di bidang vokasi tersebut, guru juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi.

Regional TVET Teacher Standard for ASEAN	
Areas	Competences
Personal and Social	<p>P1: Demonstrate the dignity, culture, values, beliefs and rights of individuals/groups nationally and in ASEAN region.</p> <p>P2: Plan and implement professional development to enhance TVET teacher skills, knowledge and attitudes towards lifelong learning.</p> <p>P3: Utilize entrepreneurial and soft skills in the learning environment.</p> <p>P4: Identify and apply laws and regulations of educational institutions and act according to youth and young adult legislations.</p> <p>P5: Perform with their colleagues in teams to enhance TVET delivery and school development.</p> <p>P6: Set goals for challenges and establish a safe and stimulating environment for students, rooted in mutual respect.</p> <p>P7: Promote green skills and sustainability in the learning environment.</p>
Vocational <ul style="list-style-type: none"> • Research, • Discipline, • Didactics, • Pedagogy, • Management 	<p>V1: Analyze the requirements of technology and the changing work and deliver strategies or modes for learning in different learning environments.</p> <p>V2: Determine occupational competence requirements and respective learning efforts and training needs of students.</p> <p>V3: Analyze technology and its meaning for learning in the context of organization, methods, tools, equipment and materials in the world of work.</p> <p>V4: Analyze didactical approaches and evaluate their use for learning in the context of digital technology and changes of work and work organization.</p> <p>V5: Design learning sessions through use of innovative teaching methods to open up the complexity of work.</p> <p>V6: Develop lesson plans, syllabus and learning material.</p> <p>V7: Plan theoretical and practical lessons in classrooms, workshops and industrial workplaces.</p> <p>V8: Carry through learning sessions to support competence development of learners.</p> <p>V9: Carry out assessments and evaluations of the learner's occupational competence.</p> <p>V10: Accompany students' competence development reflecting the competence development level, living environment and individual learning conditions.</p> <p>V11: Improve learning and interaction processes by choosing and developing suitable methods.</p> <p>V12: Shape and manage learning and work environments and industrial workplaces.</p> <p>V13: Shape the learning and school culture and further develop of the school environment to encourage lifelong learning.</p> <p>V14: Develop curricula for TVET at school level and participation at national level.</p>

Gambar 3.7. Standar Area Kompetensi Guru Vokasi Asean
Sumber: Regional TVET Teacher Competence Standard

Karena bidang vokasional sangat bervariasi dan satu dengan yang lain dapat berbeda jauh, maka proses pembelajaran untuk setiap bidang vokasi memerlukan metoda yang khas. Oleh karena itu guru vokasi harus menguasai kompetensi didaktik vokasional (*vocational didactics*), yaitu kemampuan memilih dan menstrukturkan materi ajar agar siswa dapat belajar dengan

tahapan-tahapan yang baik, sehingga mudah diikuti oleh siswa. Di samping itu, guru vokasi tetap memerlukan kompetensi pedagogik vokasional (*vocational pedagogy*) agar dapat menyusun rancangan pembelajaran sampai dengan pelaksanaannya serta mengevaluasinya. Dalam istilah sehari-hari dikatakan, guru vokasi harus mampu memberi contoh bagaimana mengerjakan sesuatu, membimbing siswa belajar mengerjakan dan dapat menilai hasil kerja siswa walaupun tidak melihat saat si siswa bekerja. Dengan melihat hasil pengelasan yang dilakukan siswa, guru vokasi bidang pengelasan harus dapat menilai mengapa hasil pengelasan seperti itu.

Kompetensi yang diuraikan di atas semuanya terkait dengan tugas mengajar dan membimbing siswa. Disamping itu, karena perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dan seringkali mengubah pola kerja dan pola kehidupan, maka guru vokasi harus juga mampu melakukan penyempurnaan program pendidikan/ pelatihan yang diampu agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Mengapa demikian? Karena tujuan utama pendidikan vokasi adalah menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja. Dengan demikian, guru vokasi juga harus memiliki kompetensi manajemen vokasional (*vocational management*).

Masing-masing kompetensi di Standar Kompetensi Guru Vokasi Asean tersebut diatas, masih dijabarkan menjadi sub-sub kompetensi sebagaimana tampak pada Gambar 3.7. Namun harus dicatat bahwa pendidikan vokasi terkait erat dengan dunia kerja yang sangat mungkin berbeda antar satu negara dengan negara lain. Bahkan berbeda antar satu daerah dengan daerah lain, walaupun keduanya berada dalam satu negara. Oleh karena itu standar kompetensi yang tercantum pada Gambar 3.7 masih harus disesuaikan dengan kondisi negara dan bahkan daerah dimana sekolah/ lembaga pendidika vokasi tersebut berada.

Catatan lain, guru vokasi sebarusnya memiliki pengalaman yang cukup di dunia industri/dunia kerja yang cukup, sehingga dapat menginternalisasi budaya kerja di industri/dunia kerja yang berbeda dengan budaya di sekolah. Dengan demikian, guru vokasi dapat menciptakan budaya kerja di sekolah yang mirip dengan di industri.

Penelitian tentang Kompetensi Guru

Di samping negara, negara bagian dan lembaga profesi, ternyata juga ada penelitian tentang kompetensi guru. Penelitian Selvi (2010: 168-172) menemukan sepuluh kompetensi yang harus dikuasai guru yaitu:

1. *Field Competencies,*
2. *Research Competencies,*
3. *Curriculum Competencies,*
4. *Lifelong Learning Competencies,*
5. *Social-Cultural Competencies,*
6. *Emotional Competencies,*
7. *Communication Competencie.*
8. *Information and Communication Technologies (ICT) Competencies,*
9. *Environmental Competencies.*

Cara Selvi dalam mengkategorikan kompetensi guru berbeda, sehingga menemukan kompetensi yang berbeda pula. Tiga kompetensi yang khas diajukan oleh Selvi adalah *research competencies, lifelong learning competencies, emotional competencies* dan *environmental competencies*. Selvi menginginkan guru dapat melakukan riset secara mandiri. Dengan riset tersebut diharapkan guru dapat meningkatkan penguasaan materi ajar (*field competencies*) dan cara mengajarnya yang lebih baik (*curriculum competencies*). Karena hal itu harus dilakukan secara terus menerus, menurut Selvi guru haruslah memiliki semangat belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Karena guru harus membimbing siswa dengan berbagai karakteristik, ada yang cepat belajar tetapi juga ada yang lambat belajar, ada yang pendiam tetapi juga ada yang cerewet, ada yang mengikuti tata tertib sekolah tetapi juga ada yang sering melanggar, maka guru harus memiliki *emotional competencies* agar tidak mudah tersinggung dan marah serta tidak mudah putus asa. Selvi berpendapat pelestarian lingkungan merupakan salah satu pilar kehidupan yang harmonis. Sebagai penumbuhkembang sikap dan perilaku siswa, guru haruslah memiliki *environmental competencies* sehingga dapat membimbing dan menjadi teladan bagi siswa bagaimana menjaga kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Penelitian Panggabean dan Himawan (2016) di 282 sekolah di Jakarta menemukan lima kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu:

1. *professional knowledge (mastery of content and teaching methodology),*
2. *professional skills (pedagogies, classroom management, and learner assessment),*
3. *personal characteristics (personal traits such as being responsible, punctual, etc.),*
4. *professional or personal ethical standards and values (resulting in teachers being good role models in the school and the community), dan*
5. *professional development and lifelong learning (such as participation in professional teacher organizations and activities, and other elements that demonstrate a desire to enhance the teaching profession).*

Temuan Panggabean dan Himawan tersebut tidak berbeda jauh dengan yang ditemukan oleh Selvi, walaupun tempat penelitiannya berbeda. Secara konsep perbedaan hanya pada *environmental competencies* yang tidak ditemukan oleh

Panggabean dan Himawan di Indonesia. Mungkin orang Indonesia belum begitu peduli terhadap lingkungan seperti di Turki.

Kurnia (2013: 20-21) yang mengkaji model pendidikan guru TVET di Jerman dan menyimpulkan kompetensi guru disama adalah:

1. *Planning, implementation and evaluation of vocational learning processes.*
2. *Planning, developing and shaping of learning environments.*
3. *Developing education and training programmes.*
4. *Participation in school development.*

Walaupun tampaknya singkat, kalau dikaji 4 kompetensi yang ditemukan Kurnia tersebut sangat lengkap. Butir pertama menyangkut kemampuan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Butir kedua menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi butir pertama dan kedua sudah mencakup kemampuan secara utuh tentang bagaimana mengelola pembelajaran. Jika dianggap kurang dibanding yang diajukan negara atau lembaga lain karena Kurnia tidak memasukkan penguasaan materi ajar atau kompetensi vokasional untuk guru vokasi.

Seperti halnya di Asean, Kurnia juga menyimpulkan guru vokasi tidak cukup hanya mampu mengajar, tetapi juga harus mampu mengembangkan program pendidikan/pelatihan di bidang kejuruan yang diajarkan, termasuk berpartisipasi dalam pengembangan sekolah/lembaga pelatihan tempatnya mengajar.

Agak berbeda dengan Kurnia, hasil penelitian Moris (2013) menyimpulkan kompetensi guru vokasi secara lebih elaborative sebagai berikut:

1. *An understanding of occupational profiles and content of the occupational field.*

2. *An understanding and analysis, shaping and organization of work processes, providing methodological competencies which are needed and the changes that occur in the occupation.*
3. *An understanding of the object of professional work. Instructors must understand the processes and nature of the work and work environment, not just the subject area.*
4. *An understanding and analysis, shaping and organization of occupation-related learning processes.*
5. *TVET instructor must use their knowledge of the culture, economy and context to develop learning environments which are appropriate for the occupational field.*
6. *TVET instructor must include the definition of educational goals, the selection of appropriate content and methods of teaching.*
7. *Possess the ability to apply appropriate procedures for examination and assessment.*

Dibanding dengan Kurnia dan kompetensi guru vokasi untuk Asean, tampaknya Moris lebih mementingkan pemahaman guru terhadap dinamika dunia kerja yang terkait dengan bidang kejuruan yang diajarkan. Dari 7 kompetensi yang diajukan nomer 6 dan 7 yang terkait dengan proses pembelajaran, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, memilih materi ajar dan metoda pembelajaran serta pola evaluasi yang cocok. Selebihnya, lima kompetensi lain lebih terkait pemahaman guru terhadap dunia kerja.

Apakah standar kompetensi guru yang dimiliki oleh berbagai negara dan yang ditemukan oleh para ahli tersebut berbeda? Menurut saya berbeda tetapi tidak fundamental. Kompetensi pokok seperti kompetensi yang terkait dengan penguasaan materi ajar (*what to teach*), kompetensi yang terkait dengan kemampuan membimbing siswa belajar (*how to teach*) dan kompetensi yang terkait dengan pengembangan keprofesionalan (*how to develop his/her competencies*) selalu ada.

Yang dimaksud materi ajar tentulah bukan sekedar materi yang diajarkan kepada siswa, tetapi juga *advance materials* dan materi lain yang terkait serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah guru harus menerapkan CTL (*contextual teaching and learning*) (Hudson & Whisler, 2010) dan bahkan LBL (*life based learning*) (Staron, 2011). Tentu untuk itu guru harus mampu berpikir kritis dan kreatif sebagaimana dalam konsep Keterampilan Abad 21. Yang dimaksud membimbing siswa belajar tentulah mencakup pemahaman terhadap karakteristik siswa, strategi dan metoda mengajar, pemanfaatan sumber belajar dan asesmen. Yang dimaksud pengembangan keprofesionalan mencakup kemauan dan kemampuan belajar terus, kemampuan membangun hubungan kolegial dengan rekan sejawat maupun stakeholder pendidikan. Untuk itu kemampuan *learning to learn* dan *learning to unlearn* harus dimiliki guru. Demikian juga kemampuan berkomunikasi dan kemampuan berkolaborasi.

Thomas Friedman, penulis buku *The World is Flat* yang sangat terkenal itu, sangat terkesan dengan perkembangan mutu pendidikan di Shanghai karenanya menulis sebuah artikel di *New York Times* berjudul *Shanghai Secret* (Rahasia Shanghai), yang pernah saya kutip di blok pribadi saya muchlassamani.blogspot.com. Di tulisan itu Friedman menjelaskan salah satu faktor yang membuat pendidikan di Shanghai meningkat cepat adalah "*a deep involment of parents in their children learning*", sekolah berkolaborasi dengan guru siswa untuk mendampingi siswa belajar. Konon cara ini yang juga diterapkan di Vietnam sehingga mutu pendidikan di Vietnam sangat bagus walaupun ekonomi negara itu belum baik (IBRD-WB, 2019).

Apakah itu dapat diterapkan di Indonesia? Ternyata bisa. Paparan Puji Lestasi (2023) guru SDN Unggulan Terpadu 2 Kabupaten Tanah Tidung Kalimantan Utara dan Siti Saudah

(2023) guru SDN Lawinu Kabupaten Sumba Timur NTT telah membuktikannya. Kedua guru tersebut mengajar pada SD di daerah pelosok dan berhasil meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, dengan salah satu kuncinya menggandeng orangtua siswa dalam proses pembelajaran. Mereka berhasil meyakinkan orangtua akan pentingnya pendidikan bagi anaknya dan kemudian melibatkan mereka dalam mendampingi anak-anak belajar.

Apa kaitanya dengan kompetensi guru? Belajar dari kisah sukses di Shanghai, Vietnam, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Timur, guru harus mampu bersinergi dengan orangtua dalam mendampingi siswa belajar. Untuk itu memang diperlukan kompetensi sosial sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Lebih dari itu semua, karena guru harus menjadi teladan bagi siswa, maka guru harus memiliki karakter yang baik dan itu tercermin dalam perilaku sehari-hari. Karakter tidak hanya mencakup karakter moral, misalnya jujur, suka menolong dan sebagainya, tetapi juga karakter kerja, seperti kerja disiplin, kerja keras, kreatif dan sebagainya. Dengan karakter seperti itu guru akan menjadi teladan bagi siswa, bahkan bagi orang di sekitarnya. Dalam bahasa yang lain, guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang kuat.

Kompetensi Guru di Era Digital

Era digital telah masuk ke segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Setelah mengalami pandemi covid-19 selama lebih dua tahun, dan pembelajaran dilakukan secara daring, kita baru memahami bahwa teknologi digital dapat membantu pendidikan. Walaupun sebelum pandemi kita sudah biasa naik taksi Gocar atau Grabcar, biasa membeli makanan lewat Gofood atau Grabfood, melakukan video call dengan teman atau kerabat, tetapi tidak banyak guru atau dosen yang terdorong

melaksanakan pembelajaran secara daring. Ketika ada kampus yang menyilahkan dosen melakukan kuliah daring, ternyata tidak banyak yang merespons.

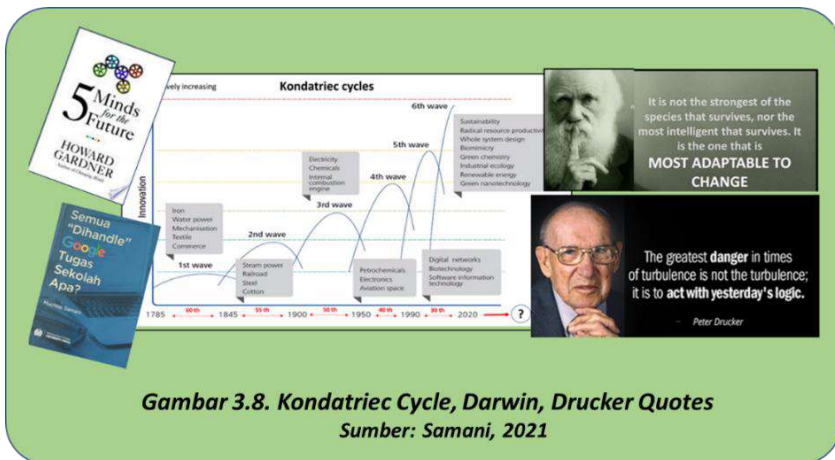
Ketika Pemerintah memutuskan pembelajaran mulai dari TK sampai perguruan tinggi dilaksanakan secara daring, semua pihak kalang kabut. Guru bingung karena belum terbiasa atau bahkan belum pernah melakukan. Siswa juga bingung karena belum terbiasa melakukan. Orangtua juga bingung karena harus menyediakan HP atau komputer atau laptop termasuk bagaimana agar sinyal di rumahnya stabil. Bahkan harus mendampingi anaknya, khususnya bagi yang anaknya masih di SD.

Setelah dua tahun melaksanakan, semua pihak belajar dengan berbagai dinamikanya. Bahwa itu belum sempurna dan terjadi *learning loss* harus diakui. Namun juga harus diakui bahwa selama dua tahun tersebut, kita banyak belajar. Apakah setelah pandemi covid-19 berakhir kita akan kembali ke pola pembelajaran sebelumnya? Saya yakin tidak. Walaupun sebelumnya, kita enggan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran, pengalaman dua tahun melaksanakan pembelajaran daring membuat kita berubah pikiran. Saya yakin guru akan tetap memanfaatkan pola daring dan teknologi digital lainnya untuk mendukung proses pembelajaran.

Diskusi informal dengan rekan dosen dan juga guru saya dapat menyimpulkan bahwa dosen dan mahasiswa telah merasakan manfaat dari pembelajaran daring. Guru dan siswa ternyata juga menikmasi pembelajaran daring. Bahwa tidak semua materi ajar dapat menggunakan pembelajaran daring, pastilah benar. Apalagi yang sifatkan keterampilan psikomotorik. Bahwa penumbuh-kembangan karakter memerlukan kehadiran guru secara tatap muka memang benar. Namun jika kita

membedah kurikulum dan mencermati capaian pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai siswa, kita akan menemukan ada kompetensi yang dapat dipelajari secara daring. Saya menduga pola *blended* atau *hybrid* atau campuran antara daring dan luring akan menjadi pilihan paling tepat di era informasi. Pada bab terdahulu dipaparkan bagaimana contoh bagus dari guru Fisika menggunakan pola tersebut.

Apalagi perkembangan teknologi yg ditunjukkan Kondratieff Cycles ternyata semakin cepat. Sejak beberapa tahun lalu semua informasi sudah ada di Google, sehingga guru bukan lagi menjadi sumber utama informasi. Informasi di internet melimpah (*information overloaded*). Buku cetakan sudah mulai ditinggalkan dan digantikan oleh buku elektronik (*e-book*) yang lebih murah dan mudah dibawa kemana-mana. Kamus yang saat ini sudah digeser oleh Wikipedia dan sangat mungkin sebentar lagi akan digeser oleh ChatGPT. Dengan demikian dapat diduga intensitas pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran akan semakin tinggi.



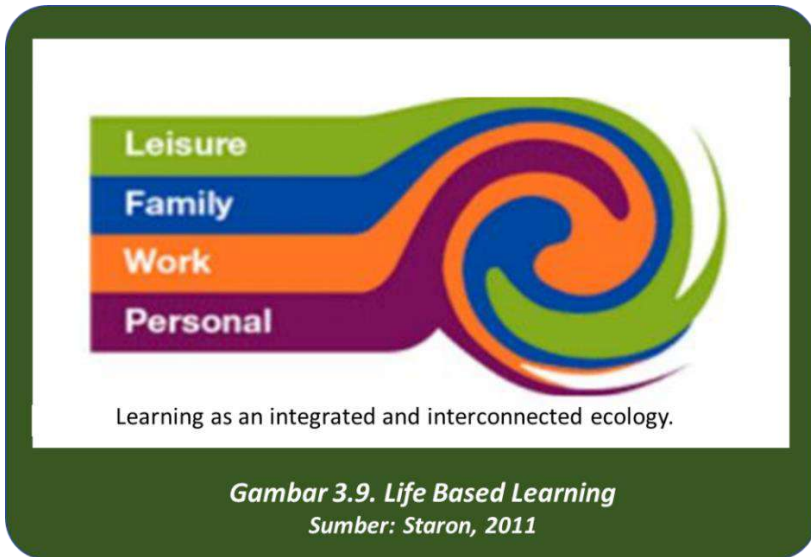
Gambar 3.8. Kondratieff Cycle, Darwin, Drucker Quotes
 Sumber: Samani, 2021

Terkait dengan perubahan, Charles Darwin mengatakan spesies yang dapat bertahan ketika terjadi perubahan bukanlah yang paling kuat atau paling cerdas, tetapi mereka yang dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sementara itu, untuk menghadapi perubahan yang turbolensi seperti saat ini, Peter Drucker menasehati agar kita tidak menggunakan logika kemarin, karena tidak cocok lagi. Kita harus melakukan antisipasi perkembangan ke depan dan untuk itu harus menggunakan logika baru. Logika yang cocok dengan era teknologi digital. Dengan demikian kompetensi guru di masa lalu perlu disempurnakan agar cocok dengan kemajuan teknologi, khususnya era informasi.

Jika memanfaatkan teknologi digital telah membudaya, didukung oleh karakteristik generasi Z yang *digital native*, dan sumber informasi di dunia maya terus melimpah, maka *Digital Based Learning* (pembelajaran berbasis teknologi digital) merupakan sebuah keniscayaan. Wang dan Kang (2006) sudah memikirkan itu sekitar 17 tahun lalu dan menyebutnya dengan istilah *cybergogy*. Pada saat itu siswa akan menggali data dan informasi dari berbagai sumber dan dunia maya akan menjadi salah satu andalan. Bahkan sebelum Charles Handy (1997), nanti tugas guru adalah mendampingi murid bagaimana menggali informasi secara efektif dan menggunakannya dalam kehidupan.

Untuk membantu siswa dapat melihat dan bahkan berinteraksi dengan situasi yang sulit dilakukan secara langsung, kini telah mulai dikembangkan teknologi *Vitual Reality* (VR) dan *Augmented Reality* (AR) yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia vitual yang sering disebut Metaverse (Bonafix dan Nediari, 2022); Zonaphan, 2022). Dengan teknologi tersebut siswa yang berada di dalam kelas dapat masuk ke “alam virtual” sehingga serasa berada di kedalaman laut dan mencermati berbagai ikan maupun karang.

Lantas apa kemampuan yang harus dimiliki oleh guru di era digital? Maksudnya kemampuan khusus yang mungkin belum begitu penting bagi guru di masa lalu. Yang jelas guru harus familiar dengan internet dan dunia maya lainnya. Guru harus mampu melacak sumber informasi yang ada di dunia maya. Karena pada umumnya guru bukanlah *digital native*, maka mereka perlu melakukan upaya khusus untuk menguasai kemampuan tersebut. Lebih dari itu, karena harus membimbing siswa menggunakan informasi yang didapat untuk memecahkan masalah kehidupan, sementara masalah kehidupan akan selalu multidisiplin, sehingga guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep *life based learning* (Staron, 2011). Untuk itu mau tidak mau guru harus memiliki kemampuan dan kebiasaan berpikir transdisiplin, guru harus terbiasa mengandengkan materi ajar dengan bidang ilmu lain. Bukankah tidak ada masalah kehidupan yang ahnya terkait satu bidang ilmu (satu matapelajaran). Untuk berbelanja sayuran ke pasar, diperlukan kemampuan dalam bidang Biologi dan atau Gizi, Ekonomi, Matematika dan bahkan Bahasa Indonesia/Daerah untuk berkomunikasi.



Oleh karena itu, seperti dinasehatkan oleh Gardner (2008) guru harus dapat bergeser dari pola pikir *disciplined mind* ke *synthesizing mind* ke *creative mind* ke *respectful mind* dan akhirnya ke *ethical mind*. Guru tidak hanya harus berpikir transdisiplin semata, tetapi harus kreatif, menghargai orang yang berbeda pendapat dan ketika memandu siswa memecahkan masalah harus mempertimbangkan etika dan norma kehidupan yang berlaku. Di era digital ini guru harus benar-benar menjadi pebelajar sejati, karena mereka sekolah/kuliah di masa lalu, harus mengajar di masa sekarang, tetapi berharap apa yang diajarkan dapat digunakan oleh muridnya di masa depan. Pesan Dr. (HC) Ir. Abdulkadir Baraja, pendiri Sekolah Al Hikmah yaitu “hanya guru yang terus belajar yang boleh mengajar”, rasanya cocok untuk modal guru di era digital. Bukankah itu prinsip life long learning, belajar mulai di buaian sampai menjelang masuk liang lahat.

BAGAIMANA MENYIAPKAN CALON GURU YANG PROFESIONAL?

Jika kita yakin faktor guru sangat penting dalam proses pendidikan dan kita sudah tahu kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru profesional, pertanyaan berikutnya bagaimana menyiapkan calon guru yang baik. Menyiapkan calon guru atau dengan istilah yang lebih lazim, mendidik calon guru sangat penting agar sekolah mendapatkan guru baru yang memiliki kompetensi yang baik, karakter yang bagus serta memiliki komitmen kerja yang tinggi dalam mendidik siswa. Oleh karena itu negara yang memiliki pola pendidikan guru yang baik biasanya juga memiliki kualitas pendidikan yang baik pula. Dengan pola pendidikan guru yang baik, akan dihasilkan guru-guru dengan kompetensi tinggi dan komitmen kerja yang bagus, sehingga dapat membimbing anak didiknya dengan baik dan ujungnya hasil pendidikannya juga baik. Salah satu negara yang banyak disebut memiliki pendidikan guru yang baik adalah Finlandia (Sahlberg, 2011). Akhir-akhir ini pendidikan guru di Singapore juga banyak disebut sebagai pendidikan guru yang sangat baik (Liu, 2022).

Sejarah Pendidikan Guru di Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendidik calon guru. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan calon guru dilaksanakan oleh *Kweekschool*. Menurut beberapa sumber, *Kweekschool* pertama didirikan di Ambon pada tahun 1819, kemudian disusul di Minahasa pada tahun 1829. Setelah itu *Kweekschool* berdiri di berbagai daerah. Dalam perkembangannya *Kweekschool* terdiri dari HIK (*Holandsche Indische Kweekshool*) untuk menghasilkan guru bantu bagi sekolah rendah di pedesaan dan HKS (*Hoogere Kweek School*) atau sekolah guru atas yang hanya ada di kota-kota besar. HIK dan HKS menggunakan

pengantar bahasa Melayu, bahkan yang berada di Jawa ada yang menggunakan pengantar bahasa Jawa. Di samping itu ada EKS (*Europeesche Kweek School*) yang menggunakan pengantar bahasa Belanda. Juga ada HCK (*Hollandsche Chineesche Kweekschool*) untuk masyarakat Tionghoa, dan juga ada *Katholieke Kweek School*.



Pada awal kemerdekaan Indonesia mendirikan KPKPKG (Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kuajiban Belajar) yang kemudian ditingkatkan menjadi SGB (Sekolah Guru B) setingkat SMP untuk menghasilkan guru SD. Pada perkembangannya SGB ditingkatkan lagi menjadi SGA (Sekolah Guru A) setingkat SMA. SGA inilah yang kemudian berganti nama menjadi SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Untuk guru SMP dilaksanakan melalui Program B-I, sedangkan untuk guru SMA melalui Program B-II. Program B-I setara dengan PGSLTP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama) sedangkan Program

B-II setara dengan PGSLTA (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas).



Ada masa pendidikan di SGB dan SGA berikatan dinas dan bahkan berasrama. Pola itu ternyata mampu menarik anak muda cerdas untuk menjadi guru. Persaingan masuk juga sangat ketat. Konon Dr. (HC) Ir. Abudulkadir Baraja, pensiunan dosen ITS dan pendiri Sekolah Al Hikmah Surabaya, ketika lulus SMP mendaftar ke SGA tetapi tidak diterima dan akhirnya masuk “SMA Kompleks” (sekarang menjadi SMA 1,2,5 dan 9 Surabaya) yang merupakan 4 SMA negeri favorit di Surabaya), kemudian masuk ITS dan menjadi dosen ITS. Jadi pada masa itu persaingan masuk SGA lebih ketat dibanding masuk SMA favorit. Oleh karena itu tidak heran jika kemudian SGB dan SGA menghasilkan guru-guru yang kompeten dan beberapa diantara menjadi tokoh pendidikan di tingkat

nasional, misalnya almarhum Prof Rakajoni dan almarhum Prof Tilaar.

Menurut Prof. Dr. IGN Wardani, saat di asrama, pendidikan karakter sangat diperhatikan. Bahkan cara berpakaian, cara makan, cara berbicara dan perilaku keseharian lainnya menjadi bagian dari pendidikan asrama. Oleh karena itu, perilaku siswa SGB/SGA saat itu sangat berbeda dengan siswa lainnya. Orang dengan mudah mengenali jika siswa SGB/SGA jika mereka bertemu. Intinya perilaku sebagai guru telah ditumbuhkan selama mereka di asrama.

Di samping untuk menarik calon guru yang pandai, ikatan dinas juga sebagai wahana menempatkan guru baru di daerah yang kekuarangan guru. Sebagaimana diketahui ketidakmerataan guru merupakan masalah pelik yang sampai saat ini belum terpecahkan. Banyak sekolah di perkotaan yang kelebihan guru, sebaliknya sangat banyak sekolah di pedesaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang sangat kekurangan guru. Ketika mengunjungi mahasiswa yang melaksanakan program SM3T (Sarjana Mengajar di Daerah 3T), ada SD dengan 6 rombongan belajar tetapi hanya memiliki 1 atau 2 orang guru. Ketika Pemerintah Daerah memiliki formasi pengangkatan guru di daerah seperti itu ternyata tidak ada yang melamar. Memindahkan guru yang saat ini mengajar di perkotaan ke daerah 3T ternyata juga tidak mudah. Bahkan guru yang bertugas di daerah 3T, banyak yang ingin pindah mengajar di daerah perkotaan. Mungkin sekali itu yang mengilhami para perumus Undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang pada pasal 23 ayat (1) mengamanatkan agar Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama. Dengan pola ikatan dinas, lulusan dapat ditempatkan di sekolah yang kekurangan guru, dengan diasrama pembinaan calon guru akan sangat efektif.

Dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi guru, pendidikan guru SD ditingkatkan menjadi D2, sedangkan guru SMP dan SMA/SMK ditingkatkan menjadi S1. Bahkan kemudian semua guru diwajibkan berpendidikan S1. Pada saat itu SPG “berubah” D2 dan kemudian menjadi program studi S1 PGSD di LPTK. Dengan terbitnya UUGD, diamanatkan untuk menjadi guru tidak cukup hanya berpendidikan S1, tetapi harus memiliki sertifikat pendidikan yang diperoleh dari pendidikan profesi yang disebut PPG (Pendidikan Profesi Guru). Profesi guru disejajarkan dengan profesi dokter, akuntan dan psikolog, sehingga setelah lulus S1 seseorang yang harus menempuh PPG lebih dahulu sebelum bekerja menjadi guru.

Pendidikan Profesi Guru

Pasal 8 UUGD menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah (PP) No. 74/2008, pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. Itulah yang menjadi dasar pelaksanaan PPG.

UUGD menuntut guru memiliki sertifikat pendidik, baik guru baru maupun guru yang sudah melaksanakan tugas di sekolah. Itulah sebabnya ada dua jenis PPG, yaitu dan PPG Pra Jabatan bagi calon guru, sehingga ketika mulai mengajar sudah memiliki sertifikat pendidik dan PPG Dalam Jabatan bagi guru yang sudah melaksanakan tugasnya di sekolah/madrasah. Di kemudian hari ternyata PPG Dalam Jabatan ini yang menjadi masalah, karena tidak kunjung tuntas. Bahkan sampai tahun 2023

masih banyak guru dalam jabatan belum memiliki sertifikat pendidik karena belum mendapat kesempatan mengikuti PPG Dalam Jabatan.

Ketika mulai merancang PPG, khususnya PPG Dalam Jabatan, muncul pertanyaan bagaimana jika para guru tidak dapat mengajar dalam waktu cukup lama, karena meninggalkan sekolah untuk mengikuti PPG. Disamping itu, mereka sudah berpengalaman mengajar sehingga diasumsikan telah memiliki kompetensi memadai.

Karena itu dimunculkan program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Permendiknas No. 18 Tahun 2007. Dalam Permendiknas tersebut disebutkan sertifikasi guru dilakukan melalui portofolio yang mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Jika lulus dalam penilaian portofolio peserta mendapatkan sertifikat pendidik. Kalau tidak lulus diharuskan mengikuti PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). PLPG dilaksanakan selama 90 jam pelatihan dan jika lulus PLPG peserta mendapatkan sertifikat pendidik. Dalam perkembangannya banyak dokumen portofolio yang diragukan validitasnya dan sulit diverifikasi. Akhirnya melalui Permendikbud No. 10 Tahun 2009, pola portofolio dihapus dan semua peserta sertifikasi guru dalam jabatan diharuskan mengikuti PLPG. Secara periodik pelaksanaan PLPG dievaluasi dan disempurnakan, terakhir melalui Permendikbud No. 29 Tahun 2016.

Pasal 82 ayat (2) UUGD menyebutkan bahwa guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun. Karena UUGD terbit pada 30 Desember 2005, semua guru dalam jabatan seharusnya sudah memiliki sertifikat pendidik pada akhir Desember 2015. Karena itu melalui Permendikbud No. 37 Tahun 2017, Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui PLPG dihentikan. Namun demikian ternyata masih banyak guru yang belum mendapat kesempatan mengikuti PLPG? Saat naskah ini ditulis, data di Kemdikbud saat PLPG jumlahnya 1,6 juta orang guru yang belum mendapat kesempatan menempuh PPG Dalam Jabatan.

Mengapa demikian? Bukankah UUGD sudah mengamanatkan harus selesai dalam waktu 10 tahun? Belum pernah ada penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. Namun ada dugaan itu terkait dengan ketersediaan dana. Bukan dana untuk pelaksanaan PLPG tetapi dana untuk tunjangan profesi bagi peserta setelah lulus dan mendapatkan tunjangan profesi. Konon untuk setiap 1.000 orang guru ikut Sertifikasi Guru, baik PLPG maupun PPG, pada tahun berikutnya perlu disediakan dana untuk tunjangan profesi sebesar $1.000 \times 12 \times 3$ juta atau 36 milyar rupiah. Jadi kalau dalam 1 tahun dilaksanakan PLPG dengan peserta 100.000 orang, berarti mulai tahun berikutnya harus disediakan dana sekitar 3,6 trilyun rupiah setiap tahun. Jumlah yang cukup besar untuk disediakan APBN untuk ditambahkan pada anggaran pendidikan. Pada hal dengan jumlah guru 3,3 juta, jika ingin tuntas dalam waktu 10 tahun berarti per tahun 330.000 orang/tahun. Jika perhitungan itu dilaksanakan dengan konsisten, maka mulai tahun 2006 setiap tahun pemerintah harus menyediakan tambahan anggaran untuk tunjangan profesi guru sebesar $330.000 \times 12 \times 3$ juta rupiah 11,8 trilyun rupiah. Tampaknya tambahan anggaran itulah yang berat bagi pemerintah, sehingga jumlah peserta PPG Dalam Jabatan tidak

pernah mencapai angka tersebut. Akibatnya sampai masa transisi habis (10 tahun sejak UU 14/2005 terbit) PPG Dalam Jabatan belum dapat tuntas.



Ketika merancang PPG Dalam Jabatan untuk menggantikan PLPG, pemikiran bahwa guru tidak boleh meninggalkan sekolah terlalu lama tetap menjadi pertimbangan. Oleh karena itu diterapkan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) terhadap pengalaman mengajar mereka. Berapa sks penghargaan terhadap RPL tersebut ternyata berubah dari waktu ke waktu, antara 12 s.d 24 sks. Sementara beban sks program PPG 36-40 sks. Jika sks yang diperoleh melalui RPL sebesar 12 sks berarti mahasiswa wajib menempu perkuliahan 24 sks, sebaliknya jika sks yang diperoleh melalui RPL sebesar 24 sks, berarti mahasiswa hanya menempuh 12 sks.

Bagaimana dengan PPG Prajabatan? Karena PPG merupakan program baru, tampaknya Kemendikbud perlu menemukan model yang paling tepat. Oleh karena itu dilakukan beberapa model sebagai bentuk uji coba. Sampai naskah ini selesai ditulis ada enam model PPG Prajabatan yang pernah dilaksanakan, yaitu PPG PGSD Berbeasiswa dan Berasrama, PPG Basic Science, PPG Terintegrasi, PPG Kolaboratif, PPG SM3T dan PPG Bersubsidi¹. Sepertinya belum Keputusan model mana yang nantinya akan menjadi model baku.

1. PPG PGSD Berbeasiswa dan Berasrama

Program ini mengambil lulusan SLTA dengan masa studi 4,5 tahun, dengan pola konkuren yaitu menyambung S-1 dengan PPG. Program ini dirancang untuk menemukan model agar setelah lulus PPG, peserta kembali dan mengisi kekurangan guru SD di daerahnya. Oleh karena itu, peserta diambil dari daerah dan menandatangani surat perjanjian (kontrak) dengan Pemerintah Kabupaten bahwa setelah lulus akan kembali dan mengajar di daerahnya. Sayangnya program PPG PGSD Berasrama tidak didukung dengan kesepakatan tertulis yang melibatkan KemenpanRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga harapan lulusan dapat langsung diangkat menjadi guru PNS atau paling tidak mendapat prioritas menjadi guru PNS di daerahnya tidak terjadi. Lulusan harus mengikuti seleksi umum bersama dengan calon lain dan seringkali tidak segera ada formasinya. Akibatnya banyak lulusan program ini yang kemudian mengajar atau bekerja di tempat lain dan tidak mau meninggalkan pekerjaannya ketika ada formasi.

¹ *Sebagian uraian ini telah dimuat pada buku "Mencari Model PPG untuk Indonesia" (Editor: Muchlas Samani).*

2. PPG Basic Science

PPG *Basic Science* dirancang untuk mengisi guru MIPA yang biasanya kurang di daerah. Peserta diambil dari lulusan SLTA daerah yang kekurangan guru MIPA, kemudian mengikuti program S-1 pada prodi MIPA murni di universitas non-LPTK dan dilanjutkan dengan PPG selama dua semester di LPTK.

Seperti PPG PGSD berasrama, PPG *Basic Science* juga berasrama dan berbeasiswa penuh, sehingga mahasiswa tidak membayar, bahkan mendapatkan biaya hidup. Sama dengan PPG PGSD, problem pengangkatan lulusan PPG *Basic Science* juga terjadi. Artinya lulusan tidak dapat otomatis atau diprioritaskan menjadi guru di daerah asal, sehingga harus mengikuti seleksi seperti calon guru pada umumnya.

3. PPG Terintegrasi (dengan Kewenangan Ganda)

PPG Terintegrasi dirancang untuk mengatasi kekurangan guru di daerah 3T. Untuk guru SD dengan kewenangan mengajar di SMP dan guru SMK dengan kewenangan tambahan di luar bidang keahlian pokoknya. Peserta diambil dari daerah 3T dengan harapan dapat kembali setelah lulus untuk mengisi kekurangan guru di daerah asalnya. Berdasar dari pengalaman pada PPG PGSD Berbeasiswa-Berasrama dan PPG *Basic Science*, pada PPG Terintegrasi tes masuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah (dengan panduan dari Ditjen Dikti), dengan maksud agar Pemerintah Daerah merasa memiliki peserta, sehingga memperlancar pemanfaatan saat mereka sudah lulus.

Kurikulum PPG Terintegrasi untuk guru SD selama sembilan semester, mirip dengan PPG PGSD Berasrama, sedangkan untuk PPG Terintegrasi untuk guru SMK selama sepuluh semester. Dampak dari seleksi yang kurang ketat, proses awal perkuliahan kurang lancar. Namun karena program dimulai dari S-1, masih ada waktu untuk pembinaan yang cukup. Apalagi mereka tinggal di asrama. Dari testimoni beberapa peserta, mereka langsung

diangkat menjadi guru di daerahnya setelah lulus. Diduga karena Pemerintah Daerah yang melakukan seleksi dan daerah 3T memang benar-benar kekurangan guru, maka mereka dianggap kiriman daerah, sehingga segera diangkat setelah lulus.

4. PPG Kolaboratif

PPG Kolaboratif dirancang untuk menyiapkan guru SMK Program Keahlian yang tidak ada di LPTK, misalnya Pertambangan, Pertanian, Pelayaran, dan sebagainya. Peserta diambil dari lulusan S-1 atau D-4 non-kependidikan yang relevan. Program dilaksanakan secara kolaboratif antara LPTK dengan universitas/politeknik/lembaga pendidikan yang cocok dengan program keahlian yang dipelajari mahasiswa.

Karena peserta adalah lulusan perguruan tinggi non-LPTK, kepada mahasiswa diberikan pendalaman materi, khususnya yang terkait teori pembelajaran. Komponen kurikulum terdiri dari Pendalaman Materi, Pengembangan Perangkat, dan PPL dengan bobot 20 : 40 : 40. Jumlah peserta program ini tidak banyak dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan SMK yang memerlukan, sehingga lulusannya langsung ditempatkan di sekolah yang membutuhkan.



5. PPG SM3T

PPG SM3T diikuti sarjana (S-1) yang sebelumnya telah mengabdikan di daerah 3T selama satu tahun penuh dan berhasil dengan baik. Jadi pengalaman mengajar selama satu tahun di daerah 3T merupakan bagian dari seleksi masuk PPG. PPG SM3T memiliki tujuan ganda, yaitu: (a) mengenalkan peserta yang umumnya berasal di daerah perkotaan terhadap kondisi sekolah dan masyarakat di daerah 3T, dengan harapan setelah lulus bersedia mengajar di daerah 3T yang memerlukan guru; (b) mengisi kekurangan guru di daerah 3T, walaupun bersifat sementara. Diupayakan setiap tahun ada peserta yang mengabdikan di daerah tertentu, dengan cara mengirim peserta baru, ketika peserta lama telah selesai pengabdianannya. (c) menjadi “kawah candradimuka” bagi calon guru, dengan bertugas di sekolah di daerah 3T yang “serba-kekurangan”, diharapkan muncul kreativitas untuk mengatasi berbagai problem tersebut. (d) ikut mengembangkan rasa ke-Indonesiaan, dengan cara menempatkan peserta secara silang. Misalnya peserta dari Sumatra ditempatkan di Maluku, sebaliknya peserta dari NTT ditempatkan di Aceh, agar mereka mengenal daerah yang berbeda budayanya.

Pada awal program, tidak ada rancangan khusus bagaimana penempatan lulusan PPG SM3T. Pendidikan guru berikatan dinas dan berasrama yang diamanatkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga belum diterapkan, walaupun dalam praktiknya mahasiswa diasrama, bebas SPP dan mendapatkan biaya hidup saat kuliah. Dengan pengalaman “menikmati” mengajar di daerah 3T, diharapkan mereka akan kembali ke daerah tersebut setelah lulus. Daerah setempat diharapkan juga merekrut mereka setelah lulus, karena memang kekurangan guru dan sudah mengenal calonnya. Namun ketika ada program Guru Garis Depan (GGD) yaitu pengangkatan guru di daerah 3T, ternyata tidak semua lulusan PPG SM3T mendaftar, karena sudah mendapatkan pekerjaan. Sangat mungkin karena selang waktu

antara kelulusan PPG SM3T dan GGD cukup lama, sehingga lulusan sudah lebih dahulu mendapat pekerjaan di tempat lain.

6. PPG Bersubsidi

PPG Bersubsidi dirancang dengan argumentasi tidak boleh mengirim guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, termasuk ke daerah 3T. Oleh karena itu, mereka harus mengikuti PPG lebih dahulu, baru dikirim ke daerah 3T. Dengan alasan untuk efisiensi anggaran yang terbatas, mahasiswa tidak diberi berbeasiswa penuh, tetapi hanya diberikan subsidi untuk membayar UKT, sedangkan untuk biaya hidup dan lainnya mahasiswa harus menanggung sendiri.

Karena berbagai hal, pengiriman peserta ke daerah 3T setelah mereka lulus tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula tidak dirancang bagaimana penempatan mereka setelah lulus, sehingga pada akhirnya mereka mencari pekerjaan sendiri-sendiri. Pada umumnya mereka mencari tempat mengajar di daerahnya masing-masing, baik sebagai guru tetap maupun guru honorer. Namun, karena sudah memiliki sertifikat pendidikan, maka mereka akan langsung mendapatkan tunjangan profesi ketika jumlah jam mengajarnya memenuhi syarat.

Pada saat naskah ini ditulis mulai dirintis PPG Mandiri, artinya mahasiswa membiayai diri sendiri, baik untuk membayar uang kuliah, biaya hidup dan biaya lainnya. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan secara terpusat tetapi calon mahasiswa dapat memiliki universitas penyelenggara PPG. Belum diperoleh data bagaimana antusiasme lulusan S1 untuk mengikutinya, bagaimana proses perkuliahan dan bagaimana cara lulusannya untuk mendapatkan tempat mengajar.

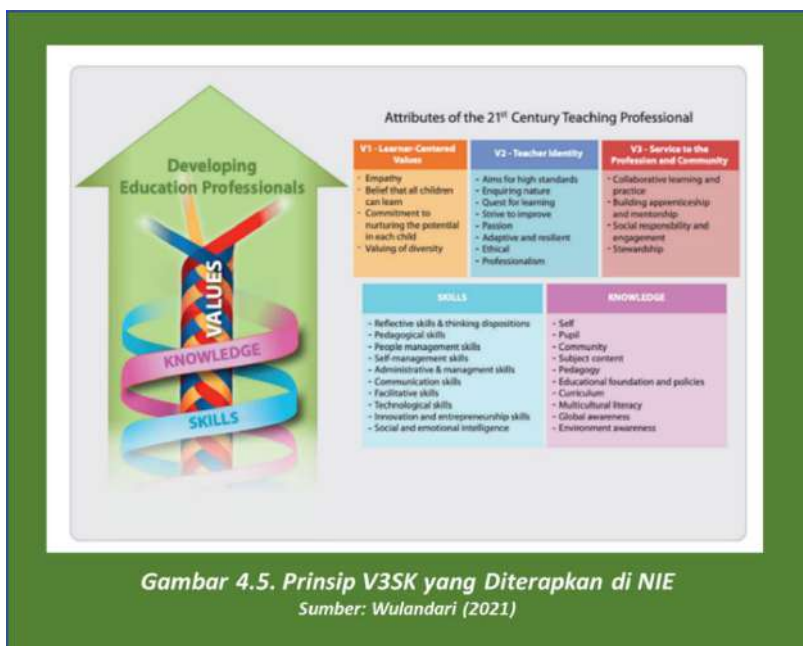
Pendidikan Guru di Negara Lain

Bagaimana pendidikan guru di negara lain? Pertama, mari kita melihat pendidikan guru di negara tertangga, yaitu Singapore. Akhir-akhir ini pendidikan guru di Singapore mendapat perhatian dari berbagai negara karena dinilai dapat menyiapkan guru yang baik. Mungkin karena negara kecil, Singapore hanya memiliki satu lembaga pendidikan guru, yaitu NIE (*National Institute of Education*) yang merupakan institut otonom dari NTU (*Nanyang Technological University*). QS world ranking menempatkan NTU merupakan uinversitas peringkat ke 11 di dunia, sementara NIE merupakan universitas kependidikan penghasil guru peringkat nomer 2 di dunia (Wulandari, 2021). NIE bahkan tidak hanya menangani pendidikan pra jabatan tetapi juga menangani pendidikan dalam jabatan bagi guru-guru di Singapore. Jadi NIE juga melaksanakan pembinaan guru yang telah bekerja atau istilah kerennya CPD (*continuous professional development*).

Sejak awal, pemerintah Singapore menganggap guru sebagai profesi berdedikasi dan membanggakan (*a proud and dedicated profession*) (Liu, 2022). Guru difahami bukan sekedar sebagai pekerjaan tetapi suatu keahlian, oleh karena itu diperlukan pendidikan calon guru yang sangat baik. Singapore tidak percaya kepada ungkapan bahwa setiap orang yang terdidik dapat menjadi guru. Guru harus dipersiapkan melalui pendidikan setingkat universitas yang memang dikhususkan untuk menghasilkan calon guru (*university-based teacher education*). Dengan cara itu yang akan dihasilkan guru yang mampu berpikir kritis sekaligus bersikap adaptif (*critical thinker and adaptive teachers*) (Liu, 2022).

Untuk dapat menghasilkan guru yang bermutu, Singapore menerapkan prinsip rekrutmen calon guru dilaksanakan secara ketat, proses pembelajaran dilaksanakan dengan baik dan setelah menjadi guru dilakukan pengembangan diri secara kontinyu.

Dalam seleksi hanya lulusan *junior college* (pendidikan setingkat SMA) yang termasuk sepertiga terbaik yang boleh melamar ke NIE dan itupun masih harus melalui seleksi bertahap termasuk portofolio dan wawancara untuk memastikan pelamar memiliki bakat dan minat sungguh-sungguh untuk menjadi guru. Untuk mendorong anak muda tertarik menjadi guru, Singapore memberi gaji guru sangat baik. Guru baru menerima gaji setara dengan insinyur dan akuntan yang sama-sama baru mulai bekerja. Di samping itu, selama menempuh pendidikan di NIE, mahasiswa menerima beasiswa setara dengan 60% gaji guru baru (Wulandari, 2021).



Pendidikan guru di NIE bertolak dari konsep dasar V3SK, yaitu tiga bentuk *Value* (nilai), *Skills* (keterampilan) dan *Knowledge* (pengetahuan) (Liu, 2022). Tiga nilai tersebut adalah (1) *learner centered values* yaitu keyakinan bahwa pendidikan harus berpusat

pada siswa, yang mencakup: (a) berempati kepada siswa, (b) semua siswa dapat belajar dengan baik, (c) berkomitmen mengembangkan potensi setiap siswa, dan (d) menghargai perbedaan setiap siswa; (2) *teacher identity* yaitu karakteristik khas yang harus dimiliki guru, yaitu: (a) berusaha mencapai standar yang tinggi, (b) mempertanyakan fenomena yang dijumpai, (c) mencari sesuatu yang ingin dipelajari, (d) berusaha agar lebih baik, (e) bergairah, (f) ulet dan adaptif, (g) beretika, dan (h) profesional; (3) mengabdikan pada profesi dan masyarakat yang mencakup: (a) mempraktikkan pembelajaran kolaboratif, (b) melakukan magang dan pembimbingan, (c) terlibat dan bertanggungjawab dalam kegiatan sosial, (d) melayani.

Skills (keterampilan) guru yang ditumbuhkembangkan di NIE mencakup keterampilan-keterampilan: (1) berpikir reflektif dan terstruktur, (2) pedagogis, (3) manajemen diri, (4) manajemen sumberdaya manusia, (5) mengatur administrasi, (6) berkomunikasi, (7) fasilitatif, (8) teknologis, (9) inovasi dan kewirausahaan, serta (10) menerapkan intelegensi sosial dan emosional. Sedangkan *knowledge* (pengetahuan) yang dikembangkan mencakup pengetahuan tentang: (1) diri sendiri, (2) siswa, (3) masyarakat, (4) konten bidang studi, (5) pedagogi, (6) landasan pendidikan dan kebijakan, (7) kurikulum, (8) literasi multikultural, (9) kesadaran globalisasi, dan (10) kesadaran lingkungan.

Pola pembelajaran di NIE mengintegrasikan teori dan praktik. Teori yang dikembangkan oleh para dosen dipadukan dengan pengalaman lapangan yang dialami oleh para guru. Untuk itu guru berpengalaman diundang untuk menjadi partner memberi kuliah di NIE. Untuk memantapkan pola tersebut, sejak tahun pertama mahasiswa S1 di NIE diwajibkan mengikuti program “ke sekolah”. Pada tahun pertama, mahasiswa diwajibkan mengikuti program *School Experience* (pengalaman

sekolah) selama 1 minggu dengan tugas melakukan observasi berbagai kegiatan di sekolah, khususnya yang terkait dengan proses pembelajaran. Setelah itu mahasiswa harus membuat laporan reflektif terhadap hasil observasi tersebut.

Pada tahun kedua, mahasiswa menjalani program *Teaching Assistantship (TA)* (semacam magang) selama 5 minggu di sekolah. Selama waktu tersebut mahasiswa membantu menyusun RPP, mengelola kelas, membantu mengajar dan bahkan mulai mengajar dengan disampingi guru mentornya. Pada tahun ketiga, mahasiswa melaksanakan program *Teaching Practice-1 (TP-1)* (semacam PPL-Praktik Pengalaman Lapangan) selama 5 minggu. Selama itu mahasiswa belajar mengajar secara mandiri, setelah membuat RPP dan perlengkapan pendukungnya. Selama itu mahasiswa berkonsultasi dengan guru mentor tetapi mengajar di kelas secara mandiri.

Pada tahun ke-empat mahasiswa melaksanakan program *Teaching Practice-2 (TP-2)* selama 10 minggu. Pada dasarnya TP-2 merupakan kelanjutan TP-1, namun di samping mengajar secara mandiri, mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan sekolah lainnya, misalnya kegiatan ekstra kurikuler, administrasi sekolah, pengelolaan perpustakaan dan sebagainya. Dengan demikian dalam TP-2 mahasiswa mendapatkan pengalaman secara utuh, yang kemudian dituliskan secara utuh dan reflektif dalam laporan.

Di samping pola tersebut, NIE juga menyelenggarakan program PGDE (*Post Graduate Diploma of Education*) bagi mereka yang telah memiliki ijazah S1. Program PGDE berlangsung selama 16 bulan dan berisi perkuliahan tentang pendidikan dan pembelajaran dan praktik mengajar (*teaching practice*). Sebelum masuk, calon mahasiswa PGDE diharuskan sudah mengajar minimal satu semester dan rekomendasi dari kepala sekolah tempat mengajar menjadi pertimbangan penting diterima atau

tidak yang bersangkutan di PGDE. Tampaknya persyaratan tersebut sebagai “tes” apakah yang bersangkutan memang cocok sebagai guru.

Negara lain yang juga dikenal memiliki pendidikan guru bagus adalah Finlandia. Menurut Sahlberg (2011) rasio pendaftar dan yang diterima di *Department of Teacher Education* pada delapan universitas di Finlandia rata-rata 10 : 1. Pada hal pelamarnya rata-rata lulusan terbaik di sekolahnya, karena menjadi guru menjadi idaman bagi anak muda di Finlandia. Profesi guru di Finlandia disejajarkan dengan dokter, insinyur dan akuntan. Berarti pendidikan guru di Finlandia memiliki bibit-bibit yang bagus.

Menarik untuk didiskusikan mengapa profesi guru di Finlandia sangat bergengsi, sehingga banyak lulusan sekolah setingkat SMA ingin menjadi guru. Memang gaji guru di Finlandia cukup baik. Namun ternyata gaji bukanlah “magnet utama” yang menarik anak muda menjadi guru. Anak muda di Finlandia menganggap guru adalah profesi yang mulia karena membantu anak didik merancang masa depan. Di samping itu guru dianggap profesi yang independen karena guru dapat menentukan sendiri apa yang harus dikerjakan. Di Finlandia, guru memiliki kewenangan merancang sendiri kurikulum dan pola pembelajaran yang akan dilakukan, karena merekalah yang diyakini paling faham kebutuhan muridnya. Pola pengawasan dari Kementerian atau Dinas Pendidikan tidak ada. Paling jauh, hanya memberikan panduan bagaimana menyusun kurikulum, pembelajaran dan evaluasi yang baik.

Guru di Finlandia berkualifikasi S2, kecuali untuk kindergarten (pra sekolah/TK). Di samping itu, pendidikan guru di Finlandia berbasis riset (*research based*), artinya mahasiswa harus melakukan riset dan menyusun tesis yang mengintegrasikan

teori-teori pendidikan, mater ajar yang menjadi keahliannya, strategi mengajarkan materi tersebut (*subject specific pedagogy*) dan metoda penelitian. Pengalaman melakukan riset tersebut akan menjadi modal sangat penting ketika sudah lulus dan menjadi guru, khususnya dalam melakukan upaya meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Kemampuan riset ternyata juga menjadi modal sangat penting ketika yang bersangkutan sudah menjadi guru dan harus melaksanakan CPD (*continuous professional development*).

Tabel 4.1. Kurikulum Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Salah Satu Universitas di Finlandia Sumber: Sahlberg, 2010

Curriculum Component	European Credit Transfer and Accumulation System Credit
Basic Education*)	25
Language and Communication Skills	25
Intermediate Studies in Education*)	35
Multidisciplinary School Subject Studies	60
Minor Subject Studies	60
Advanced Studies in Education**)	80
Elective Studies	15
Total European Credit Transfer and Accumulation Credits.	300

**) Including 12 ECTS credits from teaching practice*

****) Including 16 ECTS credits from teaching practice*

Kurikulum tersebut telah sesuai dengan *The European Higher Education Area* (EHEA). Kurikulum dirancang agar mengikuti alur spirial antara pengetahuan-teori, pelatihan praktik dan penelitian. Dengan pola spirial pengalaman belajar mahasiswa akan secara bertahap mendapat penguatan. Tabel 4.1.

menunjukkan kurikulum Pendidikan Guru Sekolah Dasar di salah satu universitas di Finlandia.

Kurikulum tersebut dirancang untuk menyeimbangkan antara pengetahuan dengan keterampilan dan antara teori dengan praktik. Dirancang untuk memberi wawasan profesional, sehingga setelah lulus dapat bekerja (mengajar) secara mandiri dan lebih dari itu dapat mengembangkan keprofesionalannya. Oleh karena itu dalam perkuliahan banyak dilakukan analisis dari pembelajaran, baik kasus sehari-hari maupun hasil penelitian. Untuk tesis, riset diarahkan untuk memecahkan problema pembelajaran yang banyak terjadi di lapangan. Mahasiswa Pendidikan Guru SD menghabiskan sekitar 15% waktu kuliahnya di sekolah, sedangkan untuk calon Guru Matapelajaran sekitar sepertiga dari kurikulum yang ditempuh.

Selama di sekolah mahasiswa calon guru melakukan tiga tahap praktik (semacam PPL), yaitu PPL Dasar (*basic practice*), PPL Lanjutan (*advanced practices*), dan PPL Akhir (*final practice*). Pada PPL Dasar, mahasiswa melakukan observasi terhadap pembelajaran yang diasuh oleh guru mentor dan kemudian membuat laporan. Pada PPL Lanjutan, mahasiswa mulai merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan disupervisi guru mentor. Pada PPL Akhir, mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara mandiri untuk beberapa kelas yang berbeda.

Bagaimana pendidikan guru di Amerika Serikat? Untuk dapat memahaminya, harus dimengerti lebih dahulu bahwa pendidikan di Amerika Serikat sangat terdesentralisasi. Setiap negara bagian, memiliki kewenangan mengatur pendidikan di wilayahnya, termasuk pendidikan guru. Bahkan setiap universitas memiliki otoritas dalam merancang pendidikannya, termasuk pendidikan calon guru. Mungkin karena itu, dibentuk CAEP (*Council for Accreditation of Educator Preparation*) untuk

mengendalikan mutu pendidikan guru. CAEP merupakan peleburan dari NCATE (*National Council for Accreditation of Teacher Education*) dan TEAC (*Teacher Education Accreditation Council*) dan telah menerbitkan standar pendidikan guru (bukan standar kompetensi guru), yaitu:

- a. *Content and pedagogical knowledge*. Intinya lembaga pendidikan guru harus menjamin mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman konsep dan teori dalam bidangnya secara kritis dan mendalam.
- b. *Clinical partnership and practice*. Intinya lembaga pendidikan guru memiliki kerjasama yang efektif dengan sekolah, karena praktik lapangan (semacam PPL) merupakan bagian inti bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya.
- c. *Candidate Quality, Recruitment and Selectivity*. Intinya lembaga pendidikan harus memastikan kualitas calon guru menjadi salah satu kriteria utama dalam seleksi calon mahasiswa.
- d. *Program impact*. Intinya dampak positif dari hasil perkuliahan terhadap proses pembelajaran yang diampu lulusan dan tugas lainnya sangat nyata.
- e. *Provider Quality Assurance and Continuous Improvement*. Intinya lembaga pendidikan guru menerapkan sistem penjaminan mutu melalui berbagai data yang valid dan terus menerus meningkatkan mutu (Tatto, 2021).

Standar penyelenggaraan pendidikan guru tampaknya sangat penting bagi Amerika Serikat karena pendidikan yang terdesentralisasi, sehingga banyak ragamnya. Setiap negara bagian memiliki pola yang tidak selalu sama dengan negara bagian lain. Namun demikian, secara umum terdapat dua jalur pendidikan guru yang biasanya disebut pendidikan jalur tradisional dan jalur alternatif (*traditional and alternative route*).

Jalur tradisional pada umumnya dilaksanakan oleh universitas, baik melalui program konkuren maupun program konsekutif. Pada pola konkuren mahasiswa mengikuti kuliah bidang studi pada tahun pertama dan kedua. Pada tahun ketiga mulai mendapat matakuliah tentang pendidikan dan pembelajaran. Mahasiswa juga menempuh matakuliah pengalaman lapangan (*field experience*) (semacam PLP/ Pengalaman Lapangan Persekolahan di LPTK) ke sekolah dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan matakuliah praktik mengajar (*clinical experience*) (semacam PPL/Praktik Pengalaman Lapangan di LPTK). Berapa lama kedua program tersebut sangat tergantung universitasnya. Namun pada umumnya *clinical experience* memerlukan waktu cukup lama, sedangkan *field experience* hanya singkat.

Pada pola konsekutif, pada awalnya mahasiswa menempuh kuliah di departmen yang terkait dengan matapelajaran yang akan diajarkan, biasanya sampai lulus S1 (*bachelor*). Baru setelah itu masuk ke departemen pendidikan (*department of education*) untuk menempuh matakuliah pendidikan dan pembelajaran, termasuk melaksanakan PPL. Bagaimana perpindahan antar departemen tersebut, setiap universitas memiliki pola yang tidak tepat sama.

Setelah mahasiswa menyelesaikan kuliah tersebut diatas, mereka akan mendapatkan kewenangan mengajar level pertama (*initial credential*) sesuai yang ditetapkan negara bagian dimana mereka bekerja. Setelah itu mereka harus mengikuti tahapan-tahapan untuk memperoleh lisensi mengajar secara penuh. Misalnya telah mengajar sekian lama dan atau telah menempuh kuliah atau pelatihan tertentu. Bahkan setelah menempuh program magister (S2).

Jalur alternatif, biasanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin berubah karier (pekerjaan). Mereka telah memiliki ijazah S1 dan mungkin sudah bekerja di bidang lain, kemudian ingin menjadi guru. Tentu usia mereka lebih tua dibanding mereka yang dalam jalur tradisional ketika kuliah. Karena mereka sudah memiliki ijazah S1 dan bahkan berpengalaman kerja, perkuliahan difokuskan ke masalah pendidikan dan pembelajaran. Dari peserta seringkali juga sambil mengajar ketika menempuh kuliah. Program ini mirip dengan PGDE di Singapore.

Bagaimana pendidikan guru vokasi? Bukankah mereka memerlukan kompetensi tambahan, yaitu pengalaman kerja di dunia industri? Harus diakui itu merupakan salah satu problem yang sampai sekarang belum terpecahkan di Indonesia. Di Jerman dan beberapa negara yang memiliki tradisi pendidikan vokasi bagus, guru vokasi umumnya lulusan TVET (*Technical and Vocational Education and Training*) (semacam SMK) dan sudah memiliki pengalaman cukup di dunia kerja, kemudian masuk ke pendidikan guru yang biasanya disebut Institut Technik und Bildung (ITB) (Institute of Technology and Education) (Samani, 2016).

Di Indonesia, pola seperti itu tidak mudah dilaksanakan karena gaji guru pada umumnya lebih rendah dibanding di industri, sehingga menjadi guru tidak menarik bagi karyawan industri. Apalagi untuk dapat menjadi guru masih harus sekolah lagi yang memerlukan waktu dan biaya. Untuk mengatasi itu, mahasiswa calon guru vokasi (SMK) diharuskan menempuh Praktik Kerja Industri (PKI) di dunia industri yang relevan, biasanya selama 3-6 bulan. Namun karena sifatnya praktik kerja, tentu tidak benar-benar terikat dengan aturan kerja seperti karyawan. Bahkan di industri dengan standar tinggi, para mahasiswa tidak dapat langsung menangani pekerjaan, karena dikhawatirnya tidak dapat menghasilkan produk dengan standar

ketat tersebut. Akibatnya mahasiswa tidak dapat menghayati budaya kerja dengan baik. Apalagi waktunya relatif pendek, hanya maksimal 6 bulan.

Bagaimana Pendidikan Guru ke Depan?

Mencermati pendidikan guru di masa lalu, melihat kecenderungan yang ada dan juga pengalaman negara lain, dapat dipetik pelajaran sebagai berikut.

1. *Perlunya Re-design Kurikulum LPTK.*

Pendidikan guru di Indonesia menggunakan pola konsekutif. Artinya pendidikan akademik di S1 terpisah dengan pendidikan profesi di PPG. Dengan pola ini dimungkinkan lulusan S1 non kependidikan masuk PPG. Berbeda dengan di Fakultas Kedokteran, yang hanya lulusan S1 Kedokteran yang dapat menempuh Pendidikan Profesi Dokter; di Fakultas Psikologi hanya lulusan S1 Psikologi yang dapat menempuh Pendidikan Profesi Psikolog. Di bidang pendidikan, lulusan S1 Matematika (murni) dapat menempuh Pendidikan Profesi Guru Matematika, lulusan S1 Sejarah (murni) dapat menempuh Pendidikan Profesi Guru Sejarah.

Dengan adanya PPG yang bersifat konsekutif, maka kurikulum LPTK baik jejang S1 maupun PPG perlu dicermati kembali. Sebelum ada PPG, selama menempuh S1 di LPTK mahasiswa sudah belajar keterampilan praktik untuk menjadi guru. Mahasiswa menempuh PPL (Program Pengalaman Lapangan) di sekolah. Bahkan sebelumnya sudah melaksanakan *Micro Teaching* di kampus. Dengan adanya PPG keterampilan praktik sebagai calon guru dipelajari di PPG, sehingga kurikulum S1 pada mahasiswa lebih ditekankan untuk penguasaan konsep/teori. Bukan berarti tidak ada program untuk mengirim mahasiswa ke sekolah, tetapi ketika ke sekolah itu bagian dari matakuliah. Mahasiswa ke sekolah untuk melakukan observasi

dan kegiatan lainnya untuk memperkuat teori yang sedang dipelajari. Menurut saya, semua matakuliah kependidikan dan pembelajaran perlu memasukkan kegiatan di sekolah agar mahasiswa mengetahui kenyataan lapangan dari apa yang dipelajari dari referensi maupun laboratorium. Dengan cara itu diharapkan penguasaan teori sebagai calon guru telah dikuasai secara mantap selama program S1.

Dengan asumsi bahwa semua konsep dan teori telah dikuasai ketika menempuh S1, maka kurikulum PPG ditekankan pada penerapan teori tersebut dalam praktik mengajar dan kegiatan kependidikan lainnya di sekolah. Bukan berarti mahasiswa tidak belajar teori dan tidak perlu ke kampus. Tetapi mempelajari teori atau menyegarkan teori untuk mendukung praktik yang sedang dilakukan. Jika mahasiswa ke kampus dalam rangka mendiskusikan apa yang sedang dilakukan di sekolah, yang sangat mungkin memerlukan masukan untuk memperbaikinya. Jadi PPG sebaiknya *school based*, orientasinya ke praktik di sekolah dan waktu belajarnya juga lebih banyak di sekolah. Banyak hal-hal praktik yg hanya dapat dikuasai jika seseorang banyak melakukannya di lapangan.

Agar mahasiswa dapat belajar menjadi guru yang baik, maka sekolah mitra yang menjadi tempat mahasiswa praktik mengajar haruslah sekolah yang baik dan memiliki guru pamong yang baik, sehingga menjadi contoh bagaimana mengajar yang baik. Sebagaimana disebutkan di atas, keharusan memiliki sekolah mitra yang baik menjadi salah satu standar pendidikan guru di Amerika Serikat (Tatto, 2021). Guru pamong yang dalam kenyataannya lebih banyak mendampingi mahasiswa, juga harus menjadi perhatian khusus dalam PPG. Mereka itu pada umumnya tidak memiliki waktu cukup untuk mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu LPTK sebaharnya membantu

mereka untuk mengikuti berbagai seminar dan pelatihan yang relevan.

Bagaimana dengan mahasiswa PPG yang berasal dari prodi S1 non Kependidikan? Dalam Peraturan Pemerintah No. 74/2008 dan juga sudah diterapkan di lapangan, dimungkinkan lulusan S1/D4 non Kependidikan masuk PPG. Misalnya lulusan S1 Matematika “murni” masuk PPG Bidang Studi Matematika, lulusan S1/D4 Pertanian masuk PPG Bidang Pertanian. Tentu mereka belum memperoleh bekal matakuliah Kependidikan dan matakuliah Pembelajaran selama kuliah di S1/D4.

Untuk PPG Dalam Jabatan, dimana mahasiswa telah mengajar cukup lama, tentunya sudah belajar mandiri dan atau ikut berbagai pelatihan yang terkait dengan Kependidikan dan Pembelajaran, sehingga tidak kesulitan mengikuti PPG. Namun bagi mahasiswa PPG Prajabatan, dengan mahasiswa *fresh graduate* S1/D4 akan menimbulkan masalah saat kuliah karena belum memperoleh bekal Kependidikan dan Pembelajaran, pada hal harus menempuh PPG bersama mahasiswa lulusan S1 Kependidikan. Oleh karena itu, sebaiknya calon mahasiswa PPG Prajabatan yang berasal dari lulusan S1/D4 non Kependidikan diwajibkan menempuh program Matrikulasi sebelum mengikuti perkuliahan PPG. Dengan demikian mereka memiliki Kependidikan dan Pembelajaran yang setara dengan temannya yang berasal dari lulusan S1 Kependidikan. Apa matakuliah yang harus ditempuh dalam program Matrikulasi dapat diadaptasi dari matakuliah Kependidikan dan Pembelajaran di program S1 Kependidikan.

Apakah program Matrikulasi itu lazim dan tidak memberatkan? Menurut saya itu lazim diterapkan dan tidak memberatkan. Banyak program S2 yang menerapkan matrikulasi bagi calon mahasiswa yang tidak linier S1-nya. Bahkan Pendidikan Profesi Dokter (PPD) yang polanya konkuren (hanya mahasiswa

S1 Kedokteran yang boleh masuk) juga menerapkan matrikulasi bagi calon mahasiswa yang dinilai bekalnya kurang.

Di akhir program S1 biasanya ada ujian akhir untuk mengetahui penguasaan mahasiswa terhadap bidang ilmu yang dipelajari secara utuh/komprehensif. Tentu ujiannya bersifat akademik, karena pendidikan S1 pada dasarnya pendidikan akademik. Skripsi dan Tugas Akhir pada dasarnya karya tulis ilmiah dan jika itu dijadikan dasar ujian di akhir program S1 tentunya bersifat akademik. Lazimnya penguji skripsi atau tugas akhir juga para akademisi yaitu para dosen.

Bagaimana dengan PPG? Apakah perlu ada ujian di akhir program PPG? Jika ada, bagaimana bentuknya karena program PPG orientasinya lebih kepada praktik? Penilai yang terbaik dari sebuah produk adalah penggunaannya. Tentu pengguna yang faham akan fungsi produk tersebut. Jadi ujian akhir PPG sebaiknya melibatkan para “pengguna jasa guru”, misalnya kepala sekolah dan organisasi profesi yang relevan. Apakah artinya hanya ujian praktik? Tentu tidak. Ujian teori sebagai abstraksi dari praktik tetap diperlukan, tetapi orientasinya kepada *problem solving* dari masalah praktik di lapangan. Tujuannya untuk menguji apakah mahasiswa PPG mampu memecahkan masalah secara konseptual.

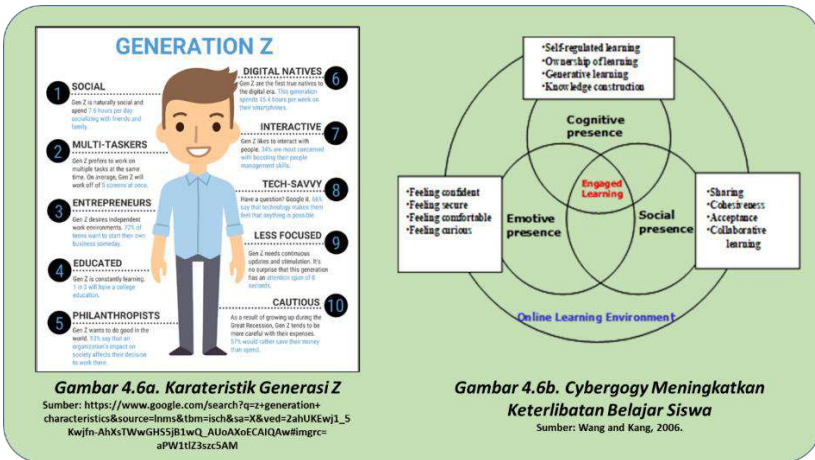
Bagaimana dengan ujian keterampilan mereka sebagai guru? Pengamatan dalam waktu yang lama tentu lebih komprehensif dibanding pengamatan sesaat. Hasil penilaian selama mahasiswa praktik di sekolah semestinya lebih dapat menggambarkan kompetensi yang bersangkutan dibanding ujian praktik yang banyak 1-2 jam pelajaran. Jadi penilaian Guru Pamong, Kepala Sekolah dan Dosen Pembimbing selama mahasiswa menempuh PPG sebaiknya dijadikan komponen penting. Apakah tidak perlu ujian praktik? Tetap diperlukan dan sebaiknya mengundang penguji di luar, untuk menghindari “jeruk

makan jeruk-diajar sendiri diuji sendiri”, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Untuk calon guru vokasi perlu dipikirkan pola khusus. Para karyawan di industri perlu diberi pintu khusus untuk menjadi mahasiswa calon guru vokasi. Pengalaman kerja yang cukup lama di dunia industri dapat dihargai dengan pola Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL), sehingga mereka tidak harus menempuh kurikulum sebagaimana mahasiswa *fresh graduate* dan SMA/SMK. Tentu usia mereka lebih tua dibanding mahasiswa *fresh graduate*, sehingga ketika lulus sangat mungkin sudah tidak memenuhi syarat seandainya ingin menjadi guru PNS. Namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang tidak membatasi usia maksimal 35 tahun, berarti mereka masih berpeluang menjadi ASN setelah lulus.

2. Menyiapkan Guru Era Digital

Re-design Kurikulum PPG semakin mendesak ketika kita masuk era digital dan guru harus mampu menerapkan *cybergogy* dalam mengajar. Pertanyaannya bagaimana menyiapkan guru agar mampu menerapkan *cybergogy* pada pembelajaran dengan siswa generasi Z dan generasi Alpha yang memiliki karakteristik *digital native*, sangat faham bahkan tergantung pada teknologi (*technology savvy*), kurang fokus dalam bekerja, senang berdiskusi bahkan berdebat dan memiliki jejaring luas di dunia maya.



Ketika belajar di jenjang S1, calon guru harus dididik agar melek teknologi, terbiasa menjelajah dunia maya untuk mencari informasi yang diperlukan, menganalisis dan memecahkan masalah dengan secara kreatif menggunakan teknologi yang relevan, seharusnya dipelajari secara mendalam ketika belajar. Mengakibatkan bidang studi yang nanti akan diajarkan dengan kehidupan sehari-hari harus menjadi penekanan, agar pada saat menjadi guru dalam memberikan contoh kepada siswa.

Dalam teori pendidikan dan pembelajaran, disamping belajar konsep-konsep klasik yang selama ini menjadi pegangan para ahli pendidikan dan pembelajaran, ke depan mahasiswa calon guru harus belajar konsep dan hasil studi mutakhir yang bermanfaat untuk menumbuhkan daya juang siswa, seperti konsep *girt* dari Duckworth (2016), *growth mindset* dari Dweck (2006). Untuk teori belajar, disamping mempelajari teori-teori klasik mahasiswa calon guru juga harus mempelajari dengan teori baru, misalnya *heutagogy* (Hase & Kenyon, 2007), *cybergogy* (Wang & Kang, 200), *problem based learning*, *project based learning*, *life based learnng* (Staron, 2011). Berbagai konsep/teori tersebut dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga mahasiswa

memiliki pemahaman secara komprehensif dan dapat memilih mana yang sesuai dengan materi ajar dan karakteristik siswa, bahkan berani menggabungkan beberapa konsep, jika itu yang lebih tepat dengan kondisi kelas yang dikelola.

Agar nantinya dapat menerapkan teori pembelajaran tersebut, mahasiswa calon guru harus memahami karakteristik anak yang nanti menjadi siswanya. Karena yang akan diajar termasuk generasi Z atau bahkan generasi Alpha, maka mahasiswa calon guru harus memahami karakteristik generasi tersebut, termasuk bagaimana membimbingnya dengan menerapkan konsep pembelajaran yang tepat. Gambar 4.6a. menunjukkan bahwa generasi Z memiliki karakteristik *digital native*, kurang fokus, sangat interaktif dan *multitasking* serta memiliki jejaring perkawanan yang luas. Oleh karena itu calon guru harus belajar bagaimana menemukan pola pembelajaran yang sesuai. Calon guru juga harus memiliki kemampuan mengelola emosi agar tidak mudah tersinggung dan marah menghadapi siswa generasi Z yang memiliki karakteristik sangat terbuka dan suka berdebat. Mungkin itu mengapa Selvi (2010) memasukan *emotional competences* dalam standar kompetensi guru.

Kondatric Cycle pada Gambar 3.8 menunjukkan perkembangan sains dan teknologi yang semakin cepat dan tentu berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Oleh karena itu calon guru harus belajar menjadi pembelajar sejati dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang dapat ditemukan. Dalam bidang pembelajaran, calon guru harus dididik tidak hanya menjadi pengguna konsep dan hasil penelitian orang lain, tetapi juga melakukan penelitian untuk menemukan konsep yang sesuai dengan kondisi kelas yang ditangani. Oleh karena itu konsep pendidikan guru berbasis riset yang dilaksanakan di Finlandia dapat diadaptasi di Indonesia.

Penyiapan guru era digital yang diuraikan di atas, secara teori harus sudah dituntaskan selama jenjang S1 dan pada jenjang PPG mahasiswa belajar bagaimana mempraktikannya di sekolah. Dengan demikian keselarasan dan sinergi antara LPTK dengan sekolah mitra harus benar-benar dijaga. Keselarasan tidak hanya antar lembaga, tetapi juga antara dosen pembimbing dengan guru pamong yang dari hari kehari membimbing mahasiswa calon selama PPG. Harus dirancang bahwa guru pamong dan dosen pembimbing merupakan satu tim untuk mendampingi mahasiswa selama PPG.

3. PPG merupakan Gawang Terakhir dalam Menghasilkan Guru Bermutu.

Walaupun ada yang mempertanyakan apakah mendidik calon guru perlu sampai pendidikan profesi (PPG), rasanya tidak mungkin kita menghindarinya. Guru telah difahami sebagai profesi, sebagaimana dokter, perawat, psikolog, apoteker dan sebagainya. Profesi-profesi tersebut semuanya dihasilkan melalui pendidikan profesinya masing-masing. Bahkan ada pendidikan profesi yang kemudian “dicantolkan” ke program magister (S2), sehingga lulusannya memiliki ijazah S2, sekaligus sertifikat profesi. Dalam KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) disebutkan bahwa pendidikan profesi itu level 7, berada di atas pendidikan S1 yang berada di level 6 dan berada di bawah pendidikan magister yang berada di level 8.

Karena PPG merupakan program pendidikan yang relatif baru, perlu dilakukan kajian mendalam bagaimana pola yang paling cocok di Indonesia. Menggunakan bahan banding pendidikan profesi yang sudah mapan, misalnya Pendidikan Profesi Dokter (PPD) dan pendidikan guru di negara lain, merupakan langkah yang perlu ditempuh. Berbagai inovasi PPG Prajabatan yang pernah dilakukan juga perlu dikaji secara mendalam, dan komprehensif untuk menemukan apa plus-

minusnya, sehingga dapat digunakan sebagai landasan merancang pola yang lebih baik.

PPG seharusnya difahami sebagai “gawang terakhir” dalam menjaga mutu calon guru. Oleh karena itu PPG perlu ditangani dengan sungguh, mulai dari seleksi calon mahasiswa, proses pendidikan dan penempatan lulusannya. Masa studi program pendidikan profesi, termasuk PPG, sangat singkat. Dengan beban kredit sekitar 40 sks, berarti masa studinya hanya sekitar dua semester. Dengan demikian tidak cukup waktu untuk memperbaiki bekal teori yang dimiliki mahasiswa. Oleh karena itu seleksi penerimaan mahasiswa baru menjadi bagian penting, untuk memastikan mereka memiliki bakat, minat dan bekal awal kemampuan yang baik untuk mejadi guru. Dua negara yang dikenal memiliki pendidikan guru yang bermutu, Finlandia dan Singapore juga melakukan seleksi ketat terhadap mahasiswa calon guru. Bahkan CAEP menyebutkan keketatan seleksi masuk pendidikan guru menjadi salah satu standar pendidikan guru di Amerika Serikat.

Dengan asumsi mahasiswa baru merupakan lulusan S1/D4 yang semestinya telah memiliki bekal teori dan keterampilan yang baik, maka proses pembelajaran di PPG lebih difokuskan pada bagaimana mempraktikkan teori yang telah diterima selama S1/D4. Dengan demikian pelaksanaan PPG lebih banyak di sekolah bukan di kampus (*school based*). Guru pamong menjadi “andalan” karena merekalah yang sehari-hari membimbing mahasiswa calon guru saat melaksanakan paktik di sekolah. Oleh karena itu LPTK harus dipastikan memiliki sekolah mitra permanen yang bermutu bagus, seperti yang dipersyaratkan oleh CAEP di Amerika Serikat. Guru pamong haruslah merupakan guru yang baik, memiliki wawasan kependidikan yang luas serta memahami teori-teori pembelajaran mutakhir. Jika diperlukan dilakukan pelatihan secara periodik terhadap guru pamong.

Tidak ada orang berlatih langsung pandai. Semua pekerjaan harus secara terus menerus disempurnakan. Apa yang dikerjakan hari ini harus lebih baik dibanding kemarin. Prinsip *continuous quality improvement* (CQI) semacam itu harus ditumbuhkan kepada mahasiswa PPG. PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dapat menjadi wahana menumbuhkan budaya CQI bagi calon guru. Dengan catatan, PTK dilakukan secara berkelanjutan (PTK-B) dan tujuannya bukan untuk membuat karya ilmiah tetapi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan demikian tidak harus menggunakan kaidah-kaidah ilmiah secara ketat. Yang paling penting mahasiswa calon berlatih berpikir reflektif. Untuk itu dicatat: (1) apa yang dilakukan guru, (2) bagaimana proses pembelajaran berlangsung, (3) bagaimana respons siswa dan (4) bagaimana capaian belajarnya. Catatan tentang empat faktor tersebut selanjutnya dianalisis, baik sendirian atau lebih baik bersama rekan calon guru lain serta guru pamong untuk menemukan apa yang baik, apa yang kurang baik dan bagaimana menyempurnakan. Jika cara tersebut dilakukan secara terus menerus selama PPG, nanti akan menjadi kebiasaan saat mahasiswa sudah lulus dan menjadi guru.

Kekompakan antara dosen pembimbing dan guru pamong sangat penting, agar pembimbingan kepada mahasiswa dapat efektif. Gap psikologis akibat perbedaan latar belakang pekerjaan harus diminimalkan (Samani, 2022). Untuk itu sebaiknya dosen pembimbing dan guru pamong menjadi satu tim bersama mahasiswa dalam melaksanakan PTK Berkelanjutan. Dengan begitu, interkasi mereka menjadi lebih intens sehingga gap psikologis dapat dikurangi, sekaligus memberi kesempatan mereka untuk berbagi pengalaman.

4. Pendidikan Guru, khususnya PPG Prajabatan Dikaitkan dengan Penempatan Lulusan.

PPG Prajabatan seharusnya dikaitkan dengan penempatan alumninya setelah peserta lulus, agar sesuai antara lulusan dengan kebutuhan guru baru (*supply and demand*). Untuk itu pola pendidikan guru berikatan dinas sebagaimana diamanatkan pasal 23 ayat (1) UUGD perlu segera diwujudkan. Minimal untuk bagian pendidikan profesinya, yaitu PPG. Beberapa informasi mengatakan bahwa Singapore dan Malaysia sudah menerapkan pola ini cukup lama, sehingga jumlah mahasiswa calon guru (mahasiswa LPTK) di sana telah disesuaikan dengan kebutuhan guru pada saat mereka nanti lulus. LPTK negeri dan swasta termasuk di perguruan tinggi keagamaan, seperti UIN/IAIN/STAIN plus yang PTS yang ternyata juga memiliki prodi pendidikan guru, berjumlah 1.578 buah dengan jumlah program studi 5.052 buah (Tim LAMDIK, 2018). Rasanya jumlah tersebut terlalu banyak jika dikaitkan dengan kebutuhan guru.

Tentu untuk dapat melaksanakan pola tersebut diperlukan data yang akurat, tentang kebutuhan guru untuk tahun tertentu, matapelajaran tertentu, dan untuk setiap daerah tertentu. Juga diperlukan koordinasi antara Kementerian Pendidikan yang menangani pendidikan guru, Kementerian Dalam Negeri plus Pemerintah Daerah yang memiliki sekolah negeri, Yayasan yang memiliki sekolah swasta dan Kementerian yang menangani rekrutmen guru baru. Juga dengan Kementerian Keuangan yang menyiapkan gaji guru sekolah negeri dan tunjangan profesi bagi seluruh guru baru, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Bagaimana dengan anggaran untuk ikatan dinas? Bukankah Indonesia punya pengalaman menerapkan pendidikan guru berikatan dinas yang terbukti mampu menarik calon guru yang bagus dan dapat menempatkan mereka setelah lulus ke sekolah

yang kekurangan guru, termasuk di daerah 3T? Apakah anggaran untuk ikatan dinas dapat didukung oleh anggaran negara saat ini?

Jika diasumsinya, kebutuhan guru baru setelah stabil sebesar 2,5% dari jumlah guru yang ada yaitu 3,3 juta, maka setiap tahun diperlukan guru baru sebanyak 82.500 orang. Jika SPP mahasiswa PPG per tahun 15 juta rupiah dan ikatan dinas per bulan 2 juta, maka unit cost mahasiswa PPG sebesar 42 juta rupiah. Dengan demikian untuk membiayai 82.500 orang mahasiswa PPG diperlukan anggaran 3,456 trilyun rupiah. Apa itu besar? Jika APBN tahun 2022 sebesar 3.052 trilyun, dan anggaran pendidikan sebesar 20% nya atau 7.425 trilyun, maka anggaran untuk menghasilkan 82.500 guru berikatan dinas hanya 0,04 % dari anggaran pendidikan. Apakah itu besar jika diingat kontribusi guru terhadap hasil belajar siswa lebih dari 50%?

Juga sangat bagus jika PPG-nya dibarengi dengan program SM3T yang terbukti mampu mempercepat pendewasaan calon guru, mengasah kemampuan berinovasi untuk mengatasi problem di sekolah yang memiliki sarana yang sangat kurang dan mengisi kekosongan guru di daerah 3T dan sekaligus menumbuhkan semangat ke-Indonesia-an. Dengan mereka mengikuti SM3T diharapkan calon guru sudah mengenal daerah terpencil, sehingga tidak takut jika dalam pola ikatan dinas ditunjukkan sekolah-sekolah calon penempatan mereka setelah lulus.

5. LPTK Pelaksana PPG Terdistribusi di Seluruh Wilayah Indonesia

Salah satu masalah guru yang sampai saat ini belum terpecahkan adalah ketidakmerataan distribusinya. Gambar 4.7 menunjukkan masih ada 17,65 % sekolah di negeri ini yang sangat kekurangan guru. Sekolah-sekolah semacam itu biasanya berada di pedesaan atau lebih spesifik lagi di daerah 3T. Pengalaman melaksanakan program SM3T, bahkan ada SD dengan enam rombongan belajar yang hanya memiliki satu atau dua orang guru.

Ada SMP yang tidak memiliki guru Matematika dan Bahasa Inggris. Dapat dibayangkan bagaimana Kepala Sekolah harus mengatur agar proses pembelajaran tetap berjalan untuk semua kelas. Sementara itu juga ada 8,23% sekolah yang sangat kelebihan guru dan pada umumnya sekolah itu berada di perkotaan.

Memindahkan guru ternyata tidak mudah, apalagi memindah guru dari sekolah di perkotaan ke sekolah di pedesaan. Oleh karena itu bagaimana dapat mengangkat guru baru untuk sekolah-sekolah di pedesaan menjadi salah satu solusi. Namun demikian ketika ada formasi pengangkatan guru ternyata lulusan PPG juga banyak yang enggan mengisinya. Alumni LPTK di kota besar ternyata tidak tertarik untuk mengajar di pedesaan, apalagi sekolah di daerah 3T. Program GGD (Guru Garis Depan) yang sepi pelamar menguatkan simpulan tersebut. Mungkin karena sebagian besar mahasiswa PPG adalah perempuan, mereka takut untuk bertugas di daerah 3 T atau orangtuanya yang tidak mengizinkan. Seringkali orangtua mereka juga tidak mengizinkan ketika anak perempuannya akan mengajar di daerah terpencil di luar Jawa.



Gambar 4.7. Tingkat Ketidakmerataan Guru di Indonesia (2018)

Lembaga pendidikan, sekolah apalagi universitas yang baik, di samping merupakan tempat siswa dan mahasiswa menempuh pendidikan, juga menjadi pusat penyebaran peradaban bagi masyarakat di sekitarnya. Berdirinya sebuah sekolah atau universitas di suatu wilayah akan membuat daerah di sekitarnya menjadi lebih cepat maju. Interaksi warga masyarakat dengan kalangan universitas, baik dosen, karyawan dan mahasiswa dapat mempercepat keterdidikan masyarakat.

Bertolak dari uraian di atas, sebaiknya LPTK pelaksana PPG juga tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, sehingga memudahkan masyarakat setempat yang ingin menempuh pendidikan calon guru. Berkaca pada pengalaman melaksanakan PPG Bersubsidi, ketika calon mahasiswa tahu diterima tetapi di LPTK yang jauh dari tempat tinggalnya, banyak yang mengundurkan diri. Pada hal mereka tidak perlu membayar SPP karena ditanggung oleh pemerintah. Di samping itu, jika LPTK pelaksana PPG tersebar di berbagai propinsi, kebutuhan guru baru berpendidikan PPG tidak harus didatangkan dari Jawa dan beberapa kota besar lainnya. Distribusi penyelenggara PPG di seluruh wilayah Indonesia diharapkan juga mempercepat pemerataan mutu pendidikan, karena penyelenggaraan PPG dapat berimbas pada pendidikan dasar dan menengah di sekitarnya.

Memang harus diakui, masih ada LPTK di daerah tertentu yang memerlukan penguatan agar mampu menyelenggarakan PPG dengan baik. Pendampingan bagi LPTK seperti itu oleh LPTK yang telah bagus, dapat dilakukan sampai pada saatnya dapat dilepas dan berdiri sendiri. Pengalaman Kemendikbud mendirikan Fakultas Kedokteran di beberapa universitas luar Jawa yang diawali dengan pendampingan oleh Fakultas Kedokteran yang sudah mapan, dapat dijadikan bahan banding.

Dengan kompleksitas urusan guru yang sangat tinggi, melibatkan berbagai pihak dan diyakini memerlukan waktu cukup lama untuk menyelesaikan, maka diperlukan suatu *grand design* pendidikan calon guru dan pembinaan mereka setelah menjadi guru. Grand design tersebut yang menjadi pegangan setiap unit kerja dalam menanggapi masalah guru sehingga terjadi sinergi antar lembaga. *Grand design* bukan sesuatu yang tidak dapat diubah atau disempurnakan, tetapi harus dihindari “ganti pimpinan ganti kebijakan” apalagi pola “bumi hangus” dengan membuang semua kebijakan lama dan diganti dengan yang baru.

BAGAIMANA AGAR KOMPETENSI GURU TERUS MENINGKAT?

Ketika di babak awal Piala Dunia lalu, Saudi Arabia mengalahkan Argentina dan Jepang mengalahkan Jerman, saya mengunggah renungan saya di blok pribadi (muchlassamani@blogspot.com). Bukan renungan seorang ahli sepak bola, tetapi renungan tentang apa pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut, khususnya bagi kalangan pendidik. Apalagi ternyata Kroasia mampu menundukkan Brazil dan Maroko mampu memulangkan Portugal. Dua tim yang diisi pemain bintang seperti Neymar dan Ronaldo ternyata ditundukkan oleh tim bukan unggulan.

Bahwa kemenangan tim underdog tersebut sudah takdir, tentu saya percaya. Bahwa dalam kemenangan tersebut ada faktor keberuntungan saya juga percaya. Namun saya yakin, Arab Saudi, Jepang, Kroasia dan Maroko telah mempersiapkan pertandingan sebaik-baiknya. Saya yakin pemain sudah latihan mati-matian dan pelatihnya telah menguras otak untuk mengatur strategi bermain. Nah, dua hal terakhir itulah yang menurut saya jadi pelajaran bagi kaum pendidik, termasuk para guru. Bagaimana mereka berlatih dan mengatus strategi, sehingga dapat menjungkirbalikkan perkiraan para pencinta bola itulah yang perlu dikaji.



Gambar 5.1. Ronaldo dan Messi sedang Latihan

Sumber: <https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-6408890/gelagat-gelagat-aneh-rekan-rekan-timnas-portugal-ke-ronaldo>

Terpicu oleh dugaan tersebut, saya mencari informasi, baik tulisan, gambar maupun video bagaimana tim Maroko, Jepang dan Kroasia berlatih, serta bagaimana pelatih mereka mengatur strategi bertanding untuk dapat mengalahkan lawan. Sayangnya saya tidak menemukan tulisan, gambar maupun video ketiga tim tersebut saat berlatih. Mungkin dirahasiakan. Yang justru saya temukan adalah gambar dan video yang memuat Ronaldo dan Messi sedang berlatih. Memang tidak jelas, apakah itu berlatih bersama tim negaranya di ajang Piala Dunia atau berlatih bersama klubnya. Sebagaimana diketahui Ronaldo dan Messi adalah dua pemain bola hebat yang telah beberapa tahun menjadi idola banyak penggemar sepak bola. Konon keduanya juga mendapatkan bayaran “selangit” yang mungkin bayaran mereka dalam sebulan lebih besar dibanding gaji guru sampai sampai pensiun.

Dari kacamata pendidikan, video tersebut sangat menarik. Pemain sepakbola profesional “kelas atas” seperti Ronaldo dan Messi ternyata juga melakukan latihan fisik dan teknik secara parsial. Mereka berlatih lari meliuk-liuk di antara tiang atau *cone* untuk melemaskan gerakan. Mereka berlatih melompak-lompat dan sebagainya. Mereka berlatih mendribel bola, mengirim dan menerima operan, menyundul bola dan sebagainya. Pokoknya berbagai teknik dan bermain sepak bola, yang di benak saya itu latihan bagi pemain pemula.

Apakah semua pemain sepak bola profesional seperti itu ya? Terdorong ingin tahu, saya bertanya kepada teman-teman di Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) dan penjelasannya sungguh membuat saya lebih penasaran. Ternyata semua pemain olahraga profesional seperti itu. Teman tersebut memberi contoh, pemain tenis sekelas Jokovic dan Serena William melakukan latihan teknik maupun fisik secara rutin, di samping latihan bertanding. Mereka berlatih sungguh-sungguh karena ingin *performance*-nya tetap

bahkan meningkat. Sebagai pemain bola profesional, jika *performance* turun, tidak akan lagi digunakan oleh klubnya. Demikian pula pemain olahraga profesional lainnya. Jadi *performance* saat bertanding menjadi “taruhan” nasib bagi mereka. Bahkan ketika berlatihpun sudah diamati apakah *performance*-nya bagus dan siap untuk diturunkan dalam pertandingan. Jika tidak bagus akan “dibangku-cadangkan”, yang konon itu merupakan siksaan psikologis bagi pemain olahraga profesional.

Ternyata latihan pemain speak bola, seperti yang dilakukan oleh Ronaldo dan Messi dan juga oleh petenis sekelas Jokovic dan Serena William tersebut, merupakan program yang telah dirancang dengan baik dan didasarkan pada kajian ilmu olahraga. Pelatih telah memprogramkan itu dengan segala perhitungannya. Apa yang harus dilakukan untuk latihan fisik, apa yang harus dilakukan untuk latihan teknik telah dirancang dan didasarkan pada kajian ilmiah. Teman dari FIO menjelaskan bagaimana posisi kaki saat menendang bola, berapa jarak tiang untuk lari meliuk-liuk untuk melemaskan gerakan, berapa kali harus latihan dalam seminggu dan sebagainya ditentukan atas kajian ilmiah keolahragaan.

Mendengarkan penjelasan teman FIO, terbersit di benak saya, bukankah dokter dan guru juga kaum profesional? Apakah mereka juga melakukan latihan seperti olahragawan? Kebetulan beberapa kerabat saya berprofesi sebagai dokter dan beberapa diantaranya sudah senior dan bahkan ada yang menjadi dosen di Fakultas Kedokteran dan di Rumah Sakit Pendidikan. Saya mencoba menanyakan kepada mereka. Ternyata informasinya juga sangat menarik.

Menurut kerabatan tersebut, dokter itu setiap hari belajar sambil bekerja. Mereka memberi contoh bagaimana dokter

memanfaatkan “status pasien” untuk belajar. Dokter mengobati pasien dengan mempelajari gejala yang ada dan jika perlu hasil laboratorium untuk menentukan (mendiagnosa) sakit apa yang diderita pasien dan berdasarkan diagnose tersebut dokter memberikan obat dan atau terapi lainnya yang diharapkan dapat menyembuhkan pasien. Jika ternyata pasien belum sembuh, dokter akan melakukan diagnose ulang dan kemudian memberi obat dan atau terapi yang berikutnya, yang mungkin untuk memperkuat yang pertama atau bahkan berbeda karena dalam diagnose kedua dokter menemukan penyakit yang lain.

Dokter itu secara periodik, lima tahun sekali, harus memperbarui ijin praktik dan untuk mendapatkannya ada ketentuan yang harus dipenuhi yaitu P2KB (Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) yang terdiri dari 5 ranah, yaitu: (1) Ranah Pembelajaran dengan target 50 – 75 SKP (Satuan Kredit Profesi); (2) Ranah Profesional dengan target 75 – 150 SKP; (3) Pengabdian Masyarakat dan Profesi dengan target 25 – 50 SKP; (4) Publikasi Ilmiah dan Populer dengan target 0 -100 SKP; dan (5) Pendidikan Ilmu dan Pendidikan dengan target 0 – 100 SKP. (<https://www.drfadhilahazzahro.com/2021/10/part-2-cara-memperpanjang-serkom-dan.html?m=1>).

Dari persyaratan tersebut tampak jelas bahwa dokter harus secara aktif mengembangkan diri, baik dengan belajar sendiri dalam menangani pasien, mengikuti pelatihan/seminar/workshop, membuat karya ilmiah maupun populer dan sebagainya. Di samping tuntutan pasien, tampaknya tuntutan P2KB tersebut juga menjadi salah satu pendorong dokter untuk terus belajar sambil bekerja. Jika tidak mereka tidak akan dapat memperoleh ijin untuk praktik lagi. Jika dokter gagal mengobati pasien, artinya pasien yang berobat tidak sembuh lama-lama akan tidak akan mendapat pasien, karena mereka tidak puas dan kemudian memberitahu teman atau kerabatnya.

Merenungkan informasi bahwa olahragawan profesional selalu berlatih dan dokter terus belajar sambil bekerja, muncul pertanyaan apakah guru juga seperti itu ya? Jika ya, seperti apa yang dilakukan? Ronaldo, Messi, Jokovic dan Serena William tidak setiap hari atau bahkan setiap minggu bertanding, sehingga punya waktu untuk latihan. Bahkan mereka punya pelatih dan fasilitas untuk berlatih yang lengkap. Dokter juga beruntung karena pasien datang untuk berobat, dan pabrik obat sangat senang menyponsori pelatihan atau seminar. Guru praktis setiap hari bekerja (mengajar), jadi kapan harus berlatih? Siswa juga tidak melaporkan hasil belajar, seperti pasien yang datang lagi jika belum sembuh.

Mencari Bentuk CPD bagi Guru Indonesia

Apa yang dilakukan para olahragawan dengan berlatih secara intensif dan para dokter untuk memanfaatkan data pasien, pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kemampuan dan *performance* tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk CPD (*continuous professional development*). Pertanyaannya, bagaimana bentuk CPD bagi guru yang sesuai dengan konteks Indonesia. Sesuai aturan, pada umumnya guru mengajar 24 jam pelajaran per minggu, sehingga hampir tidak punya waktu khusus untuk berlatih seperti olahragawan. Menggantungkan pelatihan yang dibiayai pemerintah, baik pusat maupun daerah juga tidak menjanjikan, sementara dunia bisnis sepertinya belum tertarik membiayai. Oleh karena itu perlu dikembangkan pola CPD yang dapat dikerjakan guru (*doable*) dengan biaya atau sarana yang dimiliki sekolah (*affordable*).

Sebelum membahasnya lebih jauh, mari kita bahas dulu apakah memang latihan dan sejenisnya itu sangat penting bagi guru. Gambar 5.2 menunjukkan data hasil tes kompetensi guru. Memang data tersebut sudah cukup lama (Tahun 2012), tetapi menurut teman-teman di Kemendikbudristek data terbaru juga

tidak jauh beda dan tidak ada rincian seperti itu. Dengan asumsi perangkat tes valid dan pelaksanaan ujian berjalan baik, sehingga data tersebut diyakini menggambarkan kompetensi guru yang sesungguhnya, maka ada beberapa fenomena yang sangat menarik untuk di analisis, khususnya terkait dengan pelatihan.



Gambar 5.2. Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2012

Gambar sebelah kiri menunjukkan skor kompetensi guru yang dipilih berdasarkan pendidikan formal mereka. Data tersebut menunjukkan kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan guru semakin tinggi pula skor tes mereka. Dengan kata lain data tersebut menunjukkan kewajaran, karena dengan peningkatan jenjang pendidikan semestinya kompetensi guru juga naik. Memang ada yang agak aneh, karena skor hasil tes guru yang berpendidikan S3 lebih rendah dibanding yang S2. Namun saya menduga jumlah guru yang berpendidikan S3 tidak banyak dan umumnya program studi S3 yang dipilih tidak linier dengan S1 dan atau matapelajaran yang diampu. Sementara tes mendasarkan pada matapelajaran yang diampu. Apalagi umumnya guru di Indonesia yang berpendidikan S3 sudah tidak mengajar secara penuh, karena mengemban tugas lainnya, seperti kepala sekolah, pengawas sekolah dan jabatan lainnya. Dengan demikian

kompetensi yang terkait dengan pembelajaran dan penguasaan materi ajar sudah terkontaminasi dengan tugas-tugas lainnya.

Gambar sebelah kanan menunjukkan skor kompetensi guru yang dipilah berdasarkan usia mereka. Sungguh mengagetkan, karena semakin senior usia guru skor tes kompetensi mereka semakin rendah dan penurunannya terjadi secara konsisten. Pada hal logikanya semakin senior, semakin berpengalaman sehingga kompetensi sebagai guru semakin baik. Ada yang berkomentar karena tesnya berupa tes tulis dan teoritis, sehingga mungkin saja guru senior sudah lupa. Namun teman-teman di Kemendikbudristek mengatakan tes tersebut banyak berisi pemecahan masalah (*problem solving*) yang memerlukan pengalaman lapangan. Dengan demikian semestinya semakin senior skor tes mereka semakin tinggi, karena memiliki pengalaman bagaimana mengatasi masalah di lapangan.

Data tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa semakin senior kompetensi guru semakin rendah. Apakah guru tidak mengikuti pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kompetensinya? Saya tidak mendapatkan data tertulis, berapa kali rata-rata guru di Indonesia mengikuti pelatihan dalam satu tahun atau dalam satu periode waktu tertentu. Beberapa guru yang berhasil saya wawancarai mengatakan sangat jarang guru ikut pelatihan. Memang ada guru tertentu yang dapat ikut beberapa kali pelatihan, tetapi juga banyak guru yang sudah bertugas lebih 10 tahun belum pernah mendapat pelatihan. Tampaknya, dengan jumlah guru sangat besar, sekitar 3,3 juta orang, sedangkan anggaran sangat terbatas, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum mampu memberikan pelatihan secara tahunan untuk semua guru.

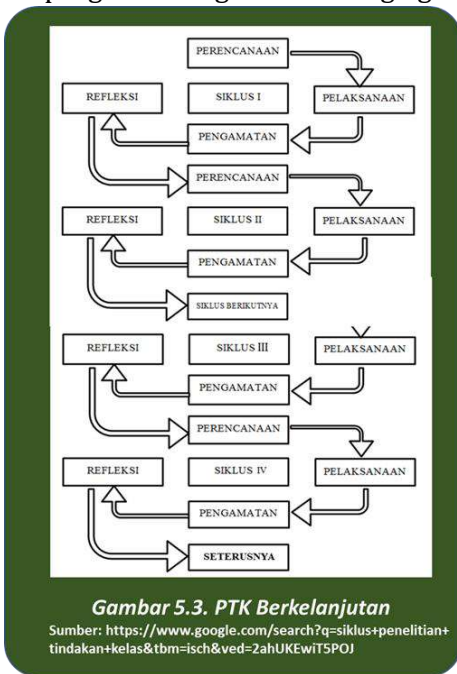
Memang ada beberapa pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga tertentu, misalnya oleh perguruan tinggi, lembaga

pelatihan, organisasi profesi dan sebagainya. Biasanya pelatihan semacam itu berbayar dan hanya dilaksanakan di kota besar. Oleh karena itu yang dapat mengikuti hanya guru yang bertugas di kota besar dan mampu membayar. Bagi guru yang bertugas di pedesaan atau bahkan di daerah 3T tentu sulit untuk dapat mengikuti. Apalagi banyak guru yang berstatus guru honorer dengan penghasilan kecil, sehingga berat untuk membayar.

Apakah pelatihan merupakan hal sangat penting bagi guru? Rasanya tidak ada yang mengatakan tidak. Buktinya negara yang memiliki guru bermutu melakukan pelatihan secara rutin. Pemerintah Singapore menyediakan anggaran kepada setiap guru untuk mengikuti pelatihan sebagai wujud pengembangan keprofesian (*professional development* /PD) selama 100 jam per tahun (Wulandari, 2021). PD dapat ditempuh dalam satu blok waktu atau dalam beberapa waktu. Dua lembaga yang biasa menyediakan pelatihan bagi guru adalah NIE (*National Institute of Education*) dan AST (*Academy of Singapore Teacher*).

Bagaimana dengan Finlandia? Di samping memiliki pendidikan calon guru yang sangat baik, Finlandia juga menyediakan pelatihan guru selama 7 hari kerja yang setara dengan 50 jam setiap tahun, bagi guru yang sudah bertugas di sekolah (Sahlberg, 2011). Sebagai bentuk PD, pelatihan guru diarahkan untuk menguatkan kompetensi guru sebagai seorang profesional yang dapat mengambil keputusan dalam menangani pembelajaran di sekolahnya. Pemerintah Finlandia menyediakan dana 30 juta dolar Amerika untuk mendukung program tersebut. Pada umumnya pelatihan dilakukan oleh universitas. Di samping itu, pemerintah Finlandia memberi kesempatan guru yang umumnya sudah berpendidikan S2 untuk melanjutkan studi ke S3 (Sahlberg, 2011).

Jepang memiliki pola pengembangan profesi guru yang terprogram dengan baik. Bagi guru baru, pada tahun pertama bekerja, mereka diwajibkan mengikuti dua program pelatihan sekaligus. Pertama, mereka harus mengajar minimal 6 jam per minggu dibawah bimbingan guru senior. Kedua mengikuti pembinaan profesi yang diselenggarakan oleh pusat pengembangan profesi selama 25 hari (Yamasaki, 2016). Pada tahun kedua dan selanjutnya, guru diwajibkan mengikuti program pembinaan profesi berkelanjutan, sesuai jalur karier yang dipilihnya.



Semua guru wajib mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PD) setiap tahun. Tampaknya di Shanghai juga memiliki program pelatihan dan penghargaan terhadap guru, sehingga guru bekerja dengan baik dan ujungnya mutu pendidikan meningkat signifikan. Thomas Friedman (2013) menemukan peningkatan mutu pendidikan di Shanghai karena adanya *“a deep commitment to teacher training, peer-to-peer and constant professional development, and an insistence by the school leadership on the highest standards and a culture that respect prizes education and respect teachers.”*

Dengan anggaran yang masih terbatas, sementara jumlah guru sangat besar, kemampuan pemerintah Indonesia untuk memberikan pelatihan secara rutin kepada semua guru masih

sulit. Bagi dokter, konon banyak pabrik obat yang bersedia membiayai pelatihan, seminar dan bahkan mendatangkan ahli dari luar negeri. Untuk guru, sampai saat ini belum banyak atau bahkan langka lembaga yang melakukan pelatihan seperti itu. Mungkin bagi dunia usaha, dampak balik pelatihan guru tidak sebesar pada pelatihan dokter. CSR (*corporate social responsibility*) perusahaan juga belum banyak yang mengarah ke sana. Jadi mengandalkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru, untuk saat ini bagi dunia usaha masih belum realistis secara finansial.

Jika pelatihan secara rutin tidak dapat diharapkan, berarti guru harus belajar sendiri untuk meningkatkan kemampuannya. Muncul pertanyaan apakah guru sudah punya tradisi belajar secara mandiri seperti dokter? Kalau ternyata belum, bagaimana kalau guru didorong untuk belajar sendiri seperti para dokter? Bukankah para guru mengenal PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan dokter yang menggunakan status pasien untuk belajar. Jika dokter mempelajari obat dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, kemudian dilihat bagaimana dampaknya terhadap sakit yang dideritanya, bukankah guru juga dapat mengkaji metoda mengajar yang digunakan, kemudian dicermati respons siswa serta dampaknya terhadap hasil belajar mereka. Jika ternyata respons siswa dan atau hasil belajarnya kurang baik, dicari penyebabnya dan kemudian dicari cara yang lebih tepat.

Apakah selama ini guru sudah melaksanakan PTK? Jika sudah seperti apa dampaknya terhadap peningkatan kompetensinya. Jika belum apa sebabnya? Sampai saat ini, saya belum mendapatkan data tertulis tentang itu. Namun dari pengamatan sepintas dan dari wawancara dengan beberapa guru, ternyata guru sudah melakukan PTK, namun biasanya untuk

membuat karya ilmiah untuk keperluan kenaikan pangkat dan sejenisnya. Di luar kepentingan itu, guru kembali mengajar sebagaimana biasanya, tanpa menerapkan konsep PTK Berkelanjutan (PYK-B). PTK-B telah diteliti oleh empat LPTK, yaitu Unimed, UPI, UNY dan Unesa untuk diterapkan kepada mahasiswa PPG berkolaborasi dengan guru pamong dan dosen pembimbing, yang ternyata memberikan dampak signifikan. (Samani (Ed), 2022). Dengan menerapkan konsep PDIA (*problem driven iterative adaptation*) selama melaksanakan PTK-B, para guru menyatakan pola tersebut dapat diterapkan, sedangkan mahasiswa menyatakan mendapatkan inspirasi bagaimana mengembangkan diri ketika besok sudah bekerja sebagai guru.

Kondisi bahwa sebagian besar guru belum mengikuti pelatihan secara kontinyu dan guru hanya melaksanakan PTK jika ingin membuat karya ilmiah untuk kenaikan pangkat sangat mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak terjadi peningkatan kompetensi seiring dengan bertambahnya masa pengabdian. Oleh karena itu sudah saatnya dicari solusi untuk mengatasinya. Salah satunya mendorong guru untuk melakukan PTK-B dan kemudian mendiskusikan hasilnya dalam KKG/MGMP (Kelompok Kerja Guru/Musyawahar Guru Matapelajaran). PTK-B, pada dasarnya sama dengan PTK yang selama ini dilaksanakan oleh guru, mahasiswa dan dosen. Bedanya, PTK-B tidak diarahkan untuk karya ilmiah, tetapi untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Dengan demikian, syarat-syarat penelitian ilmiah dapat diperlonggar, sesuai dengan kondisi sekolah.

Kalau dirunut ke belakang, PTK yang dalam bahasa Inggris disebut CAR (*Classroom Action Research*) pada awalnya disebut CCR (*Classroom Centered Research*) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran (Fang Qi, 2011). CCR tidak dimaksudkan untuk menjadi karya ilmiah, walaupun kaidah

penelitian diterapkan. Kalau menggunakan istilah desain eksperimen, mungkin seperti *one shot case study* atau *class intact*, tetapi diterapkan terus menerus. Ketika mengajar, guru menerapkan strategi atau metoda tertentu kemudian ditelaah hasilnya. Berdasarkan telaah tersebut dilakukan perbaikan dan seterusnya sampai ditemukan metoda mengajar dan atau pengangkat pembelajaran yang paling efektif. Karena topik yang diajarkan selalu berganti, maka akan selalu diperlukan penyempurnaan metoda pembelajaran. Jadi jika PTK-B seperti mengembalikan PTK pada bentuk awalnya. Jika dibandingkan dengan Gambar 5.3. maka siklus PTK tidak pernah berhenti, karena dilakukan secara terus menerus.

Apakah realistis mengembalikan PTK ke bentuk asalnya, yaitu PTK-B ? Bukankah guru sudah terbiasa melakukan PTK hanya kalau akan menulis karya ilmiah untuk kepentingan kenaikan pangkat? Apakah guru punya waktu untuk melakukannya? Studi yang dilakukan oleh Tim Unimed, UPI, UNY dan Unesa menemukan pola PTK-B tersebut dapat dilakukan dengan cara “melunakkan” keketatan metoda penelitiannya. Setiap selesai mengajar, guru membuat catatan metoda mengajar apa yang dilakukan, bagaimana melaksanakannya dan bagaimana respons siswa dan capaian hasil belajarnya. Catatan Harian Guru itu di negara lain disebut *Teacher's Note* (Samani, 2022). Pada Gambar 5.3 Catatan Harian Guru merupakan hasil data dari tahap pengamatan, yang kemudian dianalisis pada tahap refleksi untuk disempurnakan pada siklus berikutnya.

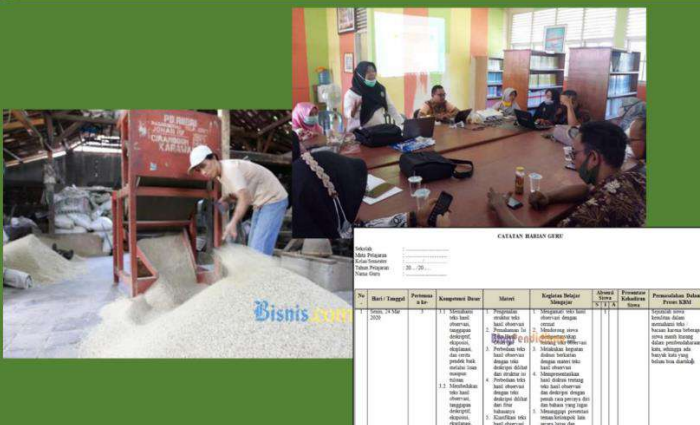
PTK-B sesuai dengan prinsip *continuous improvement* yang dijadikan slogan CPD guru. CPD Berkelanjutan juga sesuai dengan prinsip bahwa “orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dibanding kemarin, karena kalau hari ini sama dengan kemari, kita termasuk orang yang merugi”. Oleh karena itu bagi guru, proses pembelajaran yang dilaksanakan hari ini juga harus

lebih baik dibanding yang kemarin. Bahkan Catatan Harian Guru termasuk simpulan refleksi dan perbaikan pada tahap perencanaan siklus berikutnya tersebut dapat menjadi bahan karya tulis yang sangat berharga bagi pendidikan. Catatan Harian Guru dapat dijadikan bagian dari portfolio guru dalam bekerja.

KKG dan MGMP Ibarat Mesin Giling Beras

Dalam suatu acara dengan para guru dan dosen saya pernah bertanya mengapa beras yang digiling di mesin penggiling beras menjadi putih. Para guru dan dosen banyak yang menjawab karena beras dipoles oleh mesin giling. Saya jawab, bahwa beras menjadi putih karena gesekan antara butiran beras itu sendiri. Fungsi mesin giling beras adalah membuat agar butiran beras saling bergesekan. Mungkinkah prinsip itu kita terapkan dalam CPD guru? Dapatkah dirancang agar KKG/MGMP menjadi wahana bagi para guru berinteraksi satu dengan yang lain untuk saling belajar?

Pertanyaannya, bagaimana agar KKG dan MGMP dapat berperan seperti mesin giling beras, membau para guru “bergesekan” atau belajar satu dengan yang lain. Mendiskusikan masalah yang dihadapi dan mencari solusinya. Menurut informasi, selama ini pertemuan di KKG dan MGMP cenderung rutin bahkan seringkali untuk saling “meng-copy” RPP. Untuk mendinamisasinya, Catatan Harian Guru dapat menjadi bahan diskusi dalam pertemuan rutin di KKG dan MGMP. Pengalaman baik (plus) dapat menjadi bahan banding bagi guru lain, sementara pengalaman yang kurang baik (minus) dapat menjadi bahan diskusi untuk mencari solusinya. Mendiskusikan pengalaman yang sudah direkam dalam Catatan Harian Guru dengan menerapkan konsep PDIA akan dapat memicu kreativitas dalam mencari solusi yang tepat sesuai dengan kondisi sekolah yang bersangkutan.



Gambar 5.4. Analogi MGMP/ KKG dengan Penggilingan Beras

Sumber: <https://www.google.com/search?q=penggilingan+beras&tbm=isch&ved=2ahUKewiDx4XJ9o>

Sebagaimana diketahui, KKG dan MGMP yang diadaptasi dari PLC (*Professional Learning Community*) dirancang sebagai wahana bagi guru untuk bertukar pengalaman dan gagasan dalam mengelola pembelajaran serta menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berbagai studi menyimpulkan belajar sesama kolega untuk memecahkan masalah yang dihadapi merupakan cara terbaik dalam meningkatkan kompetensi guru (Samani, 2021). Jika KKG dan MGMP dapat menjadi wahana agar para guru saling belajar, maka ibarat beras semakin putih setelah digiling, para guru akan semakin profesional ketika mengikuti kegiatan KKG dan MGMP.

Di negara maju, PLC menjadi ajang mengasah kreativitas guru untuk secara bersama-sama menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Melalui PLC itu dikembangkan *indigenous solution for local problem* (penyelesaian masalah berdasar kondisi setempat), semacam PDIA (*problem driven iterative adaptation*). Di samping diyakini bahwa secara bersama-sama, guru mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, juga bahwa penyelesaian

berdasar kondisi setempat lebih bertahan lama. Bukan berarti guru tidak memerlukan tambahan pengetahuan tentang konsep dan teori baru dalam pembelajaran, tetapi konsep dan teori tersebut harus dikontekstualisasikan lebih dahulu untuk menyelesaikan masalah. Dengan demikian penerapan konsep atau teori tersebut sesuai dengan situasi setempat.

Pertanyaannya bagaimana mendinamisasi KKG dan MGMP agar menjadi “gilingan beras” bagi guru. KKG harus menjadi tumpuan bagi guru untuk belajar dan mengembangkan diri. KKG dan MGMP harus menjadi “magnet” bagi para guru, sehingga terdorong untuk mendatanginya. Untuk itu penambahan “energi” bagi KKG dan MGMP. Energi tidak harus berupa dana tetapi dapat berupa peranan yang lebih signifikan, walaupun dana memang diperlukan. KKG dan MGMP dapat diperankan sebagai partner Dinas Pendidikan dalam pembinaan keprofesionalan guru.

Memang harus diakui dengan beban mengajar 24 jam pelajaran per minggu, sementara hari kerja sekarang 5 hari per minggu, guru sangat disibukan oleh tugas mengajar. Oleh karena itu sebaiknya pengembangan diri di KKG dan MGMP menjadi bagian dari beban kerja tersebut. Toh aktivitas guru di KKG dan MGMP memang terkait erat dengan tugas mengajar, khususnya menganalisis proses dan hasil pembelajaran agar dapat disempurnakan. Bukankah guru harus terus belajar dan bahkan ada ungkapan “hanya guru yang terus belajar yang punya hak mengajar”, agar ilmu yang diberikan kepada murid bukan sesuatu yang usang.

Bagaimana dengan sekolah di daerah terpencil (3T) yang jumlah sekolahnya sedikit dan jarak antar sekolah jauh? MGMP dan KKG harus dibuat fleksibel, misalnya berbentuk KKG dan MGMP “mini” yang anggotanya hanya guru di satu sekolah atau beberapa sekolah terdekat. Guru SD, SMP, MI dan MTs dapat saja

membentuk KKG atau MGMP lintas jenis dan jenjang sekolah, yang penting dapat saling belajar, saling memotivasi antar teman. Mungkin juga pertemuan KKG dan MGMP dilaksanakan secara daring. Belajar dari era pandemi 19, ternyata daring dapat menjadi salah satu wahana rapat/pertemuan/pembelajaran.

Saat ini hampir setiap kabupaten/kota memiliki perguruan tinggi, maka kerjasama KKG dan MGMP dengan perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan. Lazimnya perguruan tinggi memiliki program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dapat digandengkan dengan program KKG dan MGMP. Kalau perguruan tinggi tersebut memiliki program studi kependidikan tentunya kerjasama sinergis dapat dibangun, karena saling memerlukan. Di Taiwan setiap dosen di LPTK wajib memiliki partner sejumlah guru untuk dapat bertukar pikiran dan bekerjasama. Seringkali kerjasama seperti berujung ada penelitian bersama untuk memecahkan masalah di sekolah dan bahkan menghasilkan artikel di jurnal ilmiah. Di Singapore hubungan antara NIE dengan sekolah dan Kementerian Pendidikan terjalin dengan baik. Di satu sisi NIE menjadi partner Pemerintah Singapore dalam pembinaan guru, di lain pihak NIE menggandeng guru-guru senior menjadi dosen dan partnernya dalam proses perkuliahan. Pemerintah Daerah dapat menjadi mediator kerjasama seperti di Taiwan dan Singapore.

Adakah pengalaman daerah yang mampu mengaktifkan KKG atau MGMP? Ternyata ada, yaitu Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kebetulan Bupati Bulungan mantan guru atau paling tidak berpendidikan guru dan faham bagaimana mengaktifkan KKB dan MGMP untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ternyata para guru merasakan manfaat aktif di KKG/MGMP ketika menghadapi banyak masalah saat terjadinya pandemi covid 19. Forum KKG dan MGMP menjadi wahana mereka bekerjasama mengatasi masalah pembelajaran saat itu. Kebetulan saat itu Kabupaten Bulungan

mendapat dukungan Program Inovasi kerjasama Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia. Program Inovasi meyakini kunci peningkatan mutu pendidikan adalah guru, sehingga peningkatan mutu guru menjadi sasaran utamanya dan KKG menjadi wahana peningkatan mutu guru tersebut.

Agar antar KKG dan MGMP dapat saling belajar, akan sangat bagus hasil-hasil diskusi di KKG dan MGMP disebarluaskan, misalnya melalui web atau media sosial lainnya. Dinas Pendidikan dapat memantau perkembangan KKG dan MGMP kemudian memberikan penghargaan kepada KKG dan MGMP yang aktif dan mampu mengembangkan inovasi guna memecahkan masalah di sekolah anggotanya. Rasanya Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat menjadi dirijen/konduktor yang meng-orchestra-kan KKG/MGMP, agar aktivitas KKG/MGMP sesuai dengan irama peningkatan profesionalisme guru. Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara telah membuktikan pola tersebut secara efektif dan efisien. Guru juga merasakan manfaatnya aktif dalam kegiatan KKG/MGMP, sehingga KKG/MGMP berjalan dengan baik. Apalagi KKG/MGMP adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah.

Perlunya Alur Karir bagi Guru

Jika PTK-B dan KKG/MGMP dapat menjadi wahana untuk meningkatkan kompetensi, muncul pertanyaan mengapa guru tidak terdorong untuk melaksanakan. Apakah beban mengajar guru terlalu banyak, sehingga tidak punya waktu untuk melakukan PTK? Apakah guru cenderung bekerja dengan rutinitas tinggi, sehingga tidak terdorong untuk belajar sambil bekerja seperti dokter? Apakah karena risiko mengajar tidak setinggi mengobati orang sakit, sehingga guru tidak terdorong untuk meningkatkan kompetensinya agar tidak salah dalam mengajar? Apakah *reward-punishment* bagi guru yang dikaitkan dengan kompetensi tidak

menantang? Atau interaksi dari dua atau lebih dari faktor tersebut?

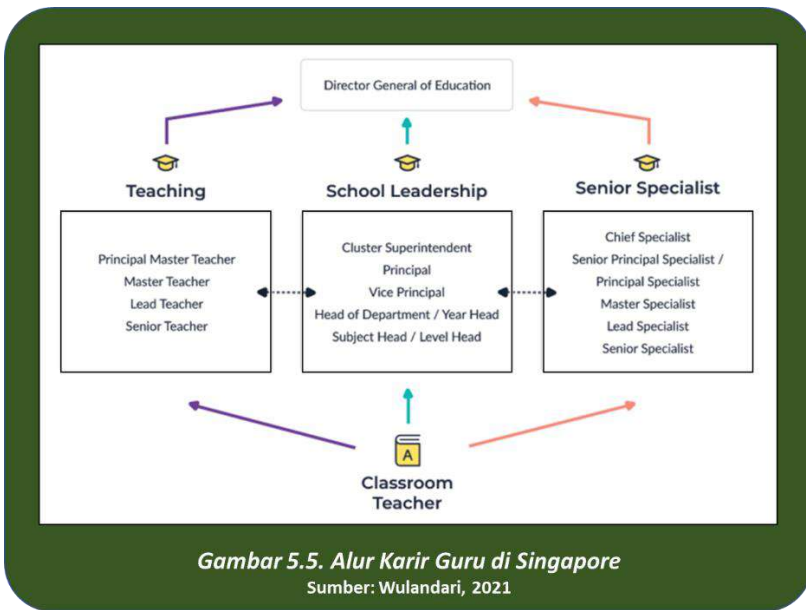
Sampai saat ini saya belum pernah membaca studi tentang kemungkinan tersebut di atas. Yang jelas guru tidak takut terancam hukuman akibat malpraktik, karena di sekolah tidak dikenal mal praktik seperti dalam dunia kedokteran. Guru juga tidak takut dihindari pasien seperti dokter, karena siswa telah terikat pada jadwal pelajaran beserta guru pengajarnya. Sekolah biasanya lebih peduli dengan kerajinan dan kepatuhan guru terhadap aturan, dibanding dengan baik-tidaknya dalam mengajar.

Jika tidak ada sangsi yang ditakuti oleh guru dalam bekerja, adakah yang dapat mendorong guru untuk meningkatkan kinerjanya? Salah satu yang menjadi impian guru adalah masa depan karirnya. Misalnya dipindah ke sekolah yang lebih baik atau dipindah ke sekolah di kota yang lebih besar, diikutkan dalam kegiatan-kegiatan tingkat daerah bahkan nasional, diangkat menjadi wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, menjadi pejabat di Dinas Pendidikan atau pejabat di kantor pemerintahan dan sebagainya.

Mengapa perkembangan karir menjadi impian guru? Teman yang mendalami psikologi sosial mengatakan bahwa guru adalah manusia biasa yang tentu ingin memiliki masa depan yang baik. Jabatan dan atau keterlibatan dalam kegiatan yang bergengsi biasanya dimaknai sebagai indikator karier ke masa depan. Apalagi dengan jabatan yang baik dan terlibat pada kegiatan-kegiatan tingkat daerah atau nasional biasanya juga memberi dampak penghasilan yang meningkat. Di samping itu bagi masyarakat di Indonesia, jabatan dan keterlibatan penting di tingkat daerah atau nasional dimaknai sebagai peningkatan gengsi.

Apakah gengsi begitu penting bagi guru? Saya pernah menanyakan kepada alumni Unesa yang menjadi guru honorer di sebuah sekolah, dengan honor tidak besar. Saya tanya mengapa mau? Bukankah menjadi “pasukan kuning” (petugas kebersihan Pemkot Surabaya) mendapat gaji lebih besar karena mendapatkan gaji UMR (upah minimal regional) yang jauh lebih besar dari honor yang diterimanya? Menurut guru honorer tersebut, menjadi guru honorer lebih bergengsi dibanding pasukan kuning, walupun penghasilannya lebih rendah. Apalagi dengan menjadi guru honorer dapat peluang suatu saat menjadi guru tetap bahkan menjadi PNS.

Apakah jenjang karier guru di Indonesia tidak menjanjikan? Atau jenjang karier tersebut kurang jelas bagi guru? Di Singapore guru memiliki tiga pilihan karir, yaitu *teaching track*, *leadership track*, dan *specialist track* (Wulandari, 2021). *Teaching track* untuk mereka yang ingin menekuni karier di bidang pembelajaran dengan karier puncak sebagai *principal master teacher*. *Leadership track* untuk mereka yang ingin menekuni karier manajemen, dengan karier puncak cluster superintendent. *Specialist track* untuk mereka yang ingin menekuni bidang-bidang khusus, misalnya kurikulum, evaluasi dan sebagainya. Karier puncak mereka adalah *chief specialist*. Yang menarik, untuk menapaki jenjang karier tersebut disediakan pelatihan dan CPD lainnya. Di samping itu juga dimungkinkan guru berpindah jalur karir.



Gambar 5.5. Alur Karir Guru di Singapore

Sumber: Wulandari, 2021

Pola yang mirip terjadi di Afrika Selatan. Penelitian Sayed dan de Kock (2019) menyimpulkan bahwa guru di Afrika Selatan memiliki tiga pilihan jalur karir (*career path*), yaitu *teaching and learning pathway*, *management and leadership pathway*, dan *educational planning, research and/or policy development pathway*. Para guru yang mengambil jalur karir *educational planning, research* dan *policy development* yang kemudian menjadi perancang berbagai kebijakan pendidikan. Namun demikian sebelumnya mereka harus sudah memiliki pengalaman di sekolah. Oleh karena itu banyak dari mereka yang pada awalnya berada di jalur *teaching and learning* maupun *management and leadership* kemudian pindah ke jalur *educational planning*.

Di Finlandia yang konon memiliki pendidikan yang sangat baik, saya tidak menemukan dokumen yang secara jelas menyebutkan peta karir guru. Menurut Sahlberg (2011) sekolah di Finlandia sangat otonom, sehingga memiliki tim pengembang

kurikulum dan berbagai kebijakan operasional sekolah. Pola itu didukung oleh pendidikan guru yang menyiapkan mereka sebagai peneliti, sehingga mampu merancang kurikulum, pembelajaran dan kegiatan pendukung lainnya. Semua kepala sekolah di Finlandia berasal dari guru yang baik dan memiliki kemampuan manajerial. Semua pejabat pendidikan di tingkat daerah memiliki pengalaman sebagai guru. Dengan demikian, walaupun tidak diatur secara eksplisit dapat ditafsirkan bahwa menjadi kepala sekolah dan birokrasi pendidikan merupakan jalur karir guru.

Bagaimana dengan Indonesia? Apakah ada peta karir guru yang memang dirancang secara jelas? Menurut Peraturan MenpanRB Nomer 16 Tahun 2009, terdapat empat jenjang jabatan fungsional guru, yaitu guru pertama, guru muda, guru madya dan guru utama. Menurut PermenpanRB tersebut secara periodik kinerja guru dinilai dengan menggunakan angka kredit dan jumlah angka kredit yang diperoleh guru tersebut yang menjadi dasar penetapan jabatan fungsional guru.

Jika dicermati kinerja guru yang dinilai dengan angka kredit tersebut terkait dengan tugasnya mengajar dan membimbing siswa. Kalau dijejerkan dengan jalur karir guru di Singapore dan Afrika Selatan, apa yang disebutkan dalam kedua Permen tersebut adalah jalur *teaching and learning*. Misalnya untuk guru kelas, kinerja yang dinilai mencakup:

- 1) menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
- 2) menyusun silabus pembelajaran;
- 3) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
- 4) melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- 5) menyusun alat ukur soal sesuai mata pelajaran;
- 6) menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
- 7) menganalisis hasil penilaian pembelajaran;

- 8) melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
- 9) melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
- 10) menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
- 11) membimbing guru pemula dalam program induksi;
- 12) membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
- 13) melaksanakan pengembangan diri;
- 14) melaksanakan publikasi ilmiah; dan
- 15) membuat karya inovatif.

Apakah guru di Indonesia tidak memiliki jalur karir manajemen dan peneliti/pengembang? Sampai saat ini saya belum menemukan dokumen yang memuat penjelasan jalur manajemen untuk karier guru. Memang ada Permendikbud Nomer 6 Tahun 2018 dan Permendikbudristek Nomer 40 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah. Hanya saja pada kedua Kepmen tersebut hanya menjelaskan syarat guru untuk menjadi kepala sekolah dan tidak menjelaskan skema jalur yang harus ditempuh guru yang ingin berkarir di bidang manajemen. Demikian pula pada Permendikbudristek Nomer 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah hanya memuat syarat untuk menjadi kepala sekolah, salah satunya memiliki sertifikat guru penggerak, tetapi tidak memuat alur guru untuk jalur manajemen.

Apakah guru juga dapat menjadi pejabat di Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Pendidikan? Kenyataannya ada. Beberapa pejabat Dinas Pendidikan dan bahkan Kementerian Pendidikan yang berasal dari guru. Namun tidak ditemukan dokumen yang menjelaskan jalur yang perlu ditempuh oleh guru untuk mencapai jabatan tersebut. Mungkin guru yang menjadi

pejabat di Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Pendidikan tersebut memiliki keistimewaan sehingga walaupun tidak didesain, akhirnya dipilih menduduki jabatan tertentu.

Bagaimana jalur karir guru yang ingin menjadi peneliti, pengembangan kurikulum dan sebagainya? Sampai saat ini saya juga belum menemukan petanya. Sekarang para pengembang kurikulum dan peneliti bidang pendidikan di berbagai lembaga penelitian banyak yang tidak berlatarbelakang guru dan sebaliknya tidak banyak guru yang masuk ke profesi itu. Pada hal menurut saya bekal pengalaman lapangan sebagai guru sangat penting untuk profesi tersebut, agar dapat memadukan aspek teori yang diperoleh dari pendidikan dan bacaan referensi dengan pengalaman praktis di lapangan.

Sudah waktunya Indonesia punya peta alur karir guru yang menggambarkan bagaimana alur karir guru serta apa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dengan demikian sejak awal, guru dapat menata diri untuk memilih dan menempuh jalur karir yang diinginkan. Menurut saya TNI memiliki alur karir yang dapat dijadikan bahan banding. Promosi dan perpindahan dinas di TNI berjalan dengan baik, karena adanya peta alur karir tersebut.

Memerankan LPTK dan Organisasi Profesi Guru

Pada suatu saat di forum yang diadakan oleh LPTK saya bertanya kepada para dosen, mengapa Astra membuat anak perusahaan bernama Mobil 88 yang bisnisnya jual beli mobil bekas? Pada hal Astra adalah dealer mobil yang tentu dagangannya mobil baru. Bukankah dengan membuat Mobil 88 akan menurunkan minat orang membeli mobil baru? Beberapa teman menjawab untuk mengembangkan bisnis baru, karena banyak orang Indonesia yang senang membeli mobil bekas. Mendengar jawaban itu saya ajukan pertanyaan berikutnya, mengapa dealer mobil VW mau menjadi sponsor kegiatan VW

Club yang memerlukan dana tidak sedikit. Ternyata teman-teman pada bingung, mengapa dealer VW mau mengeluarkan uang untuk menyponsori kegiatan VW Club yang tentu tidak mendatangkan uang.

Karena tidak ada lagi teman yang mengajukan pendapat, saya menceritakan ulang apa yang dijelaskan teman yang berprofesi sebagai direktur sebuah dealer mobil. Menurut beliau, pengusaha harus berpikir jangka panjang bukan jangka pendek. Astra membuka Mobil 88 untuk mengendalikan harga mobil bekas dari merk yang diageni. Mengapa harus dijaga? Agar konsumen yakin kalau mobil baru yang dibeli, kalau nanti dijual harganya tetap tinggi. Mengapa dealer VW mau menyponsori VW Club, karena ingin membuat ikatan psikologis para pemilik VW. Teman pengusaha tadi mengatakan konsumen adalah raja yang harus dijaga loyalitasnya. Pengusaha ingin para konsumen yakin bahwa mobil yang dibeli merupakan barang istimewa melebihi mobil merk lain.

Jika untuk membuat konsumen loyal, mengapa hal-hal tersebut yang dilakukan? Karena yang dijual adalah “benda mati”, sehingga ketika sudah keluar dari pabrik tidak lagi dapat ditingkatkan mutunya. Hanya jika ada produk mobil yang gagal akan ditarik untuk diperbaiki. Peningkatan mutu baru dapat dilakukan pada produk berikutnya. Oleh karena itu yang ditempuh adalah bagaimana agar konsumen merasa tidak keliru membeli mobilnya dan jika nanti ingin berganti mobil tetap membeli mobil merk tersebut. Itulah tujuan dari pendirian Mobil 88 oleh Astra dan kesediaan dealer VW menjadi sponsor VW Club.

Hampir setiap dealer mobil dan motor mendirikan bengkel untuk servis. Apakah itu bisnis yang menguntungkan? Jawabnya ya, tetapi misi utamanya bukan itu. Misi utamanya adalah agar para konsumen merasa nyaman dan yakin bahwa mobil dan motor

yang diberi mendapatkan perawatan dari ahlinya. Bahkan ada produsen mobil yang mengizinkan *home industry* membuat *spare parts* tiruan yang biasanya disebut “KW”, tetapi disupervisi agar mutunya terjaga. Mengapa itu dilakukan? Agar konsumen dapat memperoleh spare parts dengan harga murah, karena yang asli, biasanya disebut “ORI” sangat mahal karena import.

Bagaimana dengan LPTK sebagai produsen guru? Apakah memiliki program untuk menumbuhkan loyalitas bagi pengguna lulusannya? Apakah memiliki program untuk meningkatkan mutu guru yang sudah di lapangan agar pengguna merasa puas dengan mutu guru yang direkrutnya? Sampai saat ini saya belum pernah membaca naskah dan data yang terkait dengan program seperti itu. Memang beberapa LPTK memberikan pelatihan guru pamong, tetapi itu dimaksudkan untuk mendukung program PPL. Memang ada beberapa LPTK yang mengadakan pelatihan guru, tetapi sifatnya temporer dan tidak terprogram secara kontinyu. Memang ada dosen LPTK yang bekerjasama dengan guru untuk melakukan penelitian, tetapi itu sifatnya individual dan temporer. Saya juga belum pernah mendengar atau membaca tulisan tentang bagaimana LPTK menjaga loyalitas pemakai lulusannya.

Ketika berkunjung ke Taiwan, saya mendapat penjelasan bahwa dosen di NTNU (National Taiwan Normal University), semacam LPTK, setiap dosen memiliki beberapa guru sebagai partner dalam berbagai aktivitas ilmiah, sekaligus sebagai binaannya. Menurut dosen senior di NTNU program tersebut dilaksanakan secara kontinyu dan sudah menjadi kebijakan nasional dengan tujuan ganda. *Pertama*, untuk memberi kesempatan bagi dosen untuk memahami problema pendidikan di lapangan sehingga memperkaya hasil kajian teori yang dimiliki. *Kedua*, memberi kesempatan bagi guru untuk mendapatkan informasi terkait konsep dan teori pendidikan mutakhir. *Ketiga* memberi kesempatan kepada dosen dan guru untuk melakukan

penelitian bersama yang ternyata dapat menghasilkan temuan-temuan yang terkait dengan pemecahan masalah pendidikan dan bahkan teori baru.

Mungkinkah itu diterapkan di Indonesia? Dengan jumlah LPTK sebanyak sekitar 1.500 buah dan jumlah prodi sekitar 5.000 buah yang kampusnya tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, maka pola kerjasama dosen-guru seperti di Taiwan tidak sulit untuk diterapkan. Yang diperlukan adalah kesadaran bersama antara “pemilik dosen” dan “pemilik guru” bahwa pola tersebut menguntungkan kedua belah pihak dan dalam jangka panjang akan memperbaiki mutu pendidikan di tanah air. Kampus tidak boleh merasa superior dibanding sekolah, karena sekolah memiliki pengalaman bagaimana mengatasi problema di sekolah. Sekolah juga tidak perlu merasa superior, karena berbagai teori dan hasil penelitian mutakhir telah dibahas di kampus. Memang kerjasama antara dosen dan guru memerlukan adaptasi, untuk menghilangkan gap psikologi, karena perbedaan latar belakang pekerjaan. Namun pengalaman Unimed, UPI, UNY dan Unesa membangun kerjasama seperti gap dapat hilang dalam beberapa bulan (Samani, 2022).



Gambar 5.6a. Pelatihan Guru oleh LPTK



Gambar 5.6b. Kegiatan KKG/MGMP



Gambar 5.6c. Pelatihan Guru oleh Organisasi Profesi Guru

Bagaimana dengan organisasi profesi guru? Saat ini ada beberapa organisasi profesi guru, walaupun ada pihak yang mempertanyakan apakah organisasi tersebut merupakan organisasi profesi. Mungkin yang paling tua adalah PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang menurut catatan berdiri 25 November 1945, tiga bulan setelah Indonesia merdeka. Beberapa organisasi yang lain, PERGUNU (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama) yang berdiri 14 Februari 1959, FGM (Forum Guru Muhammadiyah), IGI (Ikatan Guru Indonesia) yang berdiri 26 November 2009, PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia) yang berdiri pada 23 Januari 2011, FSGI ((Federasi Serikat Guru Indonesia), Persatuan Guru Swasta Indonesia dan masih ada beberapa lainnya. Dari ukuran, organisasi profesi guru ada yang sangat besar dan berskala nasional dengan cabang di propinsi dan kabupaten/kota. Namun juga ada yang masih kecil dan hanya ada di beberapa kota besar. Ada juga yang merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan tertentu sebagai induknya.

Bagaimana peran organisasi tersebut dalam meningkatkan profesionalitas anggotanya? Sangat bervariasi tetapi rata-rata belum maksimal. Pada umumnya mereka masih lebih memprioritaskan masalah kesejahteraan guru, karena memang untuk guru non PNS kesejahteraan mereka masih belum baik, sehingga perlu diperjuangkan. Frekuensi dan kontinuitas kegiatan yang dilakukan juga sangat bervariasi. Ada organisasi profesi guru yang punya kegiatan rutin, tetapi ada juga masih temporer dan bahkan ada yang baru muncul berkegiatan pada momen-momen tertentu.

Dari beberapa sumber saya mendapat informasi bahwa keuangan organisasi profesi guru juga masih sangat terbatas. Memang bagi yang sudah besar dan atau memiliki link dengan lembaga tertentu, baik pemerintahan maupun swasta mereka memiliki sumberdana cukup lumayan. Namun bagi yang masih

kecil apalagi tidak memiliki link dengan lembaga lain, keuangan mereka kasih sangat kecil. Mereka menyebutnya “gresek-gresek”, artinya setiap kali akan mengadakan kegiatan harus mencari sumbangan dulu. Walaupun demikian, semua organisasi profesi tersebut optimis akan eksistensinya dan ingin meningkatkan profesionalitas anggotanya.

Beberapa ahli mengatakan, memang kaum profesional itu harus mendapatkan gaji bagus (*well paid*), tetapi untuk itu harus berpendidikan baik (*well educated*) dan berkinerja tinggi (*highly performance*). Jadi upaya organisasi profesi memperjuangkan kesejahteraan perlu dibarengi upaya untuk memingkatkan kemampuan para anggotanya. Harus diakui dengan keuangan dan sumberdaya yang terbatas, sementara untuk memungut iuran dari anggota juga sangat berat, karena umumnya berasal dari guru non PNS dengan penghasilan terbatas, maka diperlukan kiat dan terobosan untuk dapat meningkatkan kemampuan anggota.

Beberapa organisasi sudah melakukan pelatihan dan workshop serta pendampingan ketika guru melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat. Ada juga organisasi profesi yang memfasilitasi anggotanya untuk berbagi pengalaman melalui forum diskusi dan majalah atau jurnal ilmiah. Forum tersebut ada yang tatap muka, tetapi dengan pengalaman masa pandemi covid 19, kemudian banyak yang melakukannya secara daring. Namun semuanya masih sangat terbatas dan belum bersifat kontinyu. Mungkin sumberdaya dan sumberdana organisasi profesi guru juga terbatas.

Memahami adanya potensi yang “berserakan” tersebut, diperlukan upaya mensinergikan. Bagaimana agar berbagai lembaga tersebut dapat berbagi peran dan bersinergi untuk meningkatkan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Sebagai pemilik kebijakan, pemerintah melalui Dinas Pendidikan

sebaiknya menjadi konduktor agar “orchestra” dari berbagai lembaga tersebut, sehingga pembinaan kompetensi guru dapat dengan baik. Misalnya sebagai “pemilik anggota organisasi profesi dapat menjadi organizer, sementara LPTK sebagai “pemilik SDM” dapat menjadi narasumber/instruktur, KKG/MGMP dapat menjadi katalisator para guru, dan Dinas Pendidikan dapat menjadi “konduktornya”. Dengan pola itu tumpang tindih kegiatan di satu pihak dan keterlewatan di pihak lain dapat dihindari.

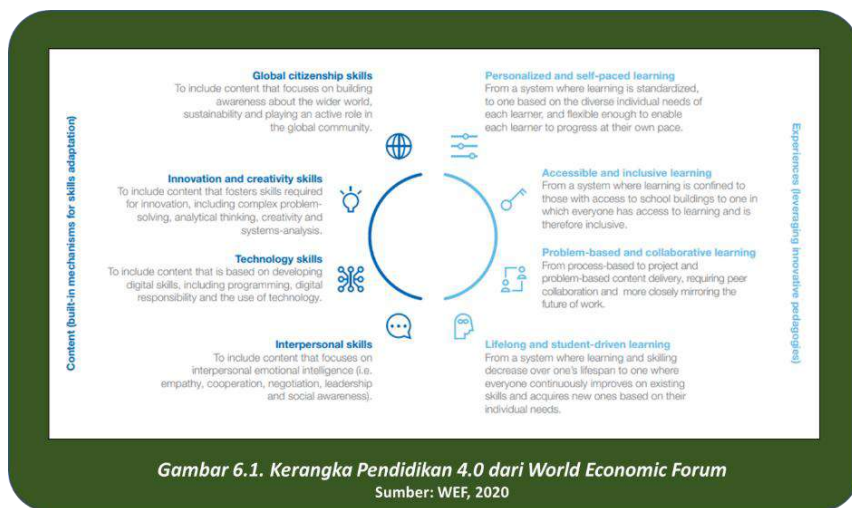
APA TANTANGAN GURU DI ERA *GREAT SHIFT*?

Tahun 2020 World Economic Forum (WEF) menerbitkan buku berjudul *School of the Future: Defining New Model of Education for the Forth Industrial Revolution*. Tulisan itu tampaknya bertolak dari perkembangan ilmu dan teknologi yang cepat dan terus semakin cepat sebagaimana ditunjukkan oleh Kondratieff Cycle pada Gambar 3.8. Teknologi baru tersebut mengubah pola kerja dan pola kehidupan. Pekerjaan yang sifat berulang mulai digantikan oleh mesin atau robot yang jauh lebih presisi. Software telah menggantikan berbagai pekerjaan manusia yang sebelumnya memerlukan waktu lama dan penuh ketelitian. Karena ilmu dan teknologi terus berkembang, maka perubahan pola kerja dan pola kehidupan itu juga akan terus terjadi dan bahkan seringkali terjadi lompatan (*discontinuity*). Beberapa ahli menyebut kita sedang memasuki era *great shift* (perubahan besar).

Di tengah era *great shift* tersebut, pola pendidikan di sekolah saat ini dinilai tidak cocok, karena bertolak dari pemikiran bahwa ilmu dan teknologi yang harus dipelajari siswa sudah diketahui. Pendidikan saat ini bertolak dari asumsi bahwa permasalahan kehidupan yang dihadapi manusia sudah diketahui bahkan sudah diketahui pemecahannya dan itu yang diajarkan kepada siswa. Pada hal ilmu dan teknologi yang nanti dihadapi oleh anak didik setelah lulus belum diketahui. Problem kehidupan yang nanti dihadapi juga belum diketahui apalagi pemecahannya. Konsep atau teori atau teknologi yang saat ini dipelajari oleh siswa bukan mustahil sudah usang dan digantikan oleh yang baru saat anak-anak lulus dan terjun ke masyarakat. Pemecahan masalah yang saat ini dipelajari siswa di sekolah bukan mustahil tidak berguna saat yang bersangkutan lulus dan bekerja, karena

masalahnya sudah tidak ada lagi. Setelah lulus siswa dipaksa mengatasi masalah yang belum pernah dipelajari saat sekolah dan untuk itu harus menggunakan teknologi yang juga belum dipelajari saat sekolah.

Untuk menghadapi era *great shift* tersebut, WEF mengajukan konsep *school of the future* (sekolah masa depan). Sekolah tersebut diyakini cocok untuk menyiapkan anak didik menghadapi era *great shift* yang penuh ketidakpastian. Sekolah yang menyiapkan anak agar mampu menyelesaikan masalah yang belum dipelajari saat sekolah dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan saat sekolah (*solving the problem that has not existed yet, using technology that has not invented yet*). Dengan demikian kurikulum tidak lagi berbasis kompetensi (*competence based*) tetapi berbasis kapasitas (*capacity based*) yang lebih menekankan kepada bekal kemampuan dasar dan kemampuan belajar (*learning to learn and learning to unlearn*).



Gambar 6.1 menunjukkan Kerangka Pendidikan 4.0 yang diajukan oleh WEF. Kerangka pendidikan tersebut mengubah

secara mendasar orientasi pendidikan, mulai dari kurikulum sampai pada proses pembelajaran. Konten kurikulum bertumpu empat kecakapan (*skills*) yaitu *global citizenship skills, innovation and creativity skills, technology skills* dan *interpersonal skills*. Pembelajaran bertumpu pada empat model, yaitu *personalized and self-paced learning, accessible and inclusive learning, problem based and collaborative learning*, dan *life long and student-driven learning*.

Kerangka Pendidikan yang diajukan oleh WEF sangat mungkin akan menjadi trend, karena sampai saat ini sudah ada 87 negara yang mencobakan. Bahkan sudah ada sekolah di Indonesia yang menerapkan. Jika kemudian semakin banyak sekolah menerapkan pola tersebut, tentulah guru harus mampu menyesuaikan diri dan meningkatkan kemampuan agar dapat melaksanakan model pembelajaran dan siswa mampu mencapai kompetensi yang diinginkan. Namun demikian, sebelum membahas kemampuan guru yang harus ditingkatkan, lebih dahulu akan dibahas model pembelajaran dan kemampuan siswa yang dikehendaki oleh WEF.

Jika dicermati dengan saksama, konten pendidikan diajukan oleh WEF tersebut tampak sejalan dengan apa yang selama ini dikenal sebagai kompetensi abad 21 (*21st century skills*) yang biasa disebut dengan 4-C itu *critical thinking, creativity, communication and collaboration*. Juga sangat mirip dengan yang diajukan oleh Trilling dan Fadel (2009) yaitu: (1) *Learning and innovation skills* yang terdiri dari *Critical thinking and problem solving Communications and collaboration Creativity and innovation*; (2) *Digital literacy skills* yang terdiri dari *Information literacy Media literacy Information and communication technologies (ICT) literacy*; (3) *Career and life skills*, yaitu *Flexibility and adaptability Initiative and self-direction Social and cross-cultural interaction Productivity and accountability Leadership and responsibility*. Di

Indonesia apa yang diajukan oleh WEF juga bukan sesuatu yang baru. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai turunan Kurikulum 2013, yaitu Permendikbud Nomer 20 Tahun 2016 dan Permendikbud Nomer 34 Tahun 2018 bahkan Permendikbudristek Nomer 5 tahun 2022 sebagai revisinya, tampaknya sejalan dengan konten yang diajukan WEF. Kurikulum Merdeka yang saat ini sudah diujicoba di Sekolah Penggerak dan sekarang mulai diterapkan, tampaknya juga sejalan dengan konsep tersebut. Dengan demikian dapat diduga ke depan kurikulum yang ada sekarang ini akan tetap dapat digunakan, walaupun sekolah bertransformasi sebagaimana disarankan oleh WEF.

Dalam tataran konsep, model pembelajaran yang diajukan juga bukan merupakan sesuatu yang baru. *Personalized and self-paced learning* yang diajukan oleh WEF sangat mirip dengan pembelajaran berdiferensiasi yang pernah ditulis oleh Conny Semiawan (1992). *Accessible and inclusive learning* telah menjadi pegangan ketika Indonesia merintis sekolah inklusi. *Problem based and collaborative learning* telah diajukan oleh Arends (1983) dan Trilling and Fadel (2009) yang kemudian dijadikan rujukan Kurikulum 2013. *Life long and student driven learning* sangat mirip dengan *heutagogy* yang diajukan oleh Blaschke (2012) dan *life based learning* yang diajukan oleh Staron (2011). Kurikulum Merdeka yang sekarang sedang diluncurkan oleh Kemdikbudristek juga tidak jauh dari konsep-konsep tersebut. Jadi baik konten maupun model pembelajaran yang diajukan oleh WEF tersebut dalam tataran konsep bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia.

Bagaimana Mengintegrasikan Konten Kurikulum atau SKL dengan Materi Ajar.

Jika konten kurikulum yang disebut oleh WEF itu identik dengan SKL dalam kurikulum kita dan model pembelajaran

tersebut bukan sesuatu yang baru, mengapa menjadi tantangan bagi guru? Sebelum menjawabnya, kita coba apakah pembelajaran yang diamanatkan Kurikulum 2013 dan juga Kurikulum Merdeka tersebut sudah berjalan dengan baik di lapangan. Sampai saat naskah ini ditulis, saya belum pernah membaca laporan tentang itu. Namun ketika bertanya ke beberapa teman peneliti, saya mendapatkan jawaban kelakar “dokumen kurikulum memang berganti tetapi apa yang terjadi di kelas belum banyak berubah”. Padahal Kurikulum 2013 sudah dilaksanakan sejak 10 tahun lalu dan Kurikulum Merdeka juga telah dijadikan materi pelatihan guru dan bahkan diterapkan di sekolah-sekolah penggerak. Ternyata konsep yang baik belum tentu otomatis berjalan di lapangan.

Mengapa demikian? Diskusi dengan beberapa rekan guru dan juga dosen LPTK yang sering mendampingi mahasiswa saat PPL diperoleh beberapa informasi sebagai berikut. *Pertama*, pada umumnya guru masih terjebak pada pemahaman bahwa konten kurikulum versi WEF atau SKL dalam kurikulum kita, merupakan hal berbeda dengan materi pelajaran. Misalnya untuk materi IPA untuk Kelas 4 SD memuat antara lain energi matahari, energi panas bumi, energi air dan energi angin. Untuk Pendidikan Kewarganeraan (PKn) Kelas IV SD antara lain memuat Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Propinsi dan sebagainya. Tugas guru adalah membimbing siswa agar dapat memahami materi tersebut dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, inovasi dan kewargan global, para guru bingung, sebagaimana diamanatkan oleh SKL, guru menjadi bingung. Banyak guru yang menyatakan bahwa materi ajar dan konten yang diajukan oleh WEF atau SKL dalam kurikulum kita merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat digabungkan.

Ketika dikatakan bahwa berpikir kritis, kreatif dan inovatif itu merupakan level atas dari taksonomi Bloom yang sering disebut *high order thinking* (HOT), masih banyak guru yang belum faham. Bagaimana kaitan taksonomi Bloom dengan materi ajar tampaknya masih menjadi masalah bagi sebagian besar guru kita. Banyak guru SD belum faham bagaimana cara melakukan analisis (salah satu level di taksonomi Bloom) terhadap Pemerintahan Desa (materi Kelas IV SD). Mereka juga belum faham seperti apa contoh kreativitas siswa ketika belajar energi panas bumi (materi ajar Kelas IV SD). Banyak guru belum faham bahwa dalam mempelajari Pemerintahan Desa, siswa dapat hanya menghafal saja, tetapi juga dapat sampai memahami, atau bahkan sampai dapat menganalisis atau lebih dari itu sampai dapat mengevaluasinya. Para guru tahu taksonomi Bloom tetapi belum tahu bagaimana itu diterapkan terhadap materi yang diajarkan. Apalagi jika dikaitkan dengan kemampuan komunikasi dan kolaborasi, yang seakan tidak ada hubungannya ketika siswa belajar Matematika dan IPA.

Merenungi informasi tersebut, saya jadi teringat problem saat Kemendikbud mengembangkan Pendidikan Karakter pada tahun 2010an. Guru dengan cepat memahami konsep dan pentingnya Pendidikan Karakter, namun merasa kesulitan untuk melaksanakannya, apa lagi mengevaluasi hasilnya. Saat itu banyak guru berpendapat Pendidikan Karakter merupakan tugas guru Agama dan guru BK, serta guru pembimbing kegiatan ekstrakurikuler. Mengapa demikian? Karena guru matapelajaran lain memiliki tugas membimbing siswa menguasai materi pelajaran, seperti yang dicontohkan di atas. Ketika disampaikan bahwa Pendidikan Karakter merupakan tugas semua guru, mereka setuju tetapi belum tahu bagaimana cara melaksanakannya.

Kedua, sebagian besar guru telah nyaman dengan pola pembelajaran yang selama ini diterapkan. Meminjam istilah dalam

Fisika, mereka dalam posisi stabil sehingga untuk mengubah posisi tersebut diperlukan energi cukup besar. Meminjam istilah yang digunakan oleh Rogers (1983) mereka telah menjadi *early majority* dan *late adopter* yang artinya harus lebih dahulu melihat bagaimana orang lain melaksanakan, baru setelah itu akan menirunya. Kenyamanan itu terjadi karena tidak adanya ancaman terhadap pekerjaan mereka. Toh, selama ini siswa yang diajar juga selalu naik kelas, siswa kelas VI SD juga lulus semua, siswa kelas IX SMP juga lulus semua, siswa kelas XII SMA/SMK juga lulus semua. Ketika ada program Penilaian Kinerja Guru (PKG) hasilnya juga bagus-bagus. Kenaikan golongan bagi yang PNS juga tidak ada kendala serius. Dengan demikian para guru merasa pembelajaran yang selama dilaksanakan sudah baik.

Jadi tantangan bagi guru adalah bagaimana mengintegrasikan konten pendidikan yang diajukan oleh WEF atau yang diajukan oleh Trilling dan Fadel sama dengan ketika mereka harus mencapai SKL yang dituntut Kurikulum 2013 atau Kurikulum Merdeka. Beberapa ahli menyarankan agar materi ajar dianggap sebagai wadah dan aspek-aspek konten yang diajukan oleh WEF atau SKL dalam kurikulum kita sebagai level capaian. Jika materi ajar “bumi sebagai magnet” di IPA (Fisika) Kelas IX SMP dikaitkan dengan konten kurikulum dari WEF atau SKL kurikulum kita, maka pembelajaran harus mengembangkan: “kreativitas dan inovasi siswa yang terkait dengan bumi sebagai magnet”; “kemampuan siswa mengkomunikasikan bumi sebagai magnet; kemampuan siswa dalam bekerjasama menyelesaikan tugas yang terkait dengan bumi sebagai magnet” dan sebagainya. Tentu tidak semua konten kurikulum yang diajukan oleh WEF atau SKL dalam kurikulum kita dapat, dikaitkan dengan setiap matapelajaran. Misalnya tidak mudah menggandengkan konten *global citizen skill* dengan materi bumi sebagai magnet. Konten tersebut akan sangat relevan dengan materi dalam matapelajaran IPS. Disinilah pentingnya guru memahami konsep konten

kurikulum yang diajukan WEF, disamping materi ajar yang diampunya.



Pencapaian kreativitas dan inovasi yang terkait dengan bumi sebagai magnet, kemampuan mengkomunikasikan bumi sebagai magnet dan sebagainya itu, harus *by design*, bukan digantungkan kepada efek ikutan dan harus secara sengaja diukur bagaimana hasilnya. Bertolak dari pengalaman “Program Inovasi” mendampingi guru SD dan MI dan pendampingan guru di Sekolah Penggerak oleh Kemendikbudristek, maka perlu dicari pola pendampingan yang efektif bagi guru agar segera mampu mengintegrasikan konten kurikulum dari WEF atau SKL dengan materi ajar. Pendampingan oleh instruktur dapat dilakukan secara individual atau kelompok kecil, sampai yang bersangkutan dapat melaksanakan keterampilan yang diinginkan. Model pelatihan secara teorik dengan ceramah dan dilaksanakan secara masal ternyata kurang efektif. Untuk itu KKG dan MGMP dapat menjadi wadah pendampingan, sedangkan pendamping dapat diambil dari pengawas, widyaiswara dan dosen LPTK yang sebelumnya telah dilatih. Pendamping (biasanya disebut

Fasilitator Daerah/Fasda) pada “Program Inovasi” maupun pendamping pada Sekolah Penggerak pada umumnya pada dosen LPTK dan Pengawas. Lebih dari itu diperlukan Sistem Penjaminan Mutu, baik di level sekolah, KKG/MGMP dan Dinas Pendidikan untuk memastikan pengintegrasian tersebut telah berjalan dengan baik.

Menurut saya LPTK sebagai penghasil calon guru juga harus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah di atas. Jangan sampai setiap tahun kita mendapatkan guru baru yang belum faham bagaimana mengintegrasikan SKL dengan materi ajar. Dalam perkuliahan kelompok matakuliah PBM (Proses Belajar Mengajar), misalnya matakuliah Perencanaan Pembelajaran, mahasiswa belajar dan praktik bagaimana mengintegrasikan SKL dengan materi ajar dan kemudian diterapkan ketika mahasiswa melaksanakan *microteaching*. Dengan demikian integrasi SKL dengan materi ajar memang dirancang sejak awal, diterapkan di kelas dan nanti diukur hasilnya ketika proses pembelajaran selesai. Ketika mahasiswa menempuh PPG, kemampuan mengintegrasikan SKL dengan materi ajar tersebut juga harus menjadi perhatian.

Bagaimana Guru Dapat Memanfaatkan Teknologi Pencari Informasi

Ketika guru didorong untuk menerapkan *self learning*, *problem based learning*, *project based learning* banyak yang mempertanyakan apakah siswa dapat mencari sendiri konsep, teori untuk dipelajari. Banyak guru yang masih merasa dirinya merupakan satu-satunya sumber informasi yang terkait dengan matapelajaran yang diampunya. Ketika terjadi pandemi covid 19 dan pembelajaran dilaksanakan dengan daring, sebagian besar guru mensuplai bahan ajar ke murid dengan berbagai cara, misalnya lewat bahan tertulis yang dikirim ke rumah siswa, lewat WA dan sebagainya. Tidak banyak guru yang mendorong dan

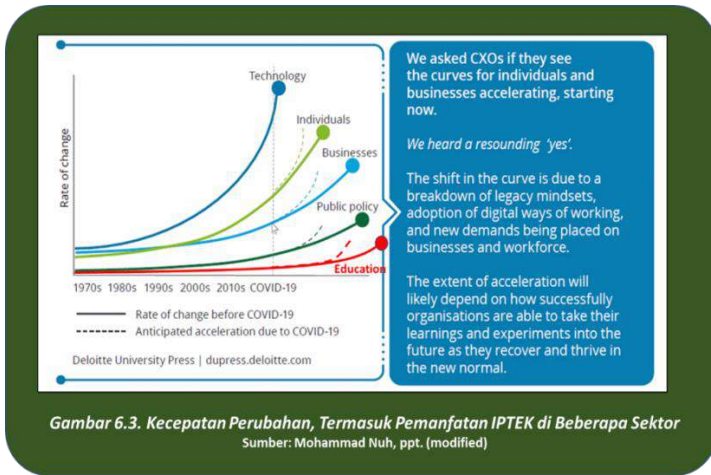
membimbing muridnya untuk mencari sumber belajar lain melalui internet atau layanan digital lainnya. Ketika siswa sudah memiliki bahan ajar, baik yang diberikan oleh guru ataupun didapat dari sumber lain, kemudian guru menjelaskan. Guru merasa wajib menjelaskan karena tidak yakin, muridnya dapat mempelajari sendiri materi tersebut. Oleh karena itu kalau kita melihat pembelajaran daring saat pandemi covid 19, sebagian besar waktunya berisi guru menjelaskan.

Mengapa guru selalu menjelaskan materi ajar? Ketika ngobrol dengan teman-teman guru, saya mendapat kesan bahwa pada umumnya guru tidak yakin siswa dapat mempelajari sendiri materi ajar yang sedang dibahas. Lebih dari itu guru takut kalau nanti siswa tidak dapat mengerjakan soal ulangan atau ujian, terus gurunya disalahkan. Mengapa guru cenderung memberi materi, ternyata guru juga tidak percaya murid bisa mencari sendiri. Jadi mirip dengan orangtua yang merasa tidak yakin anaknya dapat makan sendiri, sehingga kemudian disuapi. Atau orang tua berpikir jika makan sendiri nanti lama dan atau makanannya tumpah, sehingga lebih baik disuapi saja. Sebagian guru mengatakan, kalau siswa diminta belajar sendiri atau belajar kelompok akan memakan waktu lama, sehingga waktu yang tersedia tidak cukup. Oleh karena itu guru memilih menjelaskan agar waktunya singkat, sehingga cakupan kurikulum dalam diselesaikan.

Mengapa fenomena seperti di atas sering terjadi? Mungkin seperti sinyalemen yang sering diungkap oleh Prof. Mohammad Nuh bahwa guru itu sekolahnya di zaman dahulu, bekerja mengajar di saat sekarang, dengan harapan ilmu yang diajarkan dapat digunakan oleh muridnya di masa akan datang. Jadi guru cenderung menerapkan pengalaman saat sekolah dahulu ketika sekarang mengajar. Guru belum sepenuhnya memahami kalau zaman sudah berubah. Anak-anak generasi Z dan generasi Alpha

yang *digital native* sudah terbiasa mencari berbagai informasi di dunia maya, sehingga sudah terbiasa memahami informasi yang mereka peroleh. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang termasuk *digital emigrant* yang umumnya gagap teknologi (gaptek). Guru-guru yang berusia muda, katakanlah yang berusia di bawah 40 tahun mungkin sudah terbiasa dengan gadget, walaupun belum tentu terbiasa mencari informasi dengan gadgetnya itu. Namun, paling tidak mereka tidak terlalu lama belajar, ketika harus menggunakan gadgetnya atau laptopnya untuk mencari informasi yang terkait dengan tugasnya mengajar. Namun, bagi guru senior dan tidak biasa menggunakan sarana IT, mungkin perlu usaha ekstra untuk belajar menggunakan mesin pencari informasi (*searching engine*) di gadget atau laptopnya.

Apakah fenomena seperti itu hanya terjadi pada guru? Menurut saya tidak. Saya sebagai dosen tampaknya juga seperti itu. Suatu saat ketika saya memberi kuliah ada mahasiswa yang asyik dengan HPnya. Saya merasa jengkel dan saya tegur. Apa yang terjadi? Mahasiswa tersebut mengatakan sedang membaca artikel tentang topik yang saya bahas, yang menurut dia lebih baru dan lebih komprehensif. Dengan hati ndongkol, saya minta dia ke depan kelas dan menjelaskan apa yang dia baca. Mendengarkan penjelasannya, saya tertegun. Artikel yang dia baca memang baru dan konsep yang dibahas memang lebih baru dan lebih komprehensif. Lebih dari itu mahasiswa tersebut dapat menjelaskan dengan sangat baik. Secara jujur, walaupun agak malu, saya katakan “Anda hebat”. Kemudian meminta meneruskan kebiasaan mencari informasi yang lebih terkait dengan topik yang dibahas dalam perkuliahan dan bahkan mengajari teman-temannya.



Gambar 6.3. Kecepatan Perubahan, Termasuk Pemanfaatan IPTEK di Beberapa Sektor
 Sumber: Mohammad Nuh, ppt. (modified)

Selesai memberi kuliah saya merenung dan dalam hati membetulkan bahwa kami para dosen dan guru adalah *digital emigrant* sedangkan mereka itu (siswa dan mahasiswa) *digital native*, yang tentu lebih canggih dalam menggunakan gadget untuk berbagai hal, termasuk untuk mencari informasi yang diperlukan. Saya jadi teringat beberapa kali diajari oleh cucu yang masih SD bagaimana menggunakan HP. Anak kecil yang belum pandai membaca ternyata pandai mencari film atau video di TV maupun di gadget.

Mungkin kita bertanya mengapa guru dan dosen yang relatif lambat dalam memanfaatkan teknologi digital dalam pekerjaannya? Gambar 6.3 membetikan ilustrasi bahwa yang paling cepat mengalami perubahan adalah teknologi dalam mengembangkan diri, disusul dunia bisnis dan dunia pendidikan yang paling akhir. Tentu dalam perkembangan tersebut memanfaatkan iptek. Oleh karena itu dapat difahami ketika kita sudah terbiasa membeli barang secara online, mengirim uang dengan *mobile banking*, kita belum terdorong untuk menggunakan teknologi tersebut untuk pembelajaran di ruang kelas. Oleh

karena itu, ketika terjadi pandemi covid 19, kemudian guru dan dosen dipaksa melakukan pembelajaran secara daring, mereka (termasuk saya) gelagapan, sehingga seorang kawan dosen berkelakar “jangan-jangan itu cara Allah s.w.t mengajar kita bagaimana menggunakan teknologi informasi untuk proses pendidikan.

Jika kita tahu bahwa salah satu tantangan guru ke depan adalah bagaimana menggunakan teknologi digital untuk mencari berbagai informasi, maka beradaptasi dengan dunia teknologi informasi menjadi tugas penting bagi guru. Bagaimana agar para guru belajar mencari informasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dari berbagai studi ternyata kemampuan seperti itu ternyata merupakan keterampilan yang perlu dilatih secara terus menerus. Oleh karena itu harus rajin praktik mencari informasi yang terkait materi ajar dan bahkan materi pengembangan diri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan begitu, disamping mendapatkan informasi yang diperlukan juga memiliki keterampilan yang nanti ditularkan kepada siswa.

Bagaimana Memilih Materi yang Terus Bertambah?

Teman saya pernah mengeluh ketika mengajari anaknya yang masih SD kelas IV. Menurut dia materi ajar sekarang semakin banyak dan semakin sulit. Dia mencontohkan apa yang dipelajari anaknya yang masih kelas IV SD, dahulu merupakan materi ajar SMP. Teman yang lain yang baru pulang dari sekolah di luar negeri juga mengeluh, belajar di SD di Indonesia jauh lebih berat dibanding di negara tempat dia menempuh S3. Materi SD di Indonesia jauh lebih banyak dan juga lebih *advance*. Pada hal anak dia baru kelas III SD.

Memang dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga kemajuan zaman, apa yang perlu diketahui dan dipelajari semakin banyak. Apa-apa yang dahulu belum ada dan

sekarang ada serta telah menjadi bagian kehidupan kita, biasanya dimasukkan kurikulum. Katakanlah dahulu belum ada jual beli online, belum ada mobil listrik, belum ada menteri koordinator dan sebagainya. Karena ketiganya telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara maka kemudian masuk dalam kurikulum. Bahkan temuan-temuan baru yang sangat *advance*-pun mulai dimasukkan ke kurikulum dengan alasan siswa perlu mengetahui, misalnya lubang hitam (*black hole*), *transhuman* dan sebagainya.

Tim penyusun kurikulum sering mengeluh karena banyak titipan dari pejabat atau tokoh masyarakat yang ingin memasukkan apa-apa yang dianggap penting ke dalam kurikulum. Biasanya itu yang terkait dengan tugasnya atau bidang keahliannya. Ahli Fisika ingin memasukkan konsep-konsep baru dalam Fisika karena dianggap penting, ahli Hukum ingin memasukkan materi hukum karena diyakini pemahaman terhadap hukum itu penting, pejabat di kementerian yang menangani lingkungan hidup ingin memasukan materi lingkungan, tokoh militer ingin memasukkan topik bela negara dan sebagainya. Bahwa semua itu penting kita setuju, tetapi apakah harus secara eksplisit menjadi materi ajar harus dipertimbangkan masak-masak.

Jika waktu belajar terbatas, sementara materi ajar sangat banyak apalagi dituntut agar siswa mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOT), akibatnya alokasi waktu yang disediakan tidak cukup. Oleh karena itu guru harus memilih mana materi esensial dan sulit dipelajari sendiri serta mana materi yang kurang penting dan siswa dapat mempelajarinya sendiri. Materi esensial artinya materi yang sangat mendasar dan menjadi landasan untuk mempelajari materi lain. Materi tidak esensial artinya, walaupun perlu difahami oleh siswa tetapi tidak mendasari materi lain. Guru harus memastikan materi esensial

telah dipelajari dan difahami oleh siswa, karena jika tidak materi lain yang merujuk ke materi tersebut tidak akan dapat difahami oleh siswa. Guru juga harus dapat memastikan mana materi yang dapat dipelajari sendiri oleh siswa dan mana yang harus dijelaskan oleh guru.

Bagaimana yang terjadi di lapangan? Tampaknya guru belum terbiasa memilih materi esensial. Saya pernah mendampingi beberapa guru SMP yang secara bersama mencermati kurikulum. Ketika menjumpai materi ajar yang dimuat di beberapa matapelajaran dan saya sarankan untuk ditiptikan ke salah satu matapelajaran saja supaya efisien, ternyata guru tidak berani. Khawatir dianggap meninggalkan materi tersebut dan takut saat ada ujian bersama siswa tidak dapat mengerjakan. Beberapa guru mengatakan yang aman, semua materi diajarkan walaupun mungkin saat akhir jam pelajaran belum semua siswa mencapai menguasainya. Jika itu terjadi, siswa yang belum menguasai diminta belajar mandiri atau bersama dengan teman.

Bagaimana dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang mendorong guru menerapkan kurikulum secara fleksibel? Artinya guru dapat memilih materi ajar yang cocok untuk sekolahnya. Sampai naskah ini ditulis saya belum membaca laporannya. Dari informasi, Sekolah Penggerak yang menjadi tempat uji coba Kurikulum Merdeka sudah dapat melaksanakan dengan baik. Namun Sekolah Penggerak umumnya sekolah cukup baik dengan kepala sekolah yang inovatif. Apalagi ada pendampingan cukup lama, sehingga sangat mungkin guru sudah berani dan dapat memilih materi esensial. SD dan MI yang didampingi Program Inovasi AUSAID tampaknya juga sudah dapat melakukan dengan baik (Samani, 2022). Namun perlu diingat, sejak tahun 2019 sekolah tersebut didampingi oleh Fasda (Fasilitator Daerah) yang terlatih. Tampaknya sosialisasi dan pelatihan singkat belum

dapat membuat guru berani dan mampu melakukan pemilihan materi esensial. Diperlukan pendampingan secara intens sampai mereka tahu kalau dengan menguasai materi esensial dengan proses pembelajaran yang tepat, siswa dapat secara mandiri mempelajari materi lainnya. Pendampingan yang selama ini dilakukan oleh Fasda pada Program Inovasi dan oleh Tim yang selama ini mendampingi Sekolah Penggerak perlu didiseminasi ke sekolah-sekolah lain, sehingga pada saatnya semua guru mampu memilih materi esensial.

Internasionalisasi

Perancang UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tampaknya sadar akan pentingnya mendorong pendidikan agar bertaraf internasional, sehingga Pasal 30 ayat (3) mengamanatkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Oleh karena itu pada tahun 2004 Kemendikbud mengembangkan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) di beberapa kota besar. Dimulai dengan sekolah negeri dan lazimnya dipilih sekolah yang memang dikenal bermutu baik. Pada tahap berikutnya ditunjukkan beberapa sekolah swasta yang juga dikenal bermutu baik.

Namun program RSBI diprotes oleh beberapa pihak dengan argumentasi menjadikan sekolah menjadi mahal dan terjadi segregasi sekolah, ada yang bertaraf internasional dan ada yang tidak. Puncaknya diajukan yudicial review terhadap pasal tersebut dan Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal tersebut tidak berlaku, sehingga RSBI dihentikan. Sebagai gantinya, khususnya untuk sekolah swasta yang sudah terlanjur menjadi RSBI disediakan wadah baru dengan nama SPK (Sekolah dengan Perjanjian Kerjasama) dengan pengertian sekolah tersebut

memiliki kerjasama dengan Lembaga Pendidikan di luar negeri yang terdaftar di negara tempatnya berada.

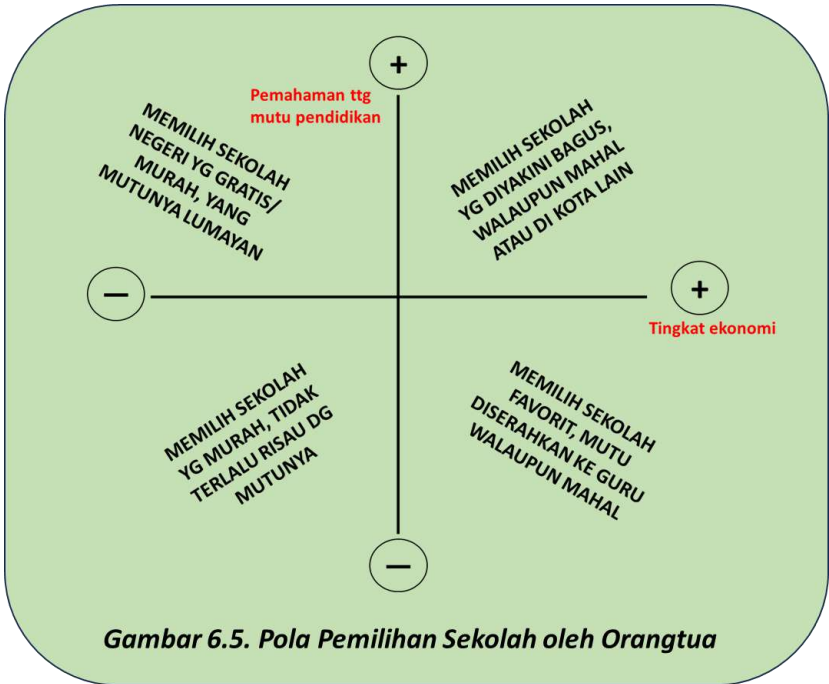
SPK ternyata terus tumbuh. Dari beberapa sumber pada tahun 2022 jumlahnya mencapai sekitar 500 buah dan diperkirakan akan terus bertambah. Mengapa demikian? Kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah tumbuh di masyarakat, sehingga orangtua seperti itu berusaha menyekolahkan anaknya di sekolah yang diyakini baik, walaupun harus membayar. Itulah mengapa di beberapa daerah, sekolah negeri yang gratis kekurangan murid sementara sekolah swasta yang membayar mahal justru diserbu orangtua. Merasa harus menaikkan statusnya di mata masyarakat, para penyelenggara pendidikan dengan mentransformasi sekolahnya menjadi SPK, yang tentu dengan biaya yang cukup mahal. Ternyata SPK diminati oleh masyarakat, khususnya yang termasuk mampu secara ekonomi. Oleh karena itu dapat difahami kalau kemudian SPK terus tumbuh, bahkan beberapa yayasan bahkan mendirikan sekolah yang sejak awal berstatus SPK.

SPK lazimnya menggunakan kurikulum dari negara maju, misalnya Cambridge atau IB dan menggunakan pengantar bahasa Inggris. Ada beberapa SPK yang juga menggunakan bahasa pengantar kedua, bahasa Mandarin dan atau bahasa Arab. Dari mana gurunya? Beberapa LPTK memiliki program internasional yang diharapkan dapat mengajar di RSBI yang sekarang bertransformasi menjadi SPK. Namun tampaknya belum sesuai dengan harapan. Buktinya banyak SPK yang mempekerjakan “guru asing”, khususnya untuk matapelajaran tertentu. Beberapa kepala SPK yang saya temui menjelaskan bahwa guru-guru alumni LPTK (Indonesia) dinilai belum memenuhi kualifikasi yang dituntut oleh lembaga pendidikan partnernya di luar negeri. Mau merekrut guru dari “Barat” cukup mahal, sehingga akhirnya banyak SPK merekrut guru dari Philippines, Singapore dan India.

Apakah kemampuan mereka lebih baik dibanding guru produk dalam negeri (LPTK)? Sampai saat ini saya belum pernah membaca penelitian tentang itu. Namun yang jelas, mereka lebih fasih berbahasa Inggris karena itu merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan ketika mereka sekolah di negaranya. Sementara lulusan LPTK (dalam negeri), walaupun berasal dari program internasional ternyata kesulitan mengajar dengan pengantar bahasa Inggris. Mengapa demikian? Seorang kawan yang berlatar belakang S1 dari LPTK program internasional dan berpengalaman mengajar di SMP swasta (non SPK), kemudian mendapat kesempatan menempuh S2 di negara berbahasa Inggris menjelaskan sebagai berikut. Ketika di Indonesia, walaupun ketika di ruang kuliah berbahasa Inggris, tetapi di luar kelas dan di rumah mahasiswa berbahasa Indonesia, sehingga tetap saja tidak lancar ketika harus mengajar dengan pengantar bahasa Inggris. Yang bersangkutan lancar berbahasa Inggris karena saat menempuh S2 di luar selama dua tahun sehari-hari harus berbahasa Inggris, sehingga mampu mengajar dengan pengantar bahasa Inggris.

Bagaimana dengan materi perkuliahan? Teman saya yang ketika menempuh S3 di luar negeri juga nyambi menjadi *teaching assistant* mengatakan, sebenarnya kurikulum dan materi ajar S1 di Indonesia tidak beda jauh dengan kurikulum di negara maju tempat dia belajar. Yang membedakan adalah pola perkuliahan. Di Indonesia dalam perkuliahan S1, dosen masih banyak menjelaskan bahkan sampai detail dengan harapan mahasiswa benar-benar memahami materi kuliah. Di negara tempat yang bersangkutan menjadi *teaching assistant*, dosen hanya menjelaskan secara global dan mahasiswa diminta untuk mendalaminya sendiri. Jika merasa belum faham mahasiswa dapat konsultasi dengan *teaching assistant* dan itupun lebih banyak menunjukkan dimana materi itu dapat diperoleh dan bagaimana garis besar konsep/teorinya. Jadi mahasiswa lebih

banyak belajar mandiri. Mirip dengan model pembelajaran yang disarankan oleh WEF. Sangat mungkin perkuliahan seperti itu juga berpengaruh ketika yang bersangkutan harus mengajar di SPK yang menerapkan kurikulum dari negara maju.



Sebenarnya internasionalisasi pendidikan merupakan sebuah keniscayaan. Gambaran itu telah ditunjukkan oleh Thomas Frieman dalam bukunya *The World is Flat* yang terbit tahun 2005. Dalam bidang pendidikan, indikatornya juga sudah tampak jelas. SPK yang umumnya menggunakan kurikulum negara lain, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, sering memiliki guru dari negara lain untuk matapelajaran tertentu, ternyata diminati oleh masyarakat, khususnya mereka yang taraf ekonominya baik. Saya sering mengatakan, dalam konteks aspirasi menyekolahkan anaknya, orangtua dapat dibagi menjadi empat kelompok seperti Gambar

6.5. Orangtua yang memiliki aspirasi tinggi untuk pendidikan anaknya, sementara ekonominya bagus, akan berusaha menyekolahkan anaknya ke sekolah yang berkualitas bagus, walaupun harus membayar mahal. Bahkan mengirim anaknya ke sekolah ke kota lain. Orangtua yang memiliki aspirasi tinggi untuk pendidikan anaknya, tetapi ekonominya belum baik, umumnya menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri, dengan alasan murah/gratis. Toh sekolah negeri mutunya lumayan baik. Orangtua yang tidak peduli dengan mutu pendidikan untuk anaknya dan kebetulan ekonominya kurang baik, akan menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dekat, yang murah atau bahkan gratis, walaupun mutunya kurang baik. Fenomena itu yang mendorong berkembangnya SPK dengan menjanjikan mutu bagus, menggunakan kurikulum dari negara maju, dan konskuensinya SPP-nya mahal.

Dengan keyakinan bahwa internasionalisasi semakin nyata, butunya sekarang semakin banyaknya SPK, maka guru di Indonesia dan juga LPTK sebagai penghasil calon guru harus menyiapkan diri. Jika materi ajar diyakini sudah cukup baik, maka pola perkuliahan yang tampaknya perlu ditransformasi. Kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa juga harus ditingkatkan dan bagi mereka yang menempuh program interasional harus mendapat perlakuan khusus. Program *immersion* minimal satu semester di negara berbahasa Inggris merupakan salah satu pilihan. Lebih baik lagi kalau program *double degree*. Dapat juga untuk periode waktu tertentu mahasiswa diasramakan dengan keharusan berbahasa Inggris setiap hari.

Bagaimana dengan mereka yang sudah lulus? Dengan prinsip bahwa bahasa akan lancar jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka guru yang ingin dapat mengajar dengan pengantar bahasa Inggris harus membiasakan diri

berbicara dan mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris. Di Jawa Timur ada “Kampung Inggris” di daerah Pare Kediri, dimana hampir semua orang di situ sehari-hari berbahasa Inggris. Banyak mahasiswa yang ingin lancar berbahasa Inggris kemudian tinggal di lokasi tersebut beberapa lama. Mungkinkah guru yang ingin lancar berbahasa Inggris mencari tempat seperti itu? Atau dapat mengkreasi sendiri sebuah komunitas yang menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian. Bukankah model *English day* sudah sering dilaksanakan di beberapa sekolah, yang konon dapat membantu mempercepat kemampuan berbahasa Inggris, khususnya dalam *speaking*. Dan kemampuan dalam *speaking* itulah kelemahan guru kita, walaupun mereka lulusan program internasional.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Malik dkk, 2021. Hasil Akreditasi Sekolah dan Madrasah. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Auguste, Byron G., Bryan Hancock dan Martha Laboissiere. 2008. *The economic Cost of the US Education Gap*. Washington DC: McKinsey Report.
- Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL). 2011. *National Professional Standards for Teachers*. South VIC: Education Services Australia as the legal entity for the Ministerial Council for Education, Early Childhood Development and Youth Affairs (MCEECDYA).
- Arends, Richard. 1997. *Classroom Instruction and Management*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Barber, Michael dan Mona Mourshed. 2007. *How the World's Best-Performing School System Come Out on Top*. Washington DC: McKinsey Report.
- Becker, Matthias dan Georg Spottl. 2020. *Regional TVET Teacher Standard for Asean Essential Competences For TVET Teachers in Asean*. Bangkok: Seameo-GTZ.
- Blaschke, Lisa Marie. 2012. *Heuta. gogy and Lifelong Learning: A Review of Heutagogical Practice and Self-Determined Learning*. [https://staffnew.uny.ac.id/upload/132326892/pendidikan/Pembelajaran 20Mandiri_Artikel%20_Lisa%20Marie%20Blaschke.pdf](https://staffnew.uny.ac.id/upload/132326892/pendidikan/Pembelajaran%20Mandiri_Artikel%20_Lisa%20Marie%20Blaschke.pdf)

- Bonafix, Nunnun dan Amarena Nediari. 2022. "Potensi dan Peluang Metaverse dalam Dunia Pendidikan". *Prosiding SNADES 2022 – Desain Kolaborasi Interdisipliner di Era Digital*. https://repository.upnjatim.ac.id/9952/1/04_NUNNUN%20BONA%20FIX%20S.T.%20M.Ds.%20%28REVISI%20FP%29%20%2824-30%29.pdf
- Dewantara, Ki Hajar. (2004). "Hal Pendidikan: Prasaran dalam Kongres Taman Sisw Pertama, tahun 1930" dalam *Karya Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2021). Buku Panduan PPG.
- Ditjen Pembelajaran Kemenristekdikti. 2019. *Capaian Pembelajaran Lulusan PPG*. Jakarta: Ditjen Pembelajaran Kemenristekdikti.
- Duhuo, Ibtisan Abu. 1999. *School-based Management*. Paris: International Institute for Educational Planning.
- Duckworth, Angela L. 2016. *GRIT: The Power of Passion and Perseverance*. New York: Scribner.
- Dweck, Carrol. 2006. *Mindset: The New Psychology of Success: How We Can Learn to Fulfill Our Potential*. Manhattan: Random House Publishing Group.
- Fang Qi. (2011). *Classroom Research and Action Research: Principles and Practice in EFL Classroom*. [file:///C:/Users/Admin/Downloads/CarryoutClassroom Research%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/CarryoutClassroom%20ResearchandAction%20(1).pdf)

- Fosnot, Catherine Twomey (ed). (2005). *Constructivism: Theory, Perspectives, and Practice*. New York: Teachers College Press.
- Friedman, Thomas. 2005. *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. New York: Farrar, Straus and Giroux
- Gardner, Howard. 2008. *Five Minds for the Future*.
<https://howardgardner01.files.wordpress.com/2012/06/five-minds-for-the-future-january-20081.pdf>
- Gopinathan, Saravanan. 2015. *Education: Singapore Chronical*. Singapore: Institute of Policy Studies.
- Handy, Charles (1997). "Finding Sense in Uncertainty" dalam *Rethinking the Future*. Editor: Rowan Gibson. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Hase, Stewart Dan CHRIS KENYON. 2007. *Heutagogy: A Child of Complexity Theory*. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/HeutagogyandComplexityTheory.pdf>
- Hattie, John A.C. 2009. *Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. London: Routledge.
- Hudson, Clemente Charles dan Vesta R. WHISLER. (2010). Contextual Teaching and Learning for Practitioners. <https://www.iiisci.org/Journal/pdv/sci/pdfs/E668PS.pdf>
- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) – WB. 2019. *Education Projects: School Readiness and Escuela Nueva. Report No. 135418*. Washington DC: The World Bank.

- Jalel, Sadna dan Anne Mary Thomas. 2019. *Learningstyles Theories and Implications for Teachinglearning*. San Jose: Horizon Research Publishing.
- Kurnia, Dadang. 2013. *Post-Study Pre-Service Practical Training Programme for TVET Teacher Students*. Shanghai China: Regional Cooperation Platform for Vocational Teacher Education in Asia
- Liu, Woon Chia. 2022. *Singapore's Approach to Developing Teachers: Hindsight, Insight, and Foresight*. New York: Routledge.
- Moris, Halden A. 2013. *Preparing educators in TVET for building human capacity in the Caribbean*.<https://uwispace.sta.uwi.edu/items/67c18ec6-225f-4c31-adcf-65935952fde>
- Pangabebean, Meicky Shoreamanis dan Karel Karsten Himawan. 2016. The Development of Indonesian Teacher Competence Questionnaire. Di dalam *Journal of Educational, Health and Community Psychology Vol 5, No 2, 201*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Per mendikbud) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat Sebelum Tahun 2016.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat Sampai dengan Akhir Tahun 2015.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- Pritchett, Lant dan Banerji. 2022. *Reforming Indonesia's curriculum: How Kurikulum Merdeka Aims to Address Learning Loss and Learning Outcomes in Literacy and Numeracy*. Jakarta: INOVASI.
- Pujiastuti, E., T.J. Raharjo dan A.T. Widodo. 2012. Kompetensi Profesional, Pedagogik Guru IPA: Persepsi Siswa tentang Proses Pembelajaran, dan Kontribusinya terhadap Hasil Belajar IPA di SMP/MTs Kota Banjarbaru. *Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology*, 1 (1).
- Puji Lestari. 2023. "Fauzan Lima Bulan Mampu Membaca Lancar". Di *Kisah Transformasi Pembelajaran di Daerah*. Editor: Tim INOVASI. Jakarta: INOVASI.
- Rogers, Everett M. 1983. *Diffusion of Innovations*. London: The Free Press.
- Sahlberg, Pasi. 2011. *Finnish Lessons: What can the World Learn from Educational Change in Finland?* New York: Teachers College, Columbia University.
- Samani, Muchlas (Ed). 2022. *Pendidikan Profesi Guru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Samani, Muchlas, Warsono, Yuni Sri Rahayu dan Djodjok Supardjo. 2015. *Local Wisdom As A Character Education Basis*. Makalah Disampaikan pada ASAIHL Conference di Isfahan-Iran, 22-25 Mei 2015.
- Samani, Muchlas. 2016. *Laporan Pelaksanaan sebagai Visiting Scholar di ITB Bremen*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

- Sayed, Yusuf dan Tarryn De Kock. 2019. *Teacher career reforms in South Africa*. Paris: International Institute for Educational Planning
- Schoenfeld, Alan H. 2013. "Reflections on Problem Solving Theory and Practice" Di dalam *The Mathematics Enthusiast, ISSN 1551-3440, Vol. 10*.
- Selvi, Klymet .2010. Teachers' Competencies. ResearchGate: <https://www.researchgate.net/publication/283961538>
- Semiawan, Conny R. (1992). Pengembangan Kurikulum Berdiferensiasi. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Siraj, Saedah dan M Mohammed Sani Ibrahim. 2012. *Standard Kompetensi Guru Malaysia*. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/pdf>
- Siti Saudah. 2023. "Hidup Berarti di Pelosok Negeri". Di dalam *Kisah Transformasi Pembelajaran di Daerah*. Editor: Tim INOVASI. Jakarta: INOVASI.
- Staron, M. 2011. *Life-Based Learning Model – A Model for Strength-Based Approaches to Capability Development and Implications for Personal Development Planning*. Australian Government Department for Education Science and Training and TAFE NSW <http://learningtobeprofessional.pbworks.com/w/page/32893040/Life-basedlearningA>
- Tatto, Maria Teresa. 2021. *Teacher Education in the United States of America: An Overview of the Policies, Pathways, Issues and Relevant Research*. Di dalam ResearchGate: <https://www.researchgate.net/publication/353711799>

- Tim Lam Kependidikan. 2018. *Studi Kelayakan Pendidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan*. Jakarta: Naskah Tidak Diterbitkan.
- Trilling, Bernie & Thomas Fadel. 2009. *21st Century Skills: Learning for Life in Our Time*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Wang, Minjuan dan Myunghe Kang. 2006. *Cybergogy for Engaged Learning: A Framework for Creating Learner Engagement Through Information and Communication Technology*. <https://www.research.gate.net/publication/226493573>.
- Wulandari, V. Enda. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapore. 2021. *Bagaimana Singapura Menghasilkan Kualitas Guru*. Singapore: KBRI Singapore.
- World Economic Forum (WEF). 2020. *School of the Future: Defining New Model of Education for the Forth Industrial Revolution*. Geneva Switzerland: World Economic Forum,
- Yamasaki, Hirotooshi. 2016. *Teachers and Teacher Education in Japan*. Grad. School Educ. Hiroshima Univ., Part III, No. 65, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/222958109.pdf>.
- Zonaphan, Leonard et.all. 2022. *Metaverse as a Future of Education: A Systematic Review*. <https://www.researchgate.net/publication/367141719> [Metaverse as A Future of Education_A_Systematic_Review](https://www.researchgate.net/publication/367141719)